

BERITA DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT



KLIPING KORAN

BULAN SEPTEMBER

TAHUN 2026

Jl. Khatib Sulaiman No.87 Padang Telp. (0751) 7057391 - 705753
Fax. (0751) 7059328 Padang 25133, Sumatera Barat

NO	JUDUL	HALAMAN
1.	DPRD Sumbar Tetapkan APBD Perubahan 2026	1
2.	Ketua DPRD Sumbar, Muhidi Dorong UMKM Berdaya dan Melek Digital	3
3.	Ketua DPRD Sumbar Dorong Lahirnya Generasi Unggul	5
4.	DPRD Sumbar Setujui Ranperda Perubahan APBD 2026 jadi Perda	7
5.	Muhidi Ajak Pelajar Perkuat Literasi dan Akhlak	9
6.	DPRD dan Pemprov Sumatera Barat Rasionalkan Belanja Daerah	10
7.	DPRD _ Peprov Sumbar Perkuat Budaya Hidup Sehat Masyarakat	12
8.	DPRD Sumbar Soroti Percepatan Anggaran	13
9.	Menjadi Media Inspirasi Bagi Masyarakat	15
10.	APBD Sumbar Tertekan, Belanja Digenjot	16
11.	Sumbar Terus Tumbuh dan Tangguh	18
12.	Sumbar Tumbuh, Kesejahteraan Jadi Ujian	20
13.	Pertumbuhan Haryus Berdampak dan Terasa di Masyarakat	22
14.	DPRD dan Pemprov Sumbar Sepakati Perubahan APBD 2026	23
15.	DPRD Sumbar Gelar Aksi Sehat Parlemen	25
16.	Dana TKD Diduga Tidak Sesuai Peruntukan"Nofrizon Ingatkan Dampak Hukum	26
17.	Gaungkan Semangat Membangun Sumbar yang Tumbuh dan Tangguh	28
18.	DPRD dan Pemprov Sumbar Sepakati Perubahan APBD 2026 Rp 7,04 T	30
19.	DPRD Sumbar Gelar Rapat Paripurna Hari Jadi Sumatera Barat ke-81	32
20.	81 Tahun Sumbar, Ketergantungan Fiskal Disorot	34
21.	DPRD Desak Pertaminan Buka Hasil Uji Pertalite	35
22.	Hari Jadi Sumatera Barat ke 81 Momentum Memperkuat Langkah Menjawab Tantangan Pembangunan	36
23.	Hari Jadi Sumatera Barat ke 81, Muhidi dan Mahyeldi Bicara Masa Depan : "Sumbar Tumbuh, Sumbar Tangguh"	3
24.	Ketua DPRD Sumbar Ajak Masyarakat Bersama Dukung Pembangunan Melalui Pajak	4
25.	Mario Syahjohan Minta Penegakan Hukum Tanpa Kompromi	4
26.	Pemprov Sumbar Gelar Gebyar Pajak Bertabur Hadiah	4
27.	Ketua DPRD Sumbar Ajak Masyarakat Dukung Pembangunan Lewat Pajak	4
28.	DPRD Sumbar Ajak Masyarakat Bersama Dukung Pembangunan Melalui Pajak	4
29.	Muhidi Dorong Pajak Berbasis Kesadaran	4
30.	Muhidi Ajak Pelajar Luangkan Waktu Satu Jam Membaca Setiap Hari	5
31.	Ketua DPRD Sumbar Dorong Guru PPPK Cetak Geberasi Unggul	5
32.	Muhidi Dorong Guru PPPK Jadi Penggerak Genarasi Unggul Menuju Indonesai Emas 2045	5
33.	Pansus Aset DPRD Sumbar Dorong Optimalisasi Rumah PDRI di Bukitinggi	5
34.	Pansus Aset DPRD Sumbar Dorong Optimalisasi Rumah PDRI di Bukitinggi, Potensi Dan Wisata Jadi Perhatian	5
35.	Muzli M Nur Salurkan Bantuan Alsintan di Pasaman	6
36.	Muzli M Nur Salurkan Bantuan Alsintan untuk Petani Pasaman	6
37.	Donizar : Adat dan Budaya Pasaman Harus Dijaga	6
38.	DPRD Sumbar Dorong Penguatan Peran Guru Wali	6
39.	Pansus Aset Dorong Pemanfaatan Rumah Eks Pemgubwil	6
40.	DPRD Sumbar Dorong Penguatan Peran Guru Wali untuk Cegah Masalah di Sekolah	6
41.	Nurfirmanwansyah Serahkan Bantuan 20 Laptop untuk SMAN 2 Sumbar	6
42.	Sri Kumala Dewi Ingatkan Bonus Demografi Berisiko Jadi "Bom Waktu"	7
43.	DPRD Sumbar Perkuat Aturan Lingkungan dan Olahraga, Mitigasi Bencana, hingga Prestasi Pemuda Jadi Perhatian	7

44. Perempuan Didorong Punya Pemahaman Politik dan Berani Bersuara 73
45. Nanda Satria : Kasus Yogi Jadi Pelajaran, Pengusaha Diminta Tertib Perizinan 74
46. Nanda Satria Apresiasi Putusan Kasus Starlink Mentawai 76
47. DPRD Sumbar Tetapkan Dua Ranperda Sebagai Usul Prakarsa 78
48. DPRD Sumbar Siapkan Dua Ranperda Strategis 82
49. Soal Kass Starlink Mentawai, Nanda Satria Ingatkan Pentingnya Izin Usaha 83
50. Muhidi : Guru Penentu Nasib Indonesia 2045 84
51. Donizar Desak Pemerintah Lindungi Warga 86
52. Iqra Chissa Ajak Masyarakat Perkuat Ketahanan Keluarga 87
53. Sumbar Didesak Bantu Daerah Tetangga Padamkan Karhutla 88
54. Polemik Gelar Datuak, DPRD Sumbar Sosialisasikan Perda Lembaga Adat 89
55. Ajak Warga Perkuat Ketahanan Keluarga di Era Digital 91
56. DPRD Sumbar Tetapkan Dua Ranperda Sebagai Usul Prakarsa 92
57. DPRD Sumbar Tetapkan Dua Ranperda Sebagai Usul Prakarsa 94
58. Tingkatkan Kewaspadaan pada Potensi Bencana 96
59. Perlindungan Lingkungan Perlu Aksi Nyata 97
60. Ade Putra Sosialisasikan Perda No 3 Tahun 2023 98
61. SMAN 2 Payahkumbuh Terima Bantuan 10 Laptop dari Nurkhalis 99
62. Atasi Dampak Kabut Asap Kiriman Pemda Didesak Segera Ambil Langkah Konkret 100
63. DPRD Sumbar Tetapkan Dua Ranperda Sebagai Usul Prakarsa 102
64. Warga Limau Manis Bersyukur Jalan Lingkungan Selesai Diaspal 105
65. Peran Keluarga dan Masyarakat Jadi Kunci Pencegahan Narkoba 107
66. Ranperda Penyelenggaraan Keolahragaan Sangat Strategis 108
67. Evi Yandri Gelorakan Semangat Perangi Narkoba 110
68. Narkoba Ancam Eksistensi Bangsa, Warga Diimbau Proaktif 111
69. Wakil Ketua DPRD Sumbar Ajak Masyarakat Perangi Narkoba :
70. Doni Harsiva Sosialisasikan Perda Penanggulangan Bencana di Koto Barapak :
71. Muhidi Dorong Pembangunan Berkelanjutan, Jalan Lingkungan Limau Manis Selatan Mulai Berbenah :
72. Pimpinan dan Anggota Dewan Intensifkan Sosialisasi Perda :
73. Sekretariat DPRD Sumbar Kembangkan 19 Inovasi Layanan :
74. Sekretariat DPRD Paparkan Capaian Publikasi dan Inovasi Layanan :
75. Masjid Mesti Jadi Ruang Aman dan Edukastif bagi Anak :
76. Ketua DPRD Sumbar Dorong Masjid Ramah Anak :
77. Anak Penyandang CP Butuh Pendampingan Psikologis dan Terapi Jangka Panjang :
78. Muhidi Ajak Masjid Jadi Pusat Pembinaan Karakter Anak :
79. Pengembangan KIP Didukung Peningkatan Kompetensi SDM :
80. DPRD Sumbar Dorong Perda Jadi Solusi Nyata :
81. WSYF, Penggerak Ekonomi Kreatif dan Gastronomi :
82. Guru, Kunci Utama Wujudkan Generasi Tangguh :
83. Komisi I DPRD Sumbar Dorong Potensi Perikanan Pandam Gadang Jadi Penggerak Ekonomi Masyarakat :
84. Selamat HariSumpah Pemuda :
85. Komisi I DPRD Sumbar Dorong Potensi Nagari Pandam Gadang :
86. BSN Bakal Dinonaktifkan Satatusnya dari Anggota Dewan :
87. Komitmen Anggota DPRD Sumbar Layani Masyarakat Gustami Hidayat Serahkan Bantuan Penaingan Rawan Pangan untuk Ibu Hamil dan Balita :
88. Komisi V DPRD Sumbar Matangkan Ranperda Olahraga, Jaminan Atlet dan Pembinaan Generasi Muda Jadi Perhatian :
89. Ketua DPRD Sumbar Ajak Guru Berinovasi dan Bangun Karakter Siswa :

90. Evaluasi Program MBG dan KDMP 149
91. Komisi I DPRD Sumbar Dorong Potensi Nagari Pandam Gadang 151

KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
Rakyat Sumbar	RABU, 30 SEPTEMBER 2026	9

DPRD Sumbar Tetapkan APBD Perubahan 2026

Padang, Rakyat Sumbar — DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) menetapkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD Perubahan tahun 2026 menjadi Peraturan Daerah (Perda). Namun, Ranperda tersebut perlu evaluasi dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

"Keputusan DPRD diberi Nomor:16 /SR/2026 tentang Persetujuan DPRD Provinsi Sumatera Barat terhadap Ranperda tentang Perubahan APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah," kata Ketua DPRD Sumbar Muhidi, saat membuka rapat paripurna Pengambilan Keputusan terhadap Ranperda Perubahan APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026, di ruang sidang utama, Selasa (29/9).

Ia menjelaskan, sesuai ketentuan Pasal 160 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, Raperda tentang Perubahan APBD yang telah disetujui bersama dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD, disampaikan kepada Menteri paling lambat 3 hari sejak tanggal persetujuan bersama untuk dievaluasi.

"Kami mengingatkan kepada Pemerintah Daerah menyampaikan Ranperda Perubahan APBD tahun 2026 yang sudah disepakati bersama kepada Menteri Dalam Negeri untuk dapat dilakukan evaluasi, sehingga realisasinya dapat pula segera dilaksanakan," ucap Muhidi.

Komisi VI anggaran yang akan diamprah dalam Ranperda Perubahan APBD 2026 disepakati bersama Pemerintah Daerah dan DPRD, dengan komposisi sebagai berikut; Pendapatan Daerah Rp6.784 triliun lebih, Belanja Daerah Rp6.957 triliun lebih, Pembiayaan Rp204 miliar lebih, Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp92 miliar.

"Setelah dapat evaluasi terhadap Ranperda Perubahan APBD itu akan setelah dapat pula pelaksanaan kegiatan dan anggaran yang terdapat dalam Perubahan APBD tahun 2026 dan setelah tingkat pula realisasi kegiatan dan anggaran pada tahun 2026 ini," pungkasnya.

Sementara itu, Gubernur Sumbar Mahyeldi mengapresiasi seluruh perangkat daerah supaya menyiapkan dokumen pelaksanaan program dan kegiatan yang dituangkan dalam DPPA-SKPD beserta rincian anggaran kas.

"Sehingga, program dan kegiatan dapat terealisasikan tepat waktu. Hal ini agar menjadi perhatian dan komitmen kita semua," tutup Mahyeldi. (*)



KLIPING BERITA



KETUA DPRD Sumbar Muhidi, Wakil Ketua DPRD Sumbar Evi Yandri Rajo Budiman, dan Nanda Satria, serta Gubernur Sumbar Mahyeldi, berfoto bersama setelah menandatangani nota persetujuan bersama penetapan APBD Perubahan 2026, saat rapat paripurna Pengambilan Keputusan Ranperda Perubahan APBD Provinsi Sumbar 2026, di ruang sidang utama, Selasa, (29/9).



KETUA DPRD Sumbar Muhidi, menandatangani nota persetujuan bersama penetapan APBD Perubahan 2026, saat rapat paripurna Pengambilan Keputusan Ranperda Perubahan APBD Provinsi Sumbar 2026, di ruang sidang utama, Selasa, (29/9).



WAKIL Ketua DPRD Sumbar Nanda Satria, menandatangani nota persetujuan bersama penetapan APBD Perubahan 2026, saat rapat paripurna Pengambilan Keputusan Ranperda Perubahan APBD Provinsi Sumbar 2026, di ruang sidang utama, Selasa, (29/9).



WAKIL Ketua DPRD Sumbar Evi Yandri Rajo Budiman, menandatangani nota persetujuan bersama penetapan APBD Perubahan 2026, saat rapat paripurna Pengambilan Keputusan Ranperda Perubahan APBD Provinsi Sumbar 2026, di ruang sidang utama, Selasa, (29/9).



GUBERNUR Sumbar Mahyeldi, menandatangani nota persetujuan bersama penetapan APBD Perubahan 2026, saat rapat paripurna Pengambilan Keputusan Ranperda Perubahan APBD Provinsi Sumbar 2026, di ruang sidang utama, Selasa, (29/9).



SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
- PROVINSI SUMATERA BARAT

KLIPING BERITA

KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
SINGGALANG	Rabu, 30 September 2026 (17 Rabiul Akhir 1448 H)	12

Ketua DPRD Sumbar, Muhidi Dorong UMKM Berdaya dan Melek Digital

PADANG - SINGGALANG

Di tengah derasnya arus informasi, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dituntut memiliki pengetahuan dan keterampilan (skill) agar tidak hanya tumbuh, tetapi juga bertransformasi menjadi pengusaha sukses.

Penegasan tersebut disampaikan Ketua DPRD Sumatera Barat (Sumbar), Muhidi, saat menjadi pemateri dalam Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan Kapasitas Pengusaha UMKM Angkatan XVI di Aula Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi dan UMKM (PLUT KUMKM), Senin (28/9).

Menurut Muhidi, selain modal materi, terdapat sejumlah investasi non-benda yang sangat menentukan kemajuan suatu bidang usaha. Investasi utama tersebut adalah penguasaan pengetahuan dan peningkatan keterampilan.

"Investasi yang membuat kita sukses tanpa modal adalah investasi pengetahuan dan skill," ujar Muhidi.

Ia menambahkan, modal finansial memang penting dalam menjalankan roda usaha. Namun, indikator lain yang tidak kalah krusial dalam membentuk wirausaha tangguh adalah investasi relasi atau hubungan baik dengan berbagai pihak. Jaringan yang dibangun secara konsisten dapat membuka berbagai peluang strategis di masa depan.

"Apabila hubungan baik dengan siapa pun terjaga, mereka bisa saja bekerja sama dengan kita untuk mengembangkan usaha," lanjut Muhidi.

Selain aspek pengetahuan dan jaringan, Muhidi menekankan pentingnya menjaga reputasi atau kepercayaan publik. Nilai moral ini dinilai sebagai investasi jangka panjang yang paling mahal dalam dunia bisnis.

"Membangun kepercayaan orang lain itu butuh waktu, maka mari kita jaga dengan baik. Apabila konsumen sudah percaya dengan produk kita, kualitasnya harus tetap dipertahankan," ajak Muhidi.

Lebih lanjut, ia menyebutkan bahwa pengelolaan waktu yang disiplin serta menjaga kesehatan fisik merupakan modal dasar terpenting bagi seorang pengusaha untuk tetap produktif.

Kegiatan Bimtek Peningkatan Kapasitas Pengusaha UMKM ini telah memasuki angkatan ke-16 dari total 19 angkatan yang dijadwalkan oleh Pemerintah Provinsi bersama DPRD Sumbar sepanjang tahun 2026.

Di samping penguatan karakter, Muhidi juga mendorong para pelaku UMKM di Sumbar untuk mulai melek teknologi dan memanfaatkan platform digital. Menurutnya, digitalisasi merupakan kunci utama untuk memperluas jangkauan pasar, meningkatkan efisiensi pemasaran, dan membantu produk lokal agar mampu bersaing di tingkat nasional hingga internasional.

Guna mendukung terciptanya ekosistem usaha yang kondusif, DPRD Sumbar bersama pemerintah daerah berkomitmen memberikan kepastian hukum bagi para pelaku usaha. Salah satu langkah konkretnya adalah melalui implementasi Peraturan Daerah (Perda) Sumbar Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan UMKM serta regulasi kemudahan berusaha.

Melalui rangkaian pelatihan intensif ini, legislatif berharap program pemberdayaan ke depan tidak hanya fokus pada pemberian bantuan modal, tetapi lebih diarahkan pada pendampingan berkala, fasilitasi sertifikasi, promosi produk, serta penguatan akses pembiayaan yang tepat sasaran. (*)



KLIPING BERITA









SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

KLIPING BERITA

KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
Haluan	RABU, 30 SEPTEMBER 2026	8

BEKALI SISWA DENGAN LITERASI

Ketua DPRD Sumbar Dorong Lahirnya Generasi Unggul

PADANG, HALUAN— Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), Muhidi, mendorong penguatan literasi sebagai salah satu upaya menciptakan generasi unggul yang mampu beradaptasi dengan perubahan zaman yang berlangsung semakin cepat.



KETUA DPRD Sumbar, saat jadi pemateri dalam kegiatan latihan menulis bagi siswa SMA se-Kota Padang Tahun 2026

Menurut Muhidi, generasi unggul sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia (SDM). Kualitas tersebut tidak hanya diukur dari penguasaan ilmu pengetahuan, tetapi juga harus dibarengi dengan kekuatan agama dan iman.

Dengan demikian, kata dia, akan lahir generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki kecerdasan emosional dan spiritual.

"Generasi unggul adalah generasi yang kuat imannya, mulia akhlaknya, luas ilmunya, banyak manfaat bagi umat (masyarakat) dan kehidupan," kata Muhidi saat menjadi pemateri dalam Bimbingan Teknis (Bimtek) Latihan Menulis/Literasi bagi siswa SMA se-Kota Padang Tahun 2026, Selasa (29/9).

Dalam kegiatan tersebut, Muhidi mengupas materi bertajuk "Menjadi Siswa Unggul dengan Literasi". Menurutnya, literasi menjadi bagian penting dalam membentuk generasi muda yang memiliki kemampuan berpikir dan menghadapi berbagai tantangan di tengah perubahan global.

Ia menilai tantangan yang dihadapi generasi muda semakin kompleks seiring perkembangan zaman dan globalisasi. Karena itu, siswa perlu dibekali kemampuan literasi agar lebih siap menghadapi berbagai perubahan dan tantangan tersebut.

"Generasi muda harus dipersiapkan agar mampu beradaptasi dengan perubahan yang semakin cepat. Salah satunya melalui penguatan literasi," ujarnya.

Bimbingan Teknis Latihan Menulis/Literasi bagi siswa SMA se-Kota Padang Tahun 2026 tersebut diikuti 80 siswa dari empat SMA Negeri di Kota Padang, yakni SMA Negeri 1 Padang, SMA Negeri 5 Padang, SMA Negeri 7 Padang dan SMA Negeri 11 Padang. Kegiatan tersebut berlangsung selama dua hari di salah satu hotel di Kota Padang. (*)



SISWA yang mengikuti pelatihan saat diajak berdiskusi oleh Ketua DPRD Sumbar, Muhidi

KOR



SISWA yang mengikuti pelatihan berfoto bersama dengan Ketua DPRD Sumbar, Muhidi



KETUA DPRD Sumbar, Muhidi



KETUA DPRD Sumbar saat menjadi pemateri dalam kegiatan pelatihan literasi untuk siswa di Kota Padang



SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

KLIPING BERITA

KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
POSMETRO PADANG	RABU, 30 SEPTEMBER 2026	8

DPRD Sumbar Setujui Ranperda Perubahan APBD 2026 jadi Perda

PADANG, METRO

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat (Sumbar) menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).

Keputusan itu diambil dalam Rapat Paripurna di ruang sidang utama DPRD Sumbar, Selasa (29/9) dan diberi Nomor : 16 /SB/2026 tentang Persetujuan DPRD Provinsi Sumatera Barat terhadap Ranperda tentang Perubahan APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Sumbar, Muhidi didampingi Wakil Ketua Evi Yandri Rejo Budiman dan Nanda Satria. Sedangkan dari pihak Pemerintah Provinsi (Pemprov), hadir dalam rapat tersebut Gubernur Sumbar Mahyeldi serta jajaran kepala organisasi perangkat daerah (OPD).

Pada kesempatan itu, Ketua DPRD Sumbar, Muhidi mengatakan, konstruksi anggaran yang terdapat dalam Ranperda Perubahan APBD Tahun 2026, terdapat defisit murni yang cukup besar mencapai lebih kurang Rp 204 miliar. Kondisi ini disebabkan terdapat penurunan target pendapatan dan disisi lain terdapat tambahan belanja daerah yang cukup besar terutama untuk penanganan dampak bencana.

"Menyikapi kondisi anggaran pada Ranperda Perubahan APBD Tahun 2026 tersebut, maka fokus pada pembahasan yang dilakukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah, adalah menyeimbangkan kembali konstruksi anggaran antara pendapatan dan belanja daerah, baik melalui optimalisasi target pendapatan maupun rasionalisasi belanja melalui efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran yang tepat sasaran," ungkap Muhidi.

Menurut Muhidi, dari pembahasan yang dilakukan Badan Anggaran dan TAPD, konstruksi anggaran yang disepakati bersama dengan komposisi, Pendapatan Daerah sebesar Rp 6.764.666.241.902,-51,-, Belanja Daerah sebesar Rp 6.957.334.285.-520,51.-, Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp 284.668.043.618,-, dan Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp. 92.000.000.000,-," tegas Muhidi.

Selain itu, kata Muhidi, Badan Anggaran bersama TAPD telah merampungkan pembahasan terhadap Ranperda Perubahan APBD Tahun 2026 dan Fraksi-Fraksi di DPRD juga telah menyampaikan pendapat akhir dengan kesimpulan menyetujui pembahasan Ranperda Perubahan APBD Tahun 2026 untuk dilanjutkan dengan pengambilan kepetusan.

"Kami mengingatkan kepada Pemerintah Daerah untuk segera menyampaikan Ranperda Perubahan APBD Tahun 2026 yang sudah disepakati kepada Menteri Dalam Negeri. Semakin cepat evaluasi terhadap Ranperda Perubahan APBD, tentu akan semakin cepat pula pelaksanaan kegiatan dan anggaran yang terdapat dalam Perubahan APBD Tahun 2026 dan semakin tinggi pula realisasi kegiatan dan anggaran pada tahun 2026 ini," tegas Muhidi.

Sementara itu, Gubernur Sumbar Mahyeldi menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada pimpinan dan segenap anggota dewan yang telah mencurahkan pikiran dan perhatian dalam proses pembahasan sampai dengan kesepakatan bersama atas peraturan daerah tentang Perubahan APBD tahun anggaran 2026.

"Dari berbagai tahapan persidangan yang telah dilenggarakan, kita telah berusaha untuk senantiasa menggunakan prinsip-prinsip penganggaran yang diatur dalam peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan darrah, yaitu efisien, efektif, disiplin, transparan dan akuntabel serta kewajaran dan kepatutan," tutupnya. (**)





PERSETUJUAN BERSAMA—Ketua DPRD Sumbar, Muhidi didampingi Wakil Ketua Evi Yandri Rajo Budiman dan Nanda Satria bersama Gubernur Sumbar Mahyeldi usai menandatangani nota persetujuan bersama Ranperda Perubahan APBD 2026, Selasa (29/9).



GUBERNUR Sumbar, Mahyeldi menandatangani nota persetujuan bersama Ranperda Perubahan APBD 2026.



KETUA DPRD Sumbar, Muhidi menandatangani nota persetujuan bersama Ranperda Perubahan APBD 2026.



WAKIL KETUA DPRD Sumbar, Evi Yandri Rajo Budiman menandatangani nota persetujuan bersama Ranperda Perubahan APBD 2026.



WAKIL KETUA DPRD Sumbar, Nanda Satria menandatangani nota persetujuan bersama Ranperda Perubahan APBD 2026.



SUASANA sidang paripurna pengambilan keputusan terhadap Ranperda Perubahan APBD tahun 2026 di ruang sidang utama DPRD Sumbar.



SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
KLIPING BERITA

KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
KORAN PADANG	RABU, 30 SEPTEMBER 2026	9

Muhidi Ajak Pelajar Perkuat Literasi dan Akhlak



KETUA *DPRD Sumbar Muhidi memberikan materi di hadapan puluhan siswa SMA se-Kota Padang pada Bimtek Latihan Menulis/Literasi Selasa (29/9).*

PADANG, KP - Ketua DPRD Sumbar Muhidi mendorong penguatan literasi di kalangan generasi muda sebagai upaya strategis mencetak Sumber Daya Manusia (SDM) unggul yang adaptif terhadap perubahan zaman.

Pesan tersebut disampaikannya saat menjadi pemateri dalam Bimbingan Teknis (Bimtek) Latihan Menulis/Literasi bagi Siswa SMA se-Kota Padang Tahun 2026 di salah satu hotel di Padang, Selasa (29/9).

Muhidi menegaskan, generasi unggul tidak hanya dituntut menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi juga harus memiliki benteng keimanan, akhlak mulia, serta kecerdasan emosional dan spiritual.

"Generasi unggul adalah generasi yang kuat imannya, mulia akhlaknya, luas ilmunya, banyak manfaat bagi umat, masyarakat, dan kehidupan," kata Muhidi.

Menurutnya, kemampuan literasi mulai dari membaca, menulis, hingga mengolah informasi menjadi bekal penting bagi siswa dalam membangun fondasi berpikir kritis di tengah derasnya arus globalisasi.

Melalui pemaparan materi bertajuk 'Menjadi Siswa Unggul dengan Literasi', ia mengajak para pelajar untuk memanfaatkan dunia tulis-menulis sebagai sarana menyampaikan gagasan positif.

Kegiatan yang berlangsung selama dua hari tersebut diikuti oleh 80 siswa yang berasal dari empat sekolah, yakni SMAN 1 Padang, SMAN 5 Padang, SMAN 7 Padang, dan SMAN 11 Padang. **(fai)**

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
KLIPING BERITA

KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
KORAN PADANG	RABU, 30 SEPTEMBER 2026	5

PERUBAHAN APBD 2026 DISEPAKATI

DPRD dan Pemprov Sumatera Barat Rasionalkan Belanja Daerah

PADANG, KP - DPRD bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 dengan proyeksi pendapatan daerah mencapai Rp6,764 triliun. Kesepakatan tersebut disahkan melalui Rapat Paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Sumbar Muhidi, di Ruang Utama DPRD Sumbar, Selasa (29/9).

Muhidi mengungkapkan, penataan ulang struktur keuangan daerah ini terpaksa dilakukan lantaran kemampuan fiskal Sumbar sempat tertekan hebat.

Pada pembahasan awal, Ranperda Perubahan APBD 2026 dibayang-bayangi defisit murni hingga Rp204 miliar. Kondisi itu dipicu merosotnya target penerimaan pendapatan serta membengkaknya alokasi belanja darurat, terutama untuk penanganan bencana alam di berbagai wilayah Sumbar.

Guna menambal celah defisit tersebut, Badan Anggaran (Banggar) DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) melakukan rasionalisasi belanja dan efisiensi anggaran secara ketat serta mengoptimalkan potensi pendapatan.

"Fokus kita adalah menyeimbangkan kembali konstruksi anggaran antara pendapatan dan belanja daerah melalui efisiensi yang tepat sasaran. Seluruh fraksi telah memberikan persetujuan yang dituangkan dalam Keputusan DPRD Nomor 16/SB/2026," tegas Muhidi.

Ia mendesak Pemprov Sumbar untuk segera memboyong dokumen Ranperda Perubahan APBD 2026 ini ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) agar proses evaluasi berjalan cepat. Percepatan evaluasi dinilai sangat krusial agar program pemulihan bencana dan pembangunan infrastruktur masyarakat tidak tersendat. **(fai)**



KLIPING BERITA



KETUA *DPRD Sumbar Muhidi bersama Gubernur Sumbar Mahyeldi, unsur pimpinan DPRD, serta Sekdaprov Arry Yuswandi foto bersama usai menyepakati Ranperda Perubahan APBD Sumbar 2026 dalam Rapat Paripurna di DPRD Sumbar, Selasa (29/9).*



SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

KLIPING BERITA

KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
Haluan	KAMIS, 1 OKTOBER 2026	2

DPRD–Pemprov Sumbar Perkuat Budaya Hidup Sehat Masyarakat

PADANG, HALUAN — DPRD bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Barat (Sumbar) memperkuat budaya hidup sehat di tengah masyarakat melalui kegiatan Aksi Sehat Bersama Parlemen dalam rangka memperingati Hari Jadi ke-81 Sumatera Barat.

Kegiatan yang digelar Rabu (30/9) diisi dengan jalan sehat, Cek Kesehatan Gratis (CKG), serta donor darah sebagai upaya mendorong masyarakat semakin aktif menjaga kesehatan dan melakukan pemeriksaan secara berkala.

Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah mengatakan peringatan hari jadi provinsi diharapkan tidak hanya menjadi kegiatan seremonial, tetapi juga menghadirkan manfaat yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

"Kami ingin peringatan hari jadi ini tidak hanya menjadi seremoni, tetapi juga diisi dengan kegiatan yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, khususnya dalam menjaga kesehatan," kata Mahyeldi.

Aksi Sehat Bersama Parlemen diikuti masyarakat umum, pimpinan dan anggota DPRD Sumbar, Gubernur dan Wakil Gubernur Sumbar, jajaran Forkopimda, serta wartawan parlemen.

Peserta jalan sehat memulai perjalanan dari halaman Kantor DPRD Sumbar di Jalan Khatib Sulaiman. Rute kemudian melewati Jalan S. Parman dan kawasan SMAN 1 Belanti sebelum kembali menuju Jalan Khatib Sulaiman dan mencapai garis finis.

Menurut Mahyeldi, kegiatan tersebut merupakan salah satu bentuk kolaborasi pemerintah daerah dan DPRD dalam meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menjaga kesehatan melalui aktivitas fisik dan pemeriksaan kesehatan.

Kegiatan bersama masyarakat juga diharapkan dapat membentuk kebiasaan hidup sehat sekaligus mempererat interaksi sosial.

"Kami berharap kegiatan ini dapat menjadi momentum bagi masyarakat untuk lebih aktif, sekaligus membuka ruang pertemuan dan komunikasi yang lebih dekat antarwarga," ujarnya.

Mahyeldi menilai peningkatan kesadaran terhadap kesehatan membutuhkan keterlibatan berbagai pihak. Karena itu, Pemprov dan DPRD Sumbar turut menggandeng tenaga kesehatan untuk menyediakan layanan pemeriksaan bagi masyarakat.

Ketua DPRD Sumatera Barat, Muhidi, mengatakan Aksi Sehat Bersama Parlemen tidak hanya mengajak masyarakat berolahraga, tetapi juga memberikan kesempatan kepada peserta untuk memeriksa kondisi kesehatannya melalui layanan Cek Kesehatan Gratis.

"Peserta tidak hanya diajak beraktivitas secara fisik, tetapi juga diberikan kesempatan untuk mengetahui kondisi kesehatannya melalui layanan yang kami siapkan dalam kegiatan ini," kata Muhidi. **(h/len)**



SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

KLIPING BERITA

KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
Haluan	KAMIS, 1 OKTOBER 2026	2

DPRD Sumbar Soroti Percepatan Anggaran

PADANG, HALUAN — Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumatera Barat, pada Selasa (29/9) kemarin, menjadi momentum penting bagi arah kebijakan anggaran daerah. Rapat dipimpin Ketua DPRD Sumbar Muhidi, didampingi Wakil Ketua DPRD Sumbar Evi Yandri Rajo Budiman dan Nanda Satria.

Rapat paripurna tersebut dihadiri langsung Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi, Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat, para kepala OPD di lingkungan Pemprov Sumbar, unsur Forkopimda, anggota DPRD Sumbar, serta tamu undangan lainnya. Kehadiran para pemangku kepentingan itu menandai kuatnya koordinasi dalam pembahasan kebijakan daerah.

Ada tiga agenda besar yang dibahas. Pertama, pengambilan keputusan terhadap Ranperda Perubahan APBD Sumatera Barat Tahun 2026. Kedua, penyampaian jawaban Gubernur atas pandangan umum fraksi terhadap Ranperda APBD Sumbar Tahun Anggaran 2027. Ketiga, penetapan Ranperda usul prakarsa perubahan Perda Nomor 6 Tahun 2017 tentang tata cara penyusunan Properperda.

Muhidi menegaskan pembahasan Perubahan APBD 2026 berlangsung di tengah tekanan fiskal. Ia menyebut terdapat defisit murni sekitar Rp204 miliar akibat penurunan target pendapatan serta tambahan belanja, terutama untuk penanganan dampak bencana.

"DPRD Sumbar bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) kemudian melakukan penyeimbangan kembali konstruksi anggaran melalui optimalisasi pendapatan serta rasionalisasi belanja. Prinsip yang ditekankan adalah efisiensi, efektivitas, dan penggunaan anggaran yang tepat sasaran," jelasnya.

Hasilnya, postur Perubahan APBD Sumbar 2026 memuat pendapatan daerah sebesar sekitar Rp6,76 triliun, belanja daerah sekitar Rp6,95 triliun, penerimaan pembiayaan sekitar Rp284,67 miliar, dan pengeluaran pembiayaan Rp92 miliar. Angka tersebut menjadi bagian penting dalam arah kebijakan keuangan Sumatera Barat hingga akhir 2026.

Muhidi juga menekankan pentingnya percepatan proses setelah persetujuan bersama. Pemerintah Daerah diminta segera menyampaikan Ranperda Perubahan APBD 2026 kepada Menteri Dalam Negeri untuk dievaluasi agar pelaksanaan program dan anggaran dapat segera direalisasikan.

Sementara itu, Gubernur Sumbar Mahyeldi dalam penjelasannya menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan anggota DPRD yang telah mengikuti seluruh tahapan pembahasan hingga tercapainya kesepakatan bersama terhadap Perubahan APBD 2026.

"Keterbatasan fiskal tidak boleh membuat pemerintah bekerja sekadar rutinitas. Pelaksanaan pembangunan harus dilakukan secara detail dengan melihat data dan angka, sekaligus memastikan pelayanan dasar masyarakat tetap menjadi perhatian utama," katanya.

Dalam postur Perubahan APBD Sumbar 2026, total APBD mencapai lebih dari Rp7,04 triliun. Pendapatan daerah ditargetkan sekitar Rp6,76 triliun, termasuk PAD lebih dari Rp3,35 triliun dan pendapatan transfer sekitar Rp3,29 triliun. Sementara belanja daerah dialokasikan lebih dari Rp6,95 triliun.

Sorotan berikutnya mengarah ke APBD Sumbar 2027. Dalam jawaban atas pandangan umum delapan fraksi DPRD Sumbar, Mahyeldi menyebut tahun anggaran 2027 sebagai tantangan fiskal yang membutuhkan perhitungan lebih hati-hati. Pemerintah Provinsi Sumbar juga menyiapkan berbagai strategi untuk memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Salah satu perhatian adalah optimalisasi penerimaan pajak dan pembaruan basis data PAD. Pemerintah Provinsi Sumbar menyatakan akan meningkatkan pengelolaan data kendaraan bermotor, alat berat, bahan bakar kendaraan bermotor, serta objek pajak lainnya untuk memperkuat sumber penda-



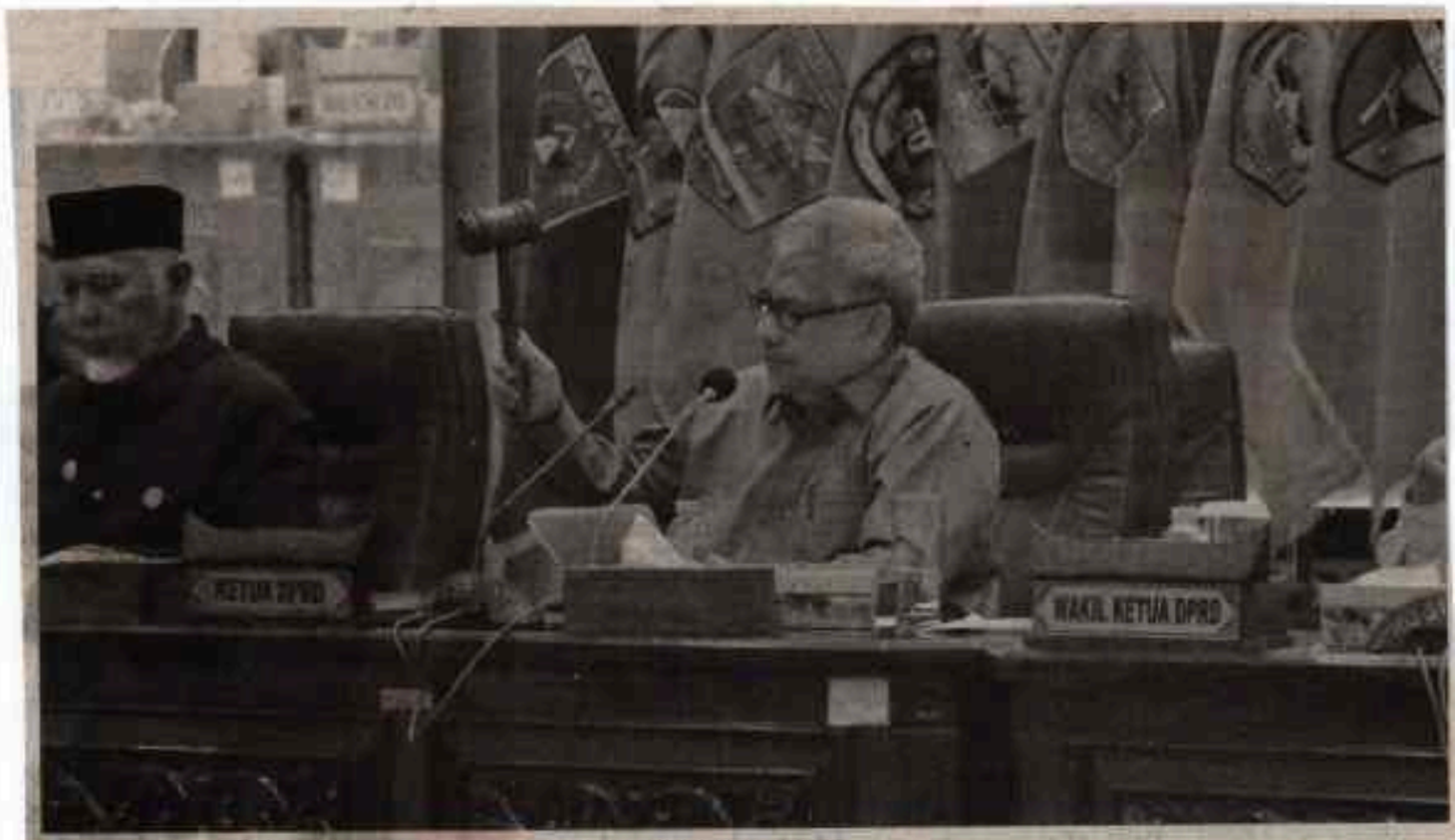
AMAN

patan daerah.

Di sisi belanja, Pemprov Sumbar menyampaikan komitmen mengendalikan belanja pegawai serta mengarahkan anggaran lebih kuat kepada pelayanan publik dan pembangunan. Kebijakan yang disiapkan antara lain pembatasan penerimaan ASN dari daerah lain serta efisiensi sejumlah belanja penunjang.

Pascabencana juga menjadi perhatian besar dalam RAPBD Sumbar 2027. Pemerintah Provinsi Sumbar menyebut kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana 2025 mencapai sekitar Rp21,449 triliun, dengan sebagian kebutuhan belum terakomodasi dalam rencana aksi yang ada. Karena itu, penanganan dampak bencana menjadi salah satu isu penting dalam pembahasan anggaran.

Rapat paripurna ditutup dengan penegasan bahwa pembahasan APBD bukan sekadar soal angka, tetapi berkaitan langsung dengan pelayanan masyarakat, pembangunan, pemulihan pascabencana, penguatan ekonomi dan arah pembangunan Sumatera Barat. DPRD Sumbar bersama Pemprov Sumbar selanjutnya akan melanjutkan pembahasan RAPBD 2027 sesuai tahapan yang telah ditetapkan. **(h/len)**



RAPAT Paripurna DPRD Provinsi Sumatera Barat, Selasa (29/9) kemarin. IST



KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
Haluan	KAMIS, 1 OKTOBER 2026	4



Menjadi Media Inspiratif bagi Masyarakat

SELAMAT HUT ke-78 *Harian Haluan*. Usia yang telah menginjak 78 tahun adalah sebuah pencapaian luar biasa yang menandakan kematangan, ketangguhan, serta dedikasi *Harian Haluan* dalam memberikan kontribusi berarti bagi masyarakat, khususnya dalam hal pemberitaan yang akurat dan bermakna.

Semoga Haluan semakin profesional, terpercaya dan terus menjadi media yang edukatif serta inspiratif bagi masyarakat Sumatera Barat. Terus berkarya dan menjadi mitra pembangunan Sumatera Barat.

Drs. H. Muhidi, MM
Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

KLIPING BERITA

KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
Padang Ekspres	KAMIS 1 OKTOBER 2026	5

APBD Sumbar Tertekan, Belanja Digenjot

Perubahan APBD Sumbar 2026 akhirnya diketok. Namun, di balik persetujuan itu tersimpan persoalan fiskal yang tak ringan: pendapatan tertekan, belanja membesar, sementara kebutuhan penanganan bencana ikut mengerek beban anggaran.

KETUA DPRD Sumbar Muhidi menyampaikan, Ranperda Perubahan APBD 2026 sebelumnya menghadapi defisit murni sekitar Rp204 miliar. Kondisi itu terjadi karena target pendapatan turun di saat kebutuhan belanja daerah meningkat cukup besar, terutama untuk menangani dampak bencana.

DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) kemudian membongkar kembali konstruksi anggaran. Target pendapatan dioptimalkan, sementara belanja dirasionalisasi melalui efisiensi dan penajaman program.

Hasilnya, pendapatan daerah ditetapkan Rp6,764 triliun, sedangkan belanja mencapai Rp 6,057 triliun. Penerimaan pembiayaan mencapai Rp 284,868 miliar, dengan pengeluaran pembiayaan Rp 92 miliar.

Gubernur Sumbar Mahyeldi menyebut total postur Perubahan APBD 2026 mencapai sekitar Rp 7,04 triliun. Dari angka itu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditargetkan Rp 3,35 triliun, pendapatan transfer Rp 3,29 triliun, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp 113,19 miliar.

Di sisi belanja, pemerintah mengalokasikan Rp 4,81 triliun untuk belanja operasi, Rp 1,13 triliun belanja transfer, Rp 991,51 miliar belanja modal, serta Rp 19,20 miliar belanja tidak terduga. Pembiayaan daerah netto berada di angka Rp 192,66 miliar.

Mahyeldi mengakui ruang fiskal Sumbar sedang terbatas. Karena itu, pemerintah daerah dituntut tidak lagi belanja dengan pola rutin. "Tidak bisa lagi bekerja standar *business as usual*," kata Mahyeldi dalam rapat paripurna.

Menurutnya, setiap program harus dibaca secara detail, baik dari sisi makro maupun mikro, dengan bertumpu pada data dan angka. Pengendalian inflasi melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) juga diminta berjalan optimal.

Perubahan APBD 2026, kata Mahyeldi, harus tetap menopang pelayanan dasar, pelayanan wajib non-dasar, urusan pilihan, serta pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Tetapi, ketuk palu belum berarti uang langsung bergerak. Muhidi meminta Pemprov Sumbar segera mengirimkan Perda Perubahan APBD 2026 beserta rancangan penjabaran perubahan APBD kepada Kementerian Dalam Negeri untuk dievaluasi. Setelah hasil evaluasi diterima, pemerintah masih harus melakukan penyempurnaan sebelum anggaran dapat ditetapkan dan dilaksanakan.

Pemprov juga harus menyusun Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) SKPD beserta rencana anggaran kas. Muhidi menegaskan percepatan tahapan tersebut penting agar program dan kegiatan yang telah disesuaikan tidak kehilangan waktu pelaksanaan pada penghujung 2026.

Selain APBD-P 2026, rapat paripurna juga membahas pembahasan APBD 2027. Gubernur Mahyeldi memberikan jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD yang sebelumnya disampaikan pada 11 September 2026.

DPRD juga menetapkan usul perubahan Perda Nomor 6 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyusunan Program Pembentukan Perda (Propemperda) sebagai prakarsa DPRD. Namun pembahasannya ditunda hingga terbit Permendagri pengganti Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018.

Untuk Perubahan APBD 2026, persetujuan DPRD dituangkan dalam Keputusan DPRD Nomor 10/SD/2026. Kini tantangannya bukan lagi soal persetujuan anggaran. Yang diuji adalah seberapa cepat anggaran itu berubah menjadi pekerjaan nyata—terutama di tengah tekanan fiskal dan kebutuhan penanganan bencana yang menjadi salah satu pemicu perubahan anggaran. (*)





KETUA DPRD Sumbar Muhidi memimpin rapat paripurna penetapan Ranperda Perubahan APBD 2026 di gedung DPRD Sumbar, Selasa (29/9).



KETUA DPRD Sumbar Muhidi bersama Gubernur Sumbar Mahyeldi, Wakil Ketua DPRD, Sekprov Sumbar usai rapat paripurna penetapan Ranperda Perubahan APBD 2026 di gedung DPRD Sumbar, Selasa (29/9).



GUBERNUR Sumbar Mahyeldi meneken berita acara penetapan Ranperda Perubahan APBD 2026 di gedung DPRD Sumbar, Selasa (29/9).

KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
Rakyat Sumbar	JUMAT, 2 OKTOBER 2026	9

Sumbar Terus Tumbuh dan Tanggguh

DPRD Sumbar Gelar Paripurna Hari Jadi Sumbar ke 81

Padang, Rakyat Sumbar — DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) menggelar rapat paripurna dalam rangka memperingati peryaan Hari Jadi Sumatera Barat ke-81, di ruang sidang utama DPRD Sumbar, Kamis, (1/10).

"Sumatera Barat masih terus tumbuh berkembang dan terus tanggguh, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan tetap melestarikan budaya dan jati diri berdasarkan filosofi ABS-SBK," kata Ketua DPRD Sumbar Muhidi, saat memimpin sidang paripurna.

Ia menyampaikan, Sumatera Barat terus tumbuh dalam berbagai indikator pembangunan. Sejumlah indikator pembangunan menunjukkan capaian yang patut disyukuri.

"Dalam pembangunan manusia, nilai Indeks Pembangunan Manusia Sumatera Barat mencapai 77,27 yang menempati peringkat keenam tertinggi secara nasional," ucapnya.

Ia menambahkan, angka kemiskinan per Maret 2026 berada pada 5,27 persen dan Indeks Gini Ratio berada pada angka 0,286. Meskipun demikian, tingkat kemiskinan dan ketimpangan pendapatan antar penduduk.

"Pertumbuhan ekonomi masih harus kita dorong. Pemerataan pembangunan antar daerah masih perlu dipetakan. Keterbatasan dalam kemandirian dan kapasitas fiskal juga harus kita hadapi dengan kebijakan yang tepat. Oleh karena itu, capaian ini adalah pijakan untuk melangkah lebih jauh," sebutnya.

Ia mengakhiri, peringatan Hari Jadi Sumbar ke-81 ini mengajak untuk merangkul masa lalu. Sumatera Barat hari ini merupakan warisan dan generasi yang lebih dahulu bekerja, para pendiri dan pahlawan bangsa.

"Merekalah pemimpin yang meninggalkan pemikiran dan kebijaksanaan. Ada ulama, pendidik, pejuang, sastrawan, intelektual, ninik mamak, bundo kanduang, dan masyarakat umum yang ikut membangun perjalanan daerah ini," pungkasnya.

Pada rapat paripurna itu, juga dilakukan penyerahan SK Award kepada sejumlah anggota DPRD periode sebelumnya DPRD tahun sidang 2025/2026 sebagai apresiasi atas dedikasi, integritas, dan kinerja terbaik Anggota DPRD Sumbar.

Selain itu, juga ada mata sumber Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Bima Arya Sugiarto secara langsung di ruang sidang, dan Tan Sri Dato' Seri Panglima Dr. Ridzuan Yatim Presiden Senat (Negara Malaysia) 2020-2025, secara online. Turut hadir dato besar Palestina dan Belarusia. (*)



KLIPING BERITA



KETUA DPRD Sumbar Muhidi wakil ketua Evi Yandri Rajo Budiman, M. Igra Chissa Putra, Nanda Satria, Gubernur Mahyeldi, Wakil Gubernur Vasko Ruseymi dan Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Bima Arya Sugiarto berfoto bersama saat rapat paripurna Hari Jadi Sumbar ke 81 di ruang sidang utama Kamis, (1/10).



KETUA DPRD Sumbar Muhidi memotong kue Hari Jadi Sumbar ke 81 saat rapat paripurna di ruang sidang utama Kamis, (1/10).



Wakil Ketua DPRD Sumbar Evi Yandri Rajo Budiman menyerahkan kue Hari Jadi Sumbar ke 81 kepada Gubernur Sumbar Mahyeldi, saat rapat paripurna di ruang sidang utama Kamis, (1/10).



KETUA DPRD Sumbar Muhidi menyerahkan kue Hari Jadi Sumbar ke 81 kepada Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Bima Arya Sugiarto, saat rapat paripurna di ruang sidang utama Kamis, (1/10).



WAKIL Ketua DPRD Sumbar Nanda Satria, menyerahkan penghargaan BK Award kepada anggota dewan yang berprestasi saat rapat paripurna Hari Jadi Sumbar ke 81, di ruang sidang utama Kamis, (1/10).



SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

KLIPING BERITA

KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
Padang Ekspres	JUMAT 2 OKTOBER 2026	5

Sumbar Tumbuh, Kesejah teraan jadi Ujian

Delapan puluh satu tahun Sumbar bukan sekadar alasan untuk merayakan perjalanan sejarah. Justru di usia itu, pemerintah daerah dihadapkan pada pertanyaan yang lebih keras: sejauh mana pertumbuhan benar-benar mengubah kehidupan masyarakat?

PERTANYAAN tersebut mengemuka dalam Rapat Paripurna DPRD Sumbar memperingati Hari Jadi ke-81 Sumbar, Kamis (1/10). Hadir Wakil Menteri Dalam Negeri RI Bima Arya Sugiarto, Gubernur Sumbar Mahyeldi, serta Tan Sri Dato' Seri Panglima Dr Rais Yatim, Presiden Senat Malaysia periode 2020–2023, melalui Zoom Meeting.

Ketua DPRD Sumbar Muhidi mengatakan, usia 81 tahun harus menjadi momentum untuk membaca ulang perjalanan daerah: apa yang sudah dicapai, apa yang belum selesai, dan warisan seperti apa yang akan ditinggalkan kepada generasi berikutnya.

Di atas kertas, sejumlah indikator memang menunjukkan kemajuan. IPM Sumbar mencapai 77,27, kemiskinan pada Maret 2026 berada di 5,27 persen, sementara Indeks Gini tercatat 0,285.

Ekonomi Sumbar juga tumbuh 4,54 persen secara tahunan pada Triwulan II 2026, sebagaimana disampaikan Gubernur Mahyeldi.

Tetapi pertumbuhan ekonomi tidak otomatis berarti seluruh masyarakat hidup lebih sejahtera. Tantangan berikutnya adalah memastikan pertumbuhan membuka lebih banyak pekerjaan, meningkatkan pendapatan riil dan mempersempit kesenjangan antarkelompok maupun wilayah.

Di sinilah Hari Jadi ke-81 menjadi relevan: angka harus berujung pada manfaat nyata.

Muhidi menyoroti generasi muda dan UMKM sebagai bagian penting dari pekerjaan tersebut. Persoalannya bukan sekadar mendorong masyarakat berusaha, tetapi bagaimana keterampilan, teknologi, pembiayaan, digitalisasi, akses pasar dan pendampingan mampu membuat UMKM benar-benar naik kelas.

Sumbar juga tidak bisa membangun dengan melupakan ancaman bencana. Gempa bumi 2009, pandemi Covid-19 serta bencana hidrometeorologi menjadi pengingat bahwa pembangunan di daerah rawan bencana membutuhkan perhitungan risiko sejak awal.

Gempa, tsunami, letusan gunung api, longsor dan banjir bukan sekadar daftar ancaman. Semuanya dapat menghapus capaian pembangunan dalam waktu singkat jika mitigasi dan kesiapsiagaan tidak menjadi bagian dari kebijakan pembangunan.

Karena itu, konsep "Sumbar Tumbuh, Sumbar Tangguh" yang disampaikan Mahyeldi bukan hanya slogan Hari Jadi. Sumbar Tumbuh berarti kualitas hidup meningkat, ekonomi menguat dan generasi muda memperoleh ruang lebih besar. Sumbar Tangguh berarti daerah mampu menghadapi guncangan, bangkit ketika krisis datang dan menjaga kekuatan sosial serta budayanya.

Di tengah tekanan teknologi dan globalisasi, identitas Minangkabau juga menjadi bagian yang tidak boleh terlepas. Nilai Adat Basandi Syarak Syara' Basandi Kitabullah disebut Muhidi sebagai fondasi jati diri yang harus tetap hidup di tengah perubahan zaman.

Pada akhirnya, pekerjaan besar Sumbar setelah usia 81 tahun bukan memperbanyak seremoni, melainkan mempersempit jarak antara capaian di atas kertas dan kenyataan di lapangan.

Pemerintah, DPRD, dunia usaha, perguruan tinggi, masyarakat dan perantau memiliki kepentingan yang sama: memastikan Sumbar bukan hanya tumbuh dalam statistik, tetapi juga tangguh ketika menghadapi krisis dan semakin nyata menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakatnya. (*)



KLIPING BERITA



KETUA DPRD Sumbar Muhidi disaksikan Wamendagri Bima Arya Sugiarto memotong kue HUT ke-81 Sumbar di Gedung DPRD Sumbar.



WAKIL Ketua DPRD Sumbar Evi Yandri Rajo Budiman memotong kue HUT ke-81 Sumbar.



WAKIL Ketua DPRD Sumbar Nanda Satria menyerahkan piagam penghargaan kepada anggota DPRD Sumbar berdedikasi.



WAKIL Ketua DPRD Sumbar Muhammad Iqra Chissa Putra menyerahkan piagam penghargaan kepada anggota DPRD Sumbar berdedikasi.



SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

KLIPING BERITA

KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
KORAN PADANG	JUMAT, 2 OKTOBER 2026	3

REFLEKSI PERINGATAN HARI JADI KE-81 SUMBAR

Pertumbuhan Harus Berdampak dan Terasa di Masyarakat

PADANG, KP - Pertumbuhan ekonomi dan deretan indikator makro pembangunan tidak boleh sekadar 'rancak' di atas kertas statistik. Usia ke-81 tahun Provinsi Sumatera Barat harus menjadi titik balik untuk memastikan seluruh hasil pembangunan benar-benar dirasakan manfaatnya secara nyata oleh seluruh lapisan masyarakat.

Pesan tersebut menggema dalam Rapat Paripurna Istimewa DPRD Provinsi Sumatera Barat dalam rangka Peringatan Hari Jadi ke-81 Sumbar, di ruang utama DPRD Sumbar, Kamis (1/10). Rapat dipimpin Ketua DPRD Sumbar Muhidi dan dihadiri Wakil Menteri Dalam Negeri RI Bima Arya Sugiarto, Gubernur Sumbar Mahyeldi, unsur forkopimda, bupati dan wali kota se-Sumbar, serta mantan Presiden Senat Malaysia Tan Sri Dato' Seri Panglima Dr. Rais Yatim yang hadir secara daring.

Muhidi menegaskan, rentetan peristiwa besar mulai dari gempa bumi 2009 hingga bencana hidrometeorologi mengajarkan bahwa pembangunan di Ranah Minang tidak cukup hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, melainkan harus membentuk masyarakat yang tangguh menghadapi krisis.

"Sumbar harus terus tumbuh, tetapi pertumbuhan itu wajib dibarengi dengan ketangguhan. Ukuran keberhasilan pembangunan adalah ketika warga mendapat akses pendidikan bermutu, kesempatan kerja terbuka, UMKM naik kelas, serta pelayanan publik kian mudah dan merata. Kemajuan teknologi juga harus berjalan seiring dengan penguatan falsafah 'Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah'," ujar Muhidi.

Pada kesempatan yang sama, Gubernur Mahyeldi memaparkan bahwa hingga pertengahan 2026, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sumbar berada pada angka 77,27, tingkat kemiskinan berhasil ditekan hingga 5,27 persen, dan pertumbuhan ekonomi Triwulan II 2026 tumbuh 4,54 persen secara tahunan.

Lewat tema besar Hari Jadi ke-81 'Sumbar Tumbuh, Sumbar Tangguh', Mahyeldi mengajak seluruh pemangku kepentingan memperkuat mitigasi bencana sejak perencanaan infrastruktur serta memicu kemandirian ekonomi daerah.

"Sumbar Tumbuh adalah komitmen membuka ruang kesejahteraan dan kesempatan bagi generasi muda. Sedangkan Sumbar Tangguh adalah fondasi keberanian kita untuk bangkit dari setiap badai musibah," tutur Mahyeldi. **(fai)**



KETUA DPRD Sumbar Muhidi bersama Wamendagri Bima Arya Sugiarto, Gubernur Sumbar Mahyeldi, Wakil Gubernur, dan pimpinan DPRD berdiri khidmat mengenakan pakaian adat Minangkabau, saat Rapat Paripurna Hari Jadi ke-81 Provinsi Sumbar di DPRD Sumbar, Padang, Kamis (1/10).



KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
KORAN PADANG	JUMAT, 2 OKTOBER 2026	12

DPRD dan Pemprov Sumbar Sepakati Perubahan APBD 2026

DPRD Provinsi Sumatera Barat bersama Pemerintah Provinsi Sumbar menyepakati Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 dalam rapat paripurna DPRD Sumbar, Selasa (29/9). Kesepakatan ini menjadi pijakan Pemprov Sumbar untuk menyesuaikan arah kebijakan keuangan di tengah tekanan fiskal dan kebutuhan pemulihan pascabencana.

Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Sumbar Muhidi, didampingi Wakil Ketua Evi Yandri Rajo Budiman dan Nanda Satria. Turut hadir Gubernur Sumbar Mahyeldi, Sekdaprov, Sekretaris DPRD Maifrizon, unsur Forkopimda, serta jajaran pimpinan OPD.

Dalam Perubahan APBD 2026, pendapatan daerah ditetapkan sebesar Rp6,76 triliun, yang ditopang PAD sebesar Rp3,35 triliun dan dana transfer Rp3,29 triliun. Sementara belanja daerah berada di angka Rp6,95 triliun, dengan penerimaan pembiayaan Rp284,67 miliar dan pengeluaran pembiayaan Rp92 miliar. Total postur APBD Perubahan 2026 menembus angka Rp7,04 triliun.

Ketua DPRD Sumbar Muhidi menegaskan, rasionalisasi belanja dan optimalisasi pendapatan terpaksa ditempuh untuk menjaga keseimbangan anggaran akibat lonjakan kebutuhan belanja pascabencana.

"Pembahasan dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal daerah dan kebutuhan masyarakat. Setelah persetujuan bersama ini, dokumen Ranperda harus segera dikirim ke Mendagri untuk dievaluasi agar program pelayanan publik dapat berjalan tepat waktu," katanya.

Di sisi lain, Gubernur Mahyeldi menyampaikan porsi APBD 2027 juga mulai dirancang lebih terukur. Pemerintah daerah mencatat kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana mencapai Rp21,449 triliun yang akan dicicil secara bertahap.

"Kondisi fiskal terbatas menuntut kita bekerja lebih detail. Untuk tahun depan, Pemprov Sumbar memperketat pemutakhiran data objek pajak daerah serta membatasi mutasi penerimaan ASN dari luar daerah guna mengendalikan belanja pegawai," ujar Mahyeldi. *





KETUA *DPRD Sumbar Muhidi memimpin rapat paripurna kesepakatan Ranperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 di Gedung DPRD Sumbar.*



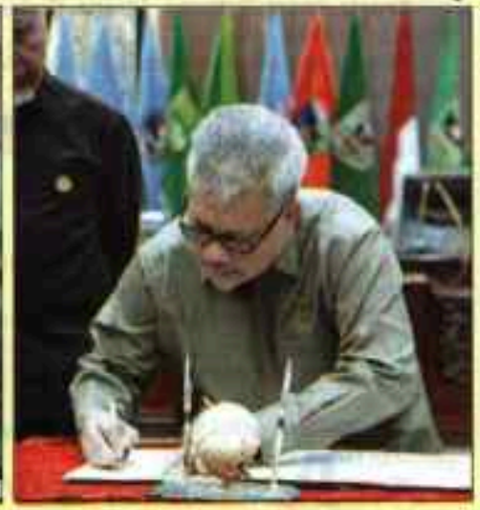
KETUA *DPRD Sumbar Muhidi berfoto bersama Gubernur Sumbar Mahyeldi, Sekdaprov Arry Yuswandy, dan Wakil Ketua DPRD Sumbar Evi Yandri dan Nanda Satria, usai rapat paripurna penyepakatan Perubahan APBD 2026.*



SEKRETARIS *DPRD Sumbar Maifrizon membacakan keputusan persetujuan bersama Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.*



GUBERNUR *Sumbar Mahyeldi menandatangani Nota Kesepakatan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.*



KETUA *DPRD Sumbar Muhidi menandatangani Nota Kesepakatan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.*



WAKIL *Ketua DPRD Sumbar Nanda Satria menandatangani Nota Kesepakatan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.*



KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
KORAN PADANG	JUMAT, 2 OKTOBER 2026	12

SEMARAKKAN HUT KE-81 SUMBAR

DPRD Sumbar Gelar Aksi Sehat Parlemen



WAKIL *Ketua DPRD Sumbar Nanda Satria (kanan) mendampingi penyerahan hadiah utama satu unit sepeda motor Fazzio Neo sumbangan Wali Kota Padang Fadly Amran kepada warga yang beruntung dalam Aksi Sehat Bersama Parlemen di DPRD Sumbar, Rabu (30/9).*

PADANG, KP - Menyemarakkan Peringatan Hari Jadi ke-81 Provinsi Sumatera Barat, DPRD Sumbar menggelar Aksi Sehat Bersama Parlemen yang dipusatkan di gedung DPRD Sumbar, Rabu (30/9).

Kegiatan yang diikuti ratusan warga itu diisi dengan jalan santai, pemeriksaan kesehatan gratis, hingga donor darah. Suasana kian semarak saat pengundian doorprize utama satu unit sepeda motor Fazzio Neo sumbangan dari Wali Kota Padang Fadly Amran.

Wako Fadly Amran menyampaikan, Aksi Sehat Bersama Parlemen menjadi wahana positif dalam memasyarakatkan olahraga sekaligus mempererat silaturahmi warga dengan wakil rakyat.

Sementara, Wakil Ketua DPRD Sumbar Nanda Satria mengapresiasi kontribusi dan kepedulian Wako Fadly Amran yang menyumbangkan hadiah utama satu unit motor.

"Terima kasih kepada Bapak Fadly Amran atas dukungan utama satu unit sepeda motor. Ini menyuntik semangat dan kebahagiaan bagi warga. Momentum HUT ke-81 Sumbar ini makin merekatkan sinergi parlemen, pemko, dan masyarakat," katanya. **(fai)**



KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
KORAN PADANG	JUMAT, 2 OKTOBER 2026	

DANA TKD DIDUGA TAK SESUAI PERUNTUKAN

Nofrizon Ingatkan Dampak Hukum

PADANG, KP - Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sumatera Barat Nofrizon, menyoroti penggunaan miliaran dana Transfer ke Daerah (TKD) yang dinilainya tidak sesuai peruntukan penanganan bencana.



NOFRIZON

Nofrizon mengapresiasi pemerintah pusat yang telah mengembalikan dana TKD untuk kebutuhan penanganan bencana di Sumatera. Untuk Sumatera Barat tercatat dana TKD yang dikembalikan mencapai Rp534 miliar. Namun, berdasarkan analisanya bersama anggota Banggar yang lainnya, sebagian dari penggunaan dana TKD tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Surat Edaran (SE) Mendagri Nomor 900.1.3/1084/SJ tanggal 2 Maret 2026.

"Setelah kami analisa, salah satunya dengan anggota Banggar Bapak Zulkenedi Said, diketahui sebagian dari penggunaan TKD ini tidak sesuai dengan ketentuan SE Mendagri Nomor 900.1.3/1084/SJ tanggal 2 Maret 2026," ujar Nofrizon yang juga Sekretaris Komisi III DPRD Sumbar tersebut, Selasa (29/9).

Menurutnya, berdasarkan SE Mendagri Nomor 900.1.3/1084/SJ, bagi daerah yang terdampak bencana, penggunaan TKD difokuskan untuk penanganan tahapan prabencana, tanggap darurat, hingga rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.

Namun, kata Nofrizon, dalam dokumen laporan yang diterima DPRD, ditemukan penggunaan dana TKD di tingkat organisasi perangkat daerah (OPD) banyak yang tidak sesuai ketentuan. Hal ini antara lain ditemukan di Biro Umum, Biro Administrasi Pimpinan (Adpim), Dinas Pendidikan dan beberapa OPD lainnya.

Pada Biro Umum, dari pagu anggaran Rp2,6 miliar, pengalokasian sejumlah kegiatan tidak berkaitan langsung dengan penanganan bencana. Di antaranya untuk renovasi rumah dinas Sekda dialokasikan Rp400 juta, renovasi ruang kerja Sekda Rp400 juta, perbaikan Istana Gubernur Rp300 juta, perbaikan atap dan plafon auditorium Rp400 juta, perbaikan drainase rumah dinas gubernur Rp200 juta, serta perbaikan drainase Kantor Gubernur Rp154 juta.

Selanjutnya, dianggarkan juga untuk pembuatan ruang rapat dan command center Kantor Gubernur sebesar Rp200 juta, pemeliharaan taman Istana Gubernur Rp50 juta, perbaikan taman Kantor Gubernur Rp50 juta, pemeliharaan peralatan dan mesin Rp156 juta, pembelian peralatan penunjang kerja pimpinan seperti TV dan kebutuhan zoom serta perbaikan sejumlah kerusakan pompa air kantor sebesar Rp151 juta. Kemudian ada pula untuk pembelian sound system auditorium Istana Gubernur sebesar Rp200 juta.

Sementara itu, di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), dari pagu anggaran Rp4,8 miliar, terdapat alokasi Rp800 juta untuk kegiatan pelatihan kebencanaan bagi kepala daerah.

Di Biro Adpim, dari pagu anggaran Rp2,2 miliar, Rp650 juta digunakan untuk fasilitasi komunikasi pimpinan, Rp1 miliar untuk fasilitasi kunjungan tamu KDH dan WKDH, serta Rp400 juta untuk penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD. Selain itu, terdapat alokasi dana Rp200 juta untuk pemeliharaan kendaraan dinas operasional.

"Beberapa peruntukan dana TKD, terutama di Biro Umum dan Biro Adpim ini rawan menyalahi aturan. Agar ini tidak bertentangan dengan hukum, dalam rapat TAPD dengan Banggar yang dilaksanakan baru-baru ini kami telah meminta agar ada transparansi dari TAPD untuk membuka pergeseran anggaran tersebut, namun sayangnya kami tidak mendapatkan informasi yang kami minta," tegasnya.

Karena itu, Nofrizon menegaskan dirinya tidak ingin terlibat apabila penggunaan dana TKD tersebut di kemudian hari menimbulkan persoalan hukum.

"Apabila nanti terjadi pelanggaran yang ber



KORAN	HALAMAN

dampak terhadap hukum, dalam rapat paripurna yang terhormat sekarang ini, yang mana dihadiri oleh APH, Kejaksaan dan kepolisian kami tegas menyampaikan tidak akan ikut sebagai saksi. Tolong catat ini Pak Sekwan, apabila tersangkut dengan masalah hukum persoalan TKD ini, kami tidak ikut membahasnya," tegasnya.

Lebih lanjut, Nofrizon mengingatkan Gubernur Mahyeldi agar berhati-hati dalam penggunaan dana TKD. Menurutnya, apabila dana tersebut tidak digunakan sesuai ketentuan, penggunaannya berpotensi menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Diharapkan kita semua hati-hati, karena ini rawan temuan BPK," katanya.

Menanggapi interupsi Nofrizon, Ketua DPRD Sumbar Muhidi yang memimpin jalannya rapat mengatakan, masukan tersebut merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPRD terhadap penggunaan dana TKD.

"Terima kasih masukannya Pak Nofrizon. Ini adalah kritikan konstruktif yang berkaitan dengan perbaikan sekaligus pengawasan dana TKD tersebut," tukas Muhidi. **(fal)**



SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

KLIPING BERITA

KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
POSMETRO PADANG	JUMAT, 2 OKTOBER 2026	8

Rapat Paripurna Istimewa Hari Jadi Sumbar ke-81

Gaungkan Semangat Membangun Sumbar yang Tumbuh dan Tangguh

PADANG, METRO

DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) menggelar rapat paripurna istimewa dalam rangka memperingati Hari Jadi Provinsi Sumbar ke-81 yang mengusung tema 'Sumbar Tumbuh, Sumbar Tangguh', Kamis (1/10), di Ruang Sidang Utama Kantor DPRD Sumbar.

Rapat paripurna tersebut menjadi momentum untuk merefleksikan perjalanan panjang Provinsi Sumbar sekaligus melihat berbagai capaian pembangunan dan tantangan yang masih harus dihadapi daerah ke depan.

Rapat paripurna tersebut menghadirkan sejumlah tokoh penting. Di antaranya Wakil Menteri Dalam Negeri RI Dr. H. Bima Arya Sugiarto, Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi, serta Tan Sri Dato' Seri Panglima Dr. Rais Yatim, Presiden Senat Malaysia periode 2020–2023 yang hadir melalui Zoom Meeting.

Selain itu, hadir pula unsur Forkopimda Sumbar, anggota DPR dan DPD RI daerah pemilihan Sumatera Barat, pimpinan dan anggota DPRD Sumbar, Sekda Sumbar, bupati dan wali kota se-Sumatera Barat, pimpinan instansi vertikal, BUMN dan BUMD, perguruan tinggi, organisasi keagamaan serta tokoh masyarakat.

Ketua DPRD Sumbar Muhidi dalam pidatonya menegaskan bahwa usia 81 tahun bukan sekadar angka. Hari Jadi Sumbar menjadi ruang untuk melihat kembali perjalanan daerah, capaian pembangunan, tantangan yang dihadapi, sekaligus memikirkan warisan yang akan diberikan kepada generasi berikutnya.

Muhidi juga menyoroti ketangguhan masyarakat Sumatera Barat dalam melewati berbagai ujian. Gempa bumi 2009, pandemi Covid-19, hingga bencana hidrometeorologi menjadi bagian dari perjalanan yang disebut sebagai pelajaran penting dalam membangun Sumbar yang semakin siap menghadapi perubahan.

"Dari sisi pembangunan manusia, pidato pimpinan DPRD mencatat IPM Sumatera Barat mencapai 77,27. Sementara tingkat kemiskinan pada Maret 2026 berada di angka 5,27 persen dan Indeks Gini tercatat 0,285. Data tersebut menjadi bagian dari gambaran pembangunan Sumbar pada momentum Hari Jadi ke-81," tegas Muhidi.

Selain itu, Muhidi juga menekankan pentingnya memperluas keterampilan, membuka ruang kreativitas dan inovasi, serta mendorong UMKM naik kelas melalui pengetahuan, teknologi, pembiayaan, akses pasar, digitalisasi dan pendampingan.

"Tak kalah penting, identitas budaya Minangkabau turut menjadi perhatian. Nilai Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah disebut sebagai bagian dari jati diri yang harus tetap hidup di tengah perkembangan teknologi, globalisasi dan perubahan zaman," ungkap Muhidi.

Menurut Muhidi, pertumbuhan ekonomi harus berjalan beriringan dengan ketangguhan menghadapi bencana. Risiko gempa, tsunami, letusan gunung api, longsor dan banjir menjadi alasan pentingnya mitigasi, kesiapsiagaan serta pembangunan yang memperhitungkan risiko bencana sejak awal.

"Kolaborasi antara pemerintah, DPRD, dunia usaha, perguruan tinggi, masyarakat dan perantau sangatlah penting. Semangat bergerak bersama dinilai menjadi bagian penting dalam membangun Sumbar yang tumbuh sekaligus tangguh," tutur dia.

Sementara itu, Gubernur Sumbar, Mahyeldi dalam sambutannya menyampaikan bahwa peringatan Hari Jadi ke-81 bukan hanya seremoni tahunan. Momentum tersebut menjadi kesempatan untuk mengenang perjalanan sejarah, menghargai jasa pendahulu, mensyukuri capaian dan melakukan refleksi terhadap tantangan pembangunan yang masih harus dijawab.

"Pesan utama Hari Jadi Sumbar ke-81, yakni "Sumbar Tumbuh, Sumbar Tangguh." Sumbar Tumbuh dimaknai sebagai dorongan untuk meningkatkan kualitas hidup, memperkuat ekonomi dan membuka kesempatan bagi generasi muda. Sedangkan Sumbar Tangguh berarti kemampuan menghadapi tantangan, bangkit dari kesulitan serta memperkuat fondasi sosial, budaya dan pemerintahan," ungkap Mahyeldi. (*)



KLIPING BERITA



Ketua DPRD Sumbar, Muhidi menyerahkan piagam penghargaan BK Award kepada anggota DPRD Sumbar.



Wakil Ketua DPRD Sumbar Evi Yandri menyerahkan piagam penghargaan BK Award kepada anggota DPRD Sumbar.



WAKIL KETUA DPRD Sumbar Iqra Chissa menyerahkan piagam penghargaan BK Award kepada anggota DPRD Sumbar.



WAKIL KETUA DPRD Sumbar Nanda Satria menyerahkan piagam penghargaan BK Award kepada anggota DPRD Sumbar.



FOTO BERSAMA usai penyerahan piagam penghargaan BK Award kepada anggota DPRD Sumbar.



HARI JADI SUMBAR—Ketua DPRD Sumbar, Muhidi didampingi Wakil Ketua Evi Yandri, Iqra Chissa, Nanda Satria bersama Wamendagri Bima Arya Sugiarto, Gubernur Mahyeldi dan Wagub Vasko Ruseimy dalam rapat paripurna istimera Hari Jadi Provinsi Sumbar ke-81.



SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

KLIPING BERITA

KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
Haluan	JUMAT, 2 OKTOBER 2026	16

DPRD dan Pemprov Sumbar Sepakati Perubahan APBD 2026 Rp7,04 triliun

PADANG, HALUAN- DPRD dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menyepakati Ranperda tentang Perubahan APBD Tahun 2026 menjadi peraturan daerah (Perda) melalui rapat paripurna yang berlangsung, Selasa (29/9). Total Perubahan APBD Tahun 2026 yang disepakati adalah mencapai Rp7,04 triliun

Ketua DPRD Sumbar, Muhidi saat memimpin paripurna tersebut menyampaikan, pembahasan Perubahan APBD 2026 dilakukan untuk menata kembali konstruksi anggaran daerah, menyusul adanya tekanan terhadap kemampuan fiskal daerah.

Dikatakannya, dalam pembahasan awal, Ranperda Perubahan APBD 2026 mengha dapi defisit murni sekitar Rp204 miliar. Kondisi tersebut dipengaruhi penurunan target pendaparan serta bertambah nya kebutuhan belanja daerah, terutama untuk penanganan dampak bencana.

Karena itu, DPRD bersama pemerintah daerah melakukan penyesuaian melalui opti malisasi pendapatan serta rasionalisasi belanja dengan mengedepankan efisiensi, efektivitas dan ketepatan sasaran penggunaan anggaran.

"Fokus pada pembahasan yang dilakukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah adalah membalancekan kembali konstruksi anggaran antara pendapatan dan belanja daerah, baik melalui optimalisasi target pendaparan maupun rasionalisasi belanja melalui efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran yang tepat sasaran," ujar Muhidi.

Dari pembahasan tersebut, Badan Anggaran DPRD bersama TAPD berhasil menyeimbangkan kembali konstruksi anggaran yang akan dituangkan dalam Perubahan APBD 2026.



Ketua DPRD Sumbar, Muhidi saat memimpin jalannya rapat paripurna



Ketua DPRD Sumbar menanda tangani nota persetujuan bersama Ranperda Perubahan APBD 2026 untuk kemudian disepakati menjadi Perda

Seluruh fraksi DPRD Sumbar juga telah menyampaikan pendapar akhir terhadap Ranperda Perubahan APBD 2026. Fraksi-fraksi menyatakan dapat menyetujui Ranperda tersebut untuk dilanjutkan ke tahap pengambilan keputusan dalam rapat paripurna.

Dalam rapat tersebut DPRD kemudian menyetujui hasil pembahasan Badan Anggaran bersama TAPD. Persetujuan itu dituangkan dalam Keputusan DPRD Sumbar Nomor 16/SB/2026 tentang Persetujuan DPRD terhadap Ranperda Perubahan APBD Sumbar Tahun 2026 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Muhidi meminta Pemprov Sumbar segera menyampaikan Perda yang telah disepakati tersebut kepada Menteri Dalam Negeri untuk menjalani proses evaluasi. Langkah ini penting agar program dan kegiatan



Berfoto bersama

yang telah diakomodasi dalam Perubahan APBD 2026 dapat segera dilaksanakan.

"Semakin cepat evaluasi terhadap Ranperda Perubahan APBD, tentu akan semakin cepat pula pelaksanaan kegiatan dan anggaran yang terdapat dalam Perubahan APBD Tahun 2026," kata Muhidi.

Dengan disepakatinya Perubahan APBD 2026, DPRD dan Pemprov Sumbar selanjutnya menunggu proses evaluasi sebelum perubahan anggaran tersebut ditetapkan dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Persetujuan bersama tersebut menjadi hasil pembahasan Badan Anggaran DPRD Sumbar bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), setelah sebelumnya DPRD dan Pemprov Sumbar menyepakati Perubahan KUA-PPAS 2026.

Sementara itu, Gubernur Sumbar Mahyeldi menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan anggota DPRD Sumbar yang telah melakukan pembahasan Perubahan APBD 2026 hingga tercapainya persetujuan bersama.

Dikatakannya, dalam Perubahan APBD 2026, total postur APBD Sumbar mencapai lebih dari Rp7,04 triliun. Pendapatan daerah ditargetkan sekitar Rp6,76 triliun, yang terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) lebih dari Rp3,35 triliun serta pendapatan transfer sekitar Rp3,29 triliun. Adapun belanja daerah dialokasikan lebih dari Rp6,95 triliun.

Memasuki penyusunan APBD 2027, Pemprov Sumbar menyiapkan sejumlah strategi untuk memperkuat kapasitas fiskal, terutama melalui optimalisasi PAD. Pemerintah daerah akan melakukan pembaruan dan penguatan basis data objek pajak guna meningkatkan akurasi serta potensi penerimaan.

Optimalisasi tersebut mencakup pengelolaan data kendaraan bermotor, alat berat, bahan bakar kendaraan bermotor dan sejumlah objek pajak lainnya.

Penguatan PAD dinilai penting karena kapasitas pendapatan daerah akan menentukan ruang fiskal pemerintah dalam membiayai pelayanan publik dan pembangunan.

Di sisi belanja, Pemprov Sumbar juga menyiapkan langkah pengendalian agar anggaran lebih banyak diarahkan kepada program yang memberikan dampak langsung bagi masyarakat. Pengendalian belanja pegawai dan efisiensi sejumlah belanja penunjang menjadi bagian dari strategi tersebut. (*)



SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

KLIPING BERITA

KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
SINGGALANG	Jumat, 2 Oktober 2026 (19 Rabiul Akhir 1448 H)	8

DPRD Sumbar Gelar Rapat Paripurna Hari Jadi Sumatera Barat ke-81

PADANG - SINGGALANG

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbar menggelar Rapat Paripurna istimewa dalam rangka memperingati Hari Jadi Sumatera Barat ke-81, Kamis (1/10) di gedung dewan setempat.

Peringatan tahun ini menjadi momentum penting untuk melihat capaian pembangunan sekaligus menatap tantangan masa depan dengan mengusung tema utama "Sumbar Tumbuh, Sumbar Tangguh".

Rapat paripurna ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Sumbar, Muhidi didampingi para Wakil Ketua DPRD Sumbar, yaitu Evi Yandri Rajo Budiman, Muhammad Iqra Chissa Putra dan Nanda Satria.

Gubernur Mahyeldi Ansharullah dan wakil gubernur Vasko Ruseimy beserta tamu undangan tampak kompak mengenakan pakaian adat Minangkabau.

Sidang istimewa tersebut menghadirkan sejumlah tokoh penting lintas negara. Hadir secara langsung Wakil Menteri Dalam Negeri RI Bima Arya Sugiarto.

Istimewanya, sidang kali ini juga diisi orasi secara virtual melalui Zoom Meeting oleh Tan Sri Dato' Seri Panglima Dr. Rais Yatim, Presiden Senat Malaysia periode 2020-2023 yang merupakan tokoh politik, hukum, dan kebudayaan senior Malaysia berdarah Minangkabau.

Selain itu, deretan kursi undangan diisi oleh Duta Besar Republik Palestina dan Duta Besar Republik Belarus untuk Indonesia, unsur Forkopimda Sumbar, anggota DPR dan DPD RI daerah pemilihan Sumbar, bupati dan wali kota se-Sumatera Barat, Sekda Sumbar, Kepala OPD, pimpinan instansi vertikal, BUMN, BUMD, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, serta tokoh masyarakat adat, cadiak pandai, dan alim ulama.

Dalam forum tersebut, Wamendagri Bima Arya Sugiarto mengapresiasi langkah progresif Pemerintah Sumbar yang berhasil memasukkan dimensi kebencanaan secara resmi ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2025-2029.

"Langkah strategis memasukkan dimensi kebencanaan ke dalam RPJPD ini layak menjadi contoh nasional bagi daerah-daerah lain di Indonesia," ujarnya.

Bima Arya juga menambahkan bahwa mitigasi harus menjadi gerakan bersama. "Kita harus mengajak warga, komunitas, akademisi, dan peneliti duduk bersama memetakan risiko guna menguatkan kesiapsiagaan serta ketahanan daerah. Ketangguhan Sumbar terbukti dari kesiapan sistemisnya, bukan sekadar respons reaktif pascabencana," tuturnya tegas.

Sementara itu, Ketua DPRD Sumbar, Muhidi, dalam pidatonya menegaskan visi komprehensif mengenai masa depan Ranah Minang yang harus bertumpu pada pembangunan kualitas manusia, bukan sekadar sumber daya fisik semata. Ia mengingatkan bahwa usia 81 tahun bukan sekadar angka, melainkan ruang merenungkan warisan masa depan untuk generasi mendatang.

"Ukuran kemajuan sebuah daerah tidak hanya ditentukan luas wilayah maupun kekayaan alam, tetapi juga kualitas manusia dan gagasan yang mampu dilahirkan. Ketangguhan masyarakat kita telah teruji melewati berbagai ujian berat, mulai dari gempa bumi 2009, pandemi Covid-19, hingga bencana hidrometeorologi. Ini semua pelajaran penting untuk membangun Sumbar yang siap menghadapi perubahan," kata Muhidi.

Muhidi membuka catatan penting dan memaparkan target capaian nyata dari visi pembangunan manusia. Berdasarkan data per Maret 2026, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sumbar berada di angka 77,27—tertinggi keenam secara nasional—serta tingkat kemiskinan berhasil ditekan hingga 5,27 persen, dan Indeks Gini tercatat sebesar 0,285.

Ia mengatakan data ini tidak boleh membuat berpuas diri, melainkan menjadi pemacu untuk menyelesaikan persoalan riil di tingkat nagari, seperti pemerataan infrastruktur, penguatan ekonomi perdesaan, dan penuntasan kantong kemiskinan.

Selain juga juga harus fokus pada pendidikan, perluasan keterampilan generasi muda, serta mendorong UMKM naik kelas melalui sentuhan teknologi, pembiayaan, akses pasar, digitalisasi, dan pendampingan.

"Semua ini harus berjalan beriringan dengan penguatan identitas budaya Minangkabau berdasarkan filosofi Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah (ABS-SBK)," lanjut Muhidi.

Gubernur Sumbar, Mahyeldi, mengamini pentingnya poin-poin tersebut. Ia menambahkan bahwa perayaan hari jadi ke-81 bukan hanya seremoni tahunan, melainkan kesempatan menghargai jasa pendahulu dan melakukan refleksi kolektif. Ia memaparkan bahwa pertumbuhan ekonomi Sumbar pada Triwulan II 2026 tumbuh 4,34 persen secara tahunan (year-on-year).

"Capaian indikator makro ini harus diikuti oleh peningkatan kesempatan kerja, pendapatan riil, dan kesejahteraan masyarakat secara lebih merata. Pesan utama hari jadi ini adalah 'Sumbar Tumbuh, Sumbar Tangguh'. Sumbar Tumbuh bermakna dorongan meningkatkan kualitas hidup dan ekonomi, sedangkan Sumbar Tangguh berarti kemampuan bangkit dari kesulitan serta memperkuat fondasi sosial, budaya, dan pemerintahan," tutur Mahyeldi (*)

KLIPING BERITA







SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

KLIPING BERITA

KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
Padang Ekspres	SABTU 3 OKTOBER 2026	8

81 Tahun Sumbar, Ketergan tungan Fiskal Disorot

Padang, Padek—Usia Sumbar genap 81 tahun. Namun, bertambahnya usia provinsi tidak otomatis membuat persoalan pembangunan ikut menua. Ancaman bencana terus berulang, infrastruktur masih menyisakan pekerjaan besar, sementara ruang fiskal daerah semakin terbatas.

Momentum HUT ke-81 Provinsi Sumbar pun didorong menjadi titik evaluasi. Pemerintah daerah diminta tidak sekadar menjalankan program rutin, tetapi berani mengubah cara kerja, memperkuat lobi ke pemerintah pusat, dan mencari sumber pembiayaan baru.

Anggota DPRD Sumbar Dapil III, anggota Komisi III sekaligus Fraksi PPP, Nofrizon, menilai persoalan paling mendesak adalah karakter Sumbar sebagai daerah rawan bencana. "Setiap tahun, bahkan dua sampai tiga kali setahun, pasti ada bencana," kata Nofrizon.

Menurutnya, kondisi tersebut seharusnya menjadi dasar utama dalam menentukan prioritas pembangunan. Sumbar membutuhkan anggaran besar untuk membangun infrastruktur yang mampu menghadapi bencana, sementara kemampuan APBD belum memadai.

Karena itu, komunikasi dengan pemerintah pusat harus lebih agresif. Demikian pula dengan sektor swasta dan perusahaan besar yang memiliki kapasitas pembiayaan pembangunan.

Nofrizon juga mengingatkan agar keterbatasan anggaran tidak membuat kebijakan pembangunan kehilangan arah. Dukungan Transfer ke Daerah (TKD), menurutnya, perlu benar-benar diprioritaskan untuk kebutuhan strategis daerah, termasuk penanganan dan mitigasi bencana. "Kalau memang itu yang sangat kita butuhkan, apalagi Sumatera Barat daerah rawan bencana, sangat membutuhkan anggaran pusat," ujarnya.

Persoalan lain, kata Nofrizon, adalah belum solidnya seluruh kekuatan daerah dalam memperjuangkan kepentingan Sumbar. Perbedaan kepentingan politik dinilainya tidak boleh terus menjadi penghalang. Ia meminta DPRD dan Pemprov Sumbar meninggalkan sekat kepentingan kelompok. "Jangan kita tinggalkan kepentingan kelompok dan politik masing-masing. Kita buka baju partai, bersatu dan bahu-membahu memperjuangkan Sumatera Barat," katanya.

Senada, Anggota DPRD Sumbar Dapil VIII, Ketua Komisi IV sekaligus Fraksi Demokrat, Doni Haniva Yandra, menilai pekerjaan rumah Sumbar setelah 81 tahun justru semakin kompleks. Ia mengakui berbagai capaian pembangunan patut diapresiasi. Namun, sektor infrastruktur masih menjadi tantangan besar, terutama karena hampir seluruh wilayah Sumbar memiliki risiko bencana.

"Sumatera Barat itu dari banyak sisi merupakan daerah yang rawan bencana," ujar Doni. Banjir bandang, lereng gunung api, gempa dan potensi tsunami bukan ancaman yang bisa diperlakukan sebagai kejadian luar biasa yang datang sesekali. Karena itu, menurut Doni, konsep "Sumbar tangguh" harus diterjemahkan ke dalam kebijakan konkret.

Bukan hanya masyarakat yang harus tangguh, tetapi juga infrastruktur. Jalan, jembatan, fasilitas publik hingga desain pembangunan harus mampu menghadapi karakter geografis Sumbar.

"Masalahnya, kebutuhan pembangunan tersebut berhadapan dengan ruang fiskal yang semakin sempit. Kebijakan efisiensi pemerintah pusat turut membatasi kemampuan belanja daerah. TKD 2026 juga mengalami penyesuaian terkait bencana.

Doni mendorong Sumbar tidak terus bergantung pada APBD dan TKD. Skema pembiayaan pembangunan harus diperluas melalui kolaborasi dengan pemerintah pusat dan sektor swasta. "Pembangunan tidak mungkin selesai dalam satu malam, satu minggu, satu tahun atau satu proyek," katanya.

Pada usia 81 tahun, tantangan Sumbar bukan lagi sekadar bagaimana membangun lebih banyak, tetapi bagaimana membangun dengan strategi yang tepat: memperkuat manusia, menyiapkan infrastruktur tahan bencana, memperbesar sumber pembiayaan, dan menyatukan kepentingan politik untuk satu agenda—mengejar ketertinggalan Sumbar. (r)



DOK PRIBADI

NOFRIZON

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

KLIPING BERITA

KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
Padang Ekspres	SABTU 3 OKTOBER 2026	8

DPRD Desak Pertamina Buka Hasil Uji Pertalite

Padang, Padek—Polemik Pertalite yang diduga bercampur material asing hingga memicu kendaraan warga bermasalah belum selesai. Ketua Komisi IV DPRD Sumbar, Doni Haravia Yandra, meminta Pertamina tidak berhenti pada pemeriksaan awal, tetapi segera memastikan apa yang sebenarnya terjadi dan mencegah persoalan serupa meluas.

Desakan itu muncul setelah keluhan konsumen bermunculan di sejumlah daerah di Sumatera Barat. Warga melaporkan kendaraan mengalami gangguan setelah mengisi Pertalite, termasuk dari sejumlah tangki kendaraan ditemukan material berwarna abu-abu yang oleh warga disebut menyerupai semen.

"Pertama, kita apresiasi Pertamina yang responsif. Tapi yang kedua, kita minta segera Pertamina memastikan apa masalahnya, sehingga ini tidak menjadi persoalan berlarut dan masyarakat tidak khawatir mengisi BBM," kata Doni.

Menurutnya, Pertalite merupakan BBM bersubsidi yang digunakan masyarakat luas, termasuk untuk kebutuhan yang menjadi penopang aktivitas ekonomi sehari-hari. Karenanya, persoalan kualitas BBM tidak boleh dianggap sebagai gangguan kecil.

Doni menilai Pertamina merespons lebih cepat setelah muncul, mulai dari pengawasan di titik penerimaan, penyimpanan hingga penyaluran BBM. DPRD Sumbar, katanya, juga akan terus berkoordinasi dengan Pertamina jika menerima laporan baru dari masyarakat. "Kalau ada kejadian di lapangan, segera dilaporkan supaya tim dalam bisa diambil. Kita sendiri sekarang belum tahu apakah kejadiannya hanya ini saja atau terjadi juga di tempat lain," ujarnya.

Data terbaru menampilkan persoalan ini memang belum bisa dianggap selesai. Ombudsman RI Perwakilan Sumbar mencatat 106 pengaduan masyarakat terkait kualitas Pertalite yang diterima Pertamina dari sejumlah daerah. Keluhan tidak hanya datang dari Padang dan Bukittinggi, tetapi juga Pesisir Selatan dan Dharmasraya. Ombudsman juga menerima laporan langsung warga yang membawa sampel BBM yang disebut mengandung material menyerupai semen.

Di sisi lain, Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut menyatakan telah mengambil sampel Pertalite dari enam SPBU di Kota Padang dan Kabupaten Agam. Tiga SPBU berada di Padang, yakni SPBU 14-251.519 Sawahan, 14-252.501 Rimbo dan 14-252.502 Ind. Tiga lainnya berada di Agam, yakni SPBU 14-364.504, 13.261.073, dan 14-261-532. (Nasrimen-fd). (r)



SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

KLIPING BERITA

KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
Haluan	SABTU, 3 OKTOBER 2026	9

HARI JADI SUMATERA BARAT KE-81

Momentum Memperkuat Langkah Menjawab Tantangan Pembangunan

PADANG, HALUAN — DPRD Sumbar menggelar rapat paripurna Peringatan Hari Jadi Sumatera Barat (Sumbar) ke-81, Kamis (1/10). Peringatan Hari Jadi Sumatera Barat ini menjadi momentum untuk melihat kembali capaian pembangunan sekaligus memperkuat langkah menghadapi berbagai tantangan ke depan.

Rapat paripurna tersebut dihadiri Wakil Menteri Dalam Negeri RI Dr. H. Bima Arya Sugiarto, Gubernur Sumbar Mahyeldi, Wakil Gubernur Sumbar, **Vasko Ruseimy** serta Tan Sri Dato' Seri Panglima Dr. Rais Yatim, Presiden Senat Malaysia periode 2020–2023, yang hadir melalui *zoom meeting*.

Turut hadir unsur Forkopimda Sumbar, anggota DPR dan DPD RI daerah pemilihan Sumbar, pimpinan dan anggota DPRD Sumbar, Sekda Sumbar, bupati dan wali kota se-Sumbar, pimpinan instansi vertikal, BUMN dan BUMD, perguruan tinggi, organisasi keagamaan serta tokoh masyarakat.

Ketua DPRD Sumbar Muhidi saat memimpin jalannya rapat mengatakan, usia 81 tahun bukan sekadar angka. Tapi lebih dari itu, Peringatan Hari Jadi Sumbar menjadi ruang untuk melihat perjalanan daerah, capaian pembangunan dan berbagai tantangan yang dihadapi, sekaligus memikirkan warisan yang akan diberikan kepada generasi mendatang.

Menurutnya, masyarakat Sumbar telah menunjukkan ketangguhan dalam melewati berbagai ujian, mulai dari gempa bumi 2009, pandemi Covid-19 hingga bencana hidrometeorologi. Berbagai peristiwa tersebut menjadi pelajaran penting untuk membangun Sumbar yang semakin siap menghadapi perubahan dan risiko bencana.

Dari sisi pembangunan manusia, Muhidi menyebut Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sumbar mencapai 77,27. Sementara tingkat kemiskinan pada Maret 2026 berada di angka 5,27 persen dan Indeks Gini tercatat 0,285.

Perhatian juga diarahkan pada pendidikan, generasi muda dan UMKM. Muhidi menekankan pentingnya memperluas keterampilan, membuka ruang kreativitas dan inovasi, serta mendorong UMKM naik kelas melalui penguatan pengetahuan, teknologi, pembiayaan, akses pasar, digitalisasi dan pendampingan.

Menurut Muhidi, identitas budaya Minangkabau juga harus tetap menjadi fondasi pembangunan. Nilai Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah (ABS-SBK) harus terus hidup di tengah perkembangan teknologi, globalisasi dan perubahan zaman.

Ia juga menegaskan, pertumbuhan ekonomi harus berjalan beriringan dengan ketangguhan menghadapi bencana. Risiko gempa, tsunami, letusan gunung api, longsor dan banjir perlu diantisipasi melalui penguatan mitigasi dan kesiapsiagaan, termasuk memastikan pembangunan sejak awal memperhitungkan risiko bencana.

Karena itu, kolaborasi antara pemerintah, DPRD, dunia usaha, perguruan tinggi, masyarakat dan perantau dinilai penting dalam pembangunan Sumbar. Semangat bergerak bersama menjadi bagian dari upaya mewujudkan Sumbar yang tumbuh sekaligus tangguh.

Sementara itu, Gubernur Sumbar Mahyeldi mengatakan, peringatan Hari Jadi ke-81 bukan sekadar seremoni tahunan. Momentum tersebut menjadi kesempatan untuk mengenang perjalanan sejarah, menghargai jasa para pendahulu, mensyukuri capaian dan merefleksikan berbagai tantangan pembangunan yang masih harus dijawab.

Mahyeldi memaparkan sejumlah indikator pembangunan Sumbar. IPM 2025 mencapai 77,27, tingkat kemiskinan Maret 2026 sebesar 5,27 persen, sementara ekonomi Sumbar pada Triwulan II 2026 tumbuh 4,54 persen secara tahunan.

Ia menegaskan, capaian tersebut harus diikuti dengan peningkatan kesempatan kerja, pendapatan riil dan kesejahteraan masyarakat yang lebih merata.

Mahyeldi kemudian menyampaikan pesan utama Hari Jadi Sumbar ke-81, yakni "Sumbar Tumbuh, Sumbar Tangguh." Sumbar Tumbuh dimaknai sebagai dorongan untuk meningkatkan kualitas hidup, memperkuat ekonomi dan membuka kesempatan bagi generasi muda.

Sedangkan Sumbar Tangguh berarti kemampuan menghadapi tantangan, bangkit dari kesulitan serta memperkuat fondasi sosial, budaya dan pemerintahan.

Pesan Hari Jadi Sumbar ke-81 akhirnya bermuara pada agenda pembangunan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Pemerintah, DPRD, dunia usaha, perguruan tinggi, masyarakat dan perantau didorong terus memperkuat kolaborasi agar Sumatera Barat semakin maju, sejahtera, berbudaya dan tangguh menghadapi masa depan. (*)

NEWS!



Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, Gubernur Sumbar Mahyeldi, Wakil Gubernur Vasko Ruseimy dan unsur pimpinan DPRD dalam rapat paripurna Peringatan Hari Jadi Sumbar ke-81



Pemotongan kue peringatan Hari Jadi Sumbar ke-81 oleh Ketua DPRD Sumbar, Muhidi



Ikatan Keluarga Istri Anggota Dewan saat meri paripurna Peringatan Hari Jadi Sumatera Barat ke-8



Forkopimda, tokoh masyarakat dan tamu undangan lainnya saat menghadiri rapat paripurna di DPRD



Anggota DPRD Sumbar saat kegiatan paripurna



SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
KLIPING BERITA

KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
KORAN PADANG	SABTU, 3 OKTOBER 2026	6

Hari Jadi Sumbar ke-81, Muhidi dan Mahyeldi Bicara Masa Depan: "Sumbar Tumbuh, Sumbar Tangguh"

SUMATERA Barat genap berusia 81 tahun. Momentum itu tidak sekadar menjadi perayaan perjalanan sejarah, tetapi juga ruang untuk melihat kembali capaian pembangunan sekaligus membaca tantangan yang akan dihadapi daerah ke depan.

Pesan itu mengemuka dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumatera Barat memperingati Hari Jadi Sumbar ke-81, Kamis (1/10). Pertemuan ini menyatukan unsur legislatif, eksekutif, pemerintah pusat, tokoh nasional, hingga berbagai elemen masyarakat.

Hadir langsung Wakil Menteri Dalam Negeri RI Bima Arya Sugiarto dan Gubernur Sumbar Mahyeldi. Sementara Presiden Senat Malaysia periode 2020–2023 Tan Sri Dato' Seri Panglima Rais Yatim menyapa via Zoom Meeting. Rapat juga dihadiri Wakil Gubernur Vasko Ruseimy, jajaran Forkopimda, anggota DPR dan DPD RI dapil Sumbar, pimpinan dan anggota DPRD Sumbar, Sekda Sumbar, para bupati dan wali kota, pimpinan instansi vertikal, BUMN/BUMD, akademisi, organisasi keagamaan, serta tokoh masyarakat.

Di hadapan peserta rapat, Ketua DPRD Sumbar Muhidi menegaskan bahwa usia 81 tahun harus dimaknai lebih dari sekadar pertambahan usia daerah. Peringatan ini harus menjadi momen mengevaluasi arah pembangunan agar benar-benar menjawab kebutuhan warga.

"Kita tidak hanya mengenang perjalanan masa lalu, tetapi juga memikirkan apa yang akan kita wariskan kepada generasi berikutnya," kata Muhidi.

Ia menyebut Ranah Minang sudah kenyang ditempa ujian. Dari gempa bumi 2009, pandemi Covid-19, hingga bencana hidrometeorologi. Pengalaman itu membentuk daya tahan masyarakat, sekaligus memberi pelajaran penting bahwa pembangunan tak boleh cuma mengejar angka pertumbuhan, tapi wajib membangun ketangguhan warga saat krisis melanda.

Soal pembangunan manusia, indikator Sumbar terbilang positif. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berada di angka 77,27, tingkat kemiskinan per Maret 2026 tercatat 5,27 persen, dan Indeks Gini 0,285. Namun, Muhidi mengingatkan angka-angka tersebut harus terus diterjemahkan menjadi peningkatan kualitas hidup yang benar-benar dirasakan masyarakat.

Penguatan generasi muda dan UMKM pun jadi sorotan. Anak muda perlu dibekali keterampilan, kreativitas, dan inovasi agar mampu beradaptasi. Di sisi lain, UMKM tak boleh dibiarkan jalan di tempat atau sekadar bertahan.

"UMKM harus kita dorong agar semakin kuat, bukan hanya bertahan. Mereka harus memiliki akses terhadap teknologi, pembiayaan dan pasar sehingga mampu berkembang dan menciptakan lapangan kerja," ujarnya.

Di tengah arus globalisasi dan gempuran teknologi, Muhidi turut menyoroti pentingnya menjaga akar budaya Minangkabau. Tatanan Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah (ABS-SBK) harus tetap menjadi pemandu kehidupan. Kemajuan zaman dan modernisasi mesti berjalan seiring dengan penguatan karakter anak muda.

Selain ekonomi dan budaya, ketangguhan bencana menjadi pilar utama. Mengingat posisi geografis Sumbar yang rawan gempa, tsunami, erupsi gunung api, hingga banjir dan longsor, mitigasi bencana tidak boleh lagi bersifat reaktif atau baru sibuk setelah musibah terjadi. Pembangunan infrastruktur, tata ruang, pemukiman, hingga fasilitas publik wajib memperhitungkan risiko sejak awal.

Senada dengan DPRD, Gubernur Sumbar Mahyeldi memandang usia 81 tahun sebagai momen berbenah. Bagi Mahyeldi, peringatan ini adalah ajang menghargai jasa para pendahulu, mensyukuri capaian, sekaligus memberesi pekerjaan rumah yang tersisa.

Mahyeldi memaparkan data indikator daerah di mana IPM 2025 berada pada angka 77,27, kemiskinan per Maret 2026 sebesar 5,27 persen, serta pertumbuhan ekonomi Triwulan II 2026 mencapai 4,54 persen secara tahunan (year on year/yoy). Namun, ia menekankan pertumbuhan ini harus berbanding lurus dengan pembukaan lapangan kerja dan pemerataan pendapatan.

Sebab itu, Mahyeldi mengusung pesan utama 'Sumbar Tumbuh, Sumbar Tangguh'. Sumbar Tumbuh berfokus pada peningkatan kualitas hidup, penguatan ekonomi, dan pembukaan peluang bagi generasi muda. Sedangkan Sumbar Tangguh mencerminkan ketahanan daerah dan masyarakat dalam bangkit dari krisis.

Baik Muhidi maupun Mahyeldi sepakat bahwa masa depan Sumbar membutuhkan kerja 'keroyokan'. Pemerintah dan DPRD tak bisa jalan sendiri tanpa keterlibatan dunia usaha, perguruan tinggi, tokoh adat, ulama, hingga perantau.

Sinergi ini menjadi kunci menghadapi tantangan kompleks, mulai dari mutu SDM, lapangan kerja, kelestarian lingkungan, pelestarian adat, hingga kesiapsiagaan bencana. Dari ruang paripurna DPRD, semangat 81 tahun ini digelorakan sebagai pijakan menuju Sumatera Barat yang maju, sejahtera, berbudaya, dan tangguh. *





WAMENDAGRI *Bima Arya Sugiarto, Gubernur Mahyeldi, Ketua DPRD Muhidi, Wakil Gubernur Vasko Ruseimy, serta para Wakil Ketua DPRD Sumbar foto bersama di depan kue peringatan Hari Jadi Sumbar ke-81.*



WAKIL *Ketua DPRD Sumbar M Iqra gan kue peringatan Hari Jadi ke-81 nur Sumbar Vasko Ruseimy.*

prestasi
suki tah
yang lolc

Rincia
terdiri ata
ma, sepul
bat Pelaks
enam Peja
Saat
kumbuh, k
gaskan ba
men penj
vasi kerja
rAKHLAK,
upaya unt
dukung r
kan meni
hadap inc
ujar Rida
Prosi
depende

Ba
Bal



KETUA *DPRD Sumbar Muhidi memotong kue peringatan Hari Jadi ke-81 Provinsi Sumatera Barat.*



WAKIL *Ketua DPRD Sumbar M Iqra Chissa Putra memotong kue peringatan Hari Jadi ke-81 Provinsi Sumatera Barat.*



WAKIL *Ketua DPRD Sumbar Nanda Satria memotong kue peringatan Hari Jadi ke-81 Provinsi Sumatera Barat.*



WAKIL *Ketua D memotong kue p Provinsi Sumate*



WAMENDAGRI *Bima Arya Sugiarto, Gubernur Mahyeldi, Wagub Vasko Ruseimy, pimpinan DPRD Sumbar, dan unsur Forkopimda berfoto bersama mengabadikan momen peringatan Hari Jadi Provinsi Sumatera Barat ke-81.*



PARA *tokoh masyarakat dan penerima penghargaan berfoto b Sumbar, Gubernur Mahyeldi, Wagub Vasko Ruseimy, dan Wamen usai Rapat Paripurna Hari Jadi Sumbar ke-81.*

TIM Baz
penerim

PA
paten P
kat Nas
Ternak
masyar
kerja sa
Focus G
Kolabo
tahlik p
Bu
melalu
Baznas
produk

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

KLIPING BERITA

KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
KORAN PADANG	SENIN, 5 OKTOBER 2026	12

Ketua DPRD Sumbar Ajak Masyarakat Bersama Dukung Pembangunan Melalui Pajak

KETUA DPRD Sumatera Barat, Muhidi, menghadiri kegiatan Gebyar Pajak yang diselenggarakan oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sumbar, Sabtu (3/10).

Dalam kesempatan tersebut, Muhidi mengajak seluruh elemen masyarakat untuk memaknai pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) bukan sekadar pemenuhan kewajiban atau menghindari sanksi, melainkan sebagai bentuk kontribusi nyata terhadap pembangunan dan pelayanan publik di Sumatera Barat.

"Atas nama pimpinan dan seluruh anggota DPRD, saya menyampaikan apresiasi kepada Bapenda dan seluruh pihak. Di tengah kebutuhan pembangunan yang terus berkembang, Sumatera Barat membutuhkan dukungan dari seluruh elemen masyarakat untuk memperkuat kemampuan keuangan daerah," ujar Muhidi.

Ia menegaskan, penerimaan dari sektor PKB merupakan bagian vital dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang hasilnya akan kembali ke masyarakat melalui perbaikan infrastruktur jalan, kelancaran mobilitas, serta distribusi ekonomi.

Guna meningkatkan partisipasi warga, Muhidi juga mendorong pemerintah daerah beserta mitra kerja seperti Kepolisian dan Jasa Raharja untuk terus mempermudah akses layanan. Inovasi seperti Samsat Keliling, layanan di pusat keramaian, hingga optimalisasi aplikasi digital dinilai penting agar masyarakat semakin mudah menunaikan kewajibannya.

"Semakin dekat dan mudah pelayanan, tentu akan semakin membantu masyarakat. Mari kita jadikan kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor sebagai kebiasaan baik yang tumbuh dari kesadaran demi memperkuat kemampuan Sumbar membiayai pembangunan," pungkasnya. *







KETUA *DPRD Sumbar Muhidi memberikan sambutan dalam puncak acara Gebyar Pajak Bapenda Sumbar yang bertepatan dengan momentum HUT ke-81 Provinsi Sumatera Barat.*



ANTUSIASME *warga dan undangan yang hadir menyaksikan rangkaian acara Gebyar Pajak Bapenda Sumbar di halaman Kantor Gubernur.*



MUHIDI *menegaskan pentingnya kolaborasi seluruh elemen dalam memperkuat kemampuan keuangan daerah melalui sektor pajak.*



GUBERNUR *Sumbar Mahyeldi memberikan sambutan dalam puncak acara Gebyar Pajak Bapenda Sumbar yang bertepatan dengan momentum HUT ke-81 Provinsi Sumatera Barat.*



KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
KORAN PADANG	SENIN, 5 OKTOBER 2026	12

MARAK KEKERASAN PEREMPUAN DAN ANAK

Mario Syahjohan Minta

Penegakan Hukum Tanpa Kompromi



MARIO SYAHJOHAN

PADANG, KP - Maraknya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di wilayah hukum Polres Solok Selatan mendapat perhatian serius dari Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat, Mario Syahjohan.

Putra daerah Solok Selatan ini menegaskan bahwa setiap kasus kekerasan, terutama kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak, harus ditangani secara profesional dan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).

"Kekerasan seksual merupakan tindak pidana serius. Karena itu, setiap kasus harus ditangani sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Jangan sampai persoalan seperti ini dianggap sebagai persoalan biasa yang cukup diselesaikan dengan perdamaian semata," tegas Mario, Jumat (2/10).

Ia mengingatkan agar upaya penyelesaian 'damai' atau pemberian imbalan di luar jalur hukum tidak dijadikan jalan pintas untuk menghentikan perkara, terlebih ketika korbannya adalah anak di bawah umur. Menurutnya, keselamatan, hak pemulihan, pendampingan psikologis, serta masa depan korban harus menjadi prioritas utama.

Ia juga menyoroti adanya kasus ancaman pembunuhan hingga penyerangan rumah yang melibatkan anak sebagai korban yang berujung pada penyelesaian damai. Mario menilai, keamanan dan rasa aman bagi anak tidak boleh dikompromikan demi alasan menjaga nama baik keluarga.

Guna mewujudkan Solok Selatan sebagai kabupaten ramah perempuan dan anak, politisi yang sudah dua periode duduk di DPRD Sumbar ini mengajak Pemkab Solok Selatan, aparat penegak hukum, tokoh masyarakat, dan seluruh elemen warga untuk memperkuat edukasi, pencegahan, serta keberanian melaporkan tindak kekerasan. **(fal)**



SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

KLIPING BERITA

KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
KORAN PADANG	SENIN, 5 OKTOBER 2026	2

Pemprov Sumbar Gelar Gebyar Pajak Bertabur Hadiah



GUBERNUR *Sumbar Mahyeldi Ansharullah bersama Ketua DPRD Sumbar Muhidi dan Kepala Bapenda Sumbar Al Amin foto bersama para penerima penghargaan usai penyerahan apresiasi wajib pajak pada Gebyar Pajak 2026 di halaman Kantor Gubernur Sumbar, Padang, Sabtu malam (3/10).*

PADANG, KP - Menyemarakkan peringatan Hari Jadi ke-81 Provinsi Sumatera Barat, Pemerintah Provinsi Sumbar menggelar Gebyar Pajak 2026 di halaman Kantor Gubernur Sumbar, Sabtu malam (3/10).

Gubernur Sumbar Mahyeldi menegaskan, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan salah satu urat nadi pembiayaan pembangunan daerah. Karena itu, Pemprov Sumbar terus menghadirkan terobosan layanan agar masyarakat kian mudah menunaikan kewajibannya.

"Berbagai inovasi terus kita hadirkan, mulai dari Samsat Nagari yang menjangkau kawasan pelosok dan perbatasan, Samsat Malam Minggu, layanan saat 'Car Free Day', hingga kios e-Samsat mandiri. Kemudahan ini kita siapkan agar warga makin taat membayar pajak," ujar Mahyeldi.

Ketua DPRD Sumbar Muhidi mengapresiasi acara tersebut. Menurutnya, Gebyar Pajak bukan sekadar ajang bagi-bagi hadiah, melainkan momentum penting membangun budaya dan kepatuhan hukum warga dalam mendukung kemampuan fiskal daerah.

Sementara, Kepala Bapenda Sumbar, Al Amin menjelaskan, Gebyar Pajak 2026 merupakan hasil kolaborasi Pemprov Sumbar bersama Kepolisian, PT Jasa Raharja, Bank Indonesia, dan Bank Nagari. Berbagai hadiah spektakuler dikucurkan, meliputi 3 paket umrah, 3 unit sepeda motor, 5 sepeda listrik, 9 gram emas, serta 81 helm.

"Seluruh fasilitas dan hadiah berasal dari dukungan mitra serta UPTD Samsat se-Sumbar tanpa menggunakan APBD. Selain itu, Bank Indonesia Perwakilan Sumbar juga menyediakan 3.000 paket makanan tradisional murah seharga Rp81 per paket," pungkas Al Amin. **(fai)**






GE AR PAJAK
SUM RA BARAT



SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

KLIPING BERITA

KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
Haluan	SELASA, 6 OKTOBER 2026	6

DPRD Sumbar Ajak Masyarakat Bersama Dukung Pembangunan Melalui Pajak

PADANG, HALUAN — Membayar pajak kendaraan bukan sekadar memenuhi kewajiban sebagai warga negara. Di balik pajak yang dibayarkan, ada kontribusi masyarakat yang ikut mendukung berbagai kebutuhan pembangunan dan pelayanan di Sumatera Barat.

Hal itu disampaikan Ketua DPRD Sumatera Barat, Muhidi, saat menghadiri kegiatan Gebyar Pajak Sumbar 2026 di halaman Kantor Gubernur, Sabtu (3/10/2026). Ia mengajak masyarakat melihat pembayaran pajak sebagai bagian dari kepedulian bersama terhadap kemajuan daerah.

"Atas nama pimpinan dan seluruh anggota DPRD, saya menyampaikan apresiasi kepada Badan Pendapatan Daerah dan seluruh pihak yang telah menyelenggarakan kegiatan ini," kata Muhidi.

Menurutnya, kegiatan seperti Gebyar Pajak memiliki arti penting untuk semakin mendekatkan masyarakat dengan informasi perpajakan sekaligus menumbuhkan kesadaran bersama.

Muhidi menyebut pajak menjadi salah satu sumber penting yang membantu pemerintah daerah menjalankan pembangunan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.

"Di tengah kebutuhan pembangunan yang terus berkembang, Sumatera Barat membutuhkan dukungan dari seluruh elemen masyarakat untuk memperkuat kemampuan keuangan daerah," ujarnya.

Salah satu sumber yang memiliki peran penting adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Penerimaan dari sektor ini menjadi bagian dari Pendapatan Asli Daerah yang kemudian mendukung berbagai kebutuhan pembangunan.

Karena itu, Muhidi berharap kesadaran membayar pajak dapat tumbuh secara perlahan dan menjadi kebiasaan baik di tengah masyarakat.

"Kita tentu ingin masyarakat membayar pajak bukan hanya karena takut terkena sanksi. Lebih dari itu, kita ingin tumbuh kesadaran bahwa membayar pajak merupakan bagian dari tanggung jawab dan kontribusi kita untuk pembangunan daerah," ujarnya.

Menurut Muhidi, semakin banyak masyarakat yang memenuhi kewajibannya tepat waktu, semakin besar pula ruang yang dimiliki pemerintah daerah untuk mendukung berbagai program yang dibutuhkan masyarakat.

Ia juga melihat pembayaran pajak memiliki kaitan dengan aktivitas ekonomi masyarakat. Infrastruktur yang baik, terutama jalan, akan membantu memperlancar mobilitas, distribusi barang dan kegiatan usaha.

"Dengan demikian, manfaat pajak tidak hanya dirasakan dalam bentuk pembangunan fisik, tetapi juga dapat mendukung aktivitas masyarakat dan dunia usaha," katanya.

Muhidi menilai, upaya meningkatkan kesadaran pajak perlu dibarengi dengan pelayanan yang semakin mudah.

Masyarakat harus mendapatkan kemudahan ketika ingin memenuhi kewajibannya. Karena itu, berbagai inovasi pelayanan, seperti Samsat keliling, pelayanan di pusat-pusat aktivitas masyarakat serta layanan digital, perlu terus dikembangkan.

"Semakin dekat dan mudah pelayanan, tentu akan semakin membantu masyarakat dalam memenuhi kewajibannya," katanya.

Selain pelayanan, komunikasi mengenai pajak juga perlu disampaikan dengan cara yang sederhana dan dekat dengan kehidupan masyarakat.

Muhidi mendorong agar edukasi perpajakan tidak hanya dilakukan melalui kegiatan formal, tetapi juga memanfaatkan berbagai ruang komunikasi yang banyak digunakan masyarakat saat ini.

"Media sosial, video pendek, radio, komunitas otomotif, kegiatan masyarakat hingga kolaborasi dengan generasi muda dapat menjadi sarana untuk menyampaikan informasi mengenai pajak dengan cara yang lebih menarik," ujarnya.

Masyarakat, kata dia, perlu

mengetahui secara sederhana kapan pajak harus dibayarkan, bagaimana proses pembayarannya, di mana layanan dapat diakses serta bagaimana pajak tersebut memberikan manfaat bagi daerah.

Karena itu, Muhidi berharap Gebyar Pajak tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial, tetapi dapat menjadi awal dari gerakan bersama untuk membangun kebiasaan baik dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

"Pesan yang disampaikan melalui kegiatan ini diharapkan terus berlanjut dan menjangkau masyarakat hingga ke nagari dan lingkungan tempat mereka beraktivitas," ujarnya.

Muhidi juga menilai pengelolaan pajak perlu didukung data yang baik. Pemerintah perlu mengetahui kondisi kendaraan yang terdaftar, tingkat kepatuhan masyarakat serta wilayah yang masih membutuhkan pendekatan dan informasi lebih lanjut.(*)



GUBERNUR Mahyeldi saat membuka kegiatan Gebyar Pajak Sumbar 2026



KETUA DPRD Sumbar, Muhidi



KETUA DPRD Sumbar, Muhidi saat menghadiri kegiatan Gebyar Pajak Sumbar 2026 di halaman Kantor Gubernur

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

KLIPING BERITA

KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
Padang Ekspres	RABU 7 OKTOBER 2026	6

Muhidi Dorong Pajak Ber basis Kesadaran

KETUA DPRD Sumbar Muhidi mengingatkan pemerintah agar gerakan meningkatkan kepatuhan pajak kendaraan motor (PKB) tidak berhenti [illegible] seremonial. Di saat yang sama, masyarakat juga diminta melihat pajak [illegible] sebagai investasi bersama untuk [illegible] dibiayai pembangunan daerah.

Pesan itu disampaikan Muhidi saat menghadiri Gebyar Pajak, Sabtu (3/10) lalu. Ia menilai, PKB memiliki posisi strategis karena menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang menentukan kapasitas fiskal Sumbar.

Namun, menurutnya, menggenjot kepatuhan wajib pajak tidak cukup hanya dengan imbauan. "Gebyar Pajak jangan sekadar seremonial. Pesan ini harus berlanjut hingga ke tingkat nagari," tegas Muhidi.

Ia mendorong perubahan pendekatan. Masyarakat seharusnya membayar pajak bukan semata karena takut sanksi, melainkan karena memahami manfaatnya bagi kehidupan sehari-hari. "Kita ingin masyarakat membayar pajak bukan karena takut sanksi, melainkan tumbuh kesadaran bahwa tanggung jawab bersama untuk kemajuan daerah," ujarnya.

Muhidi mengaitkan kepatuhan pajak dengan aktivitas ekonomi. Penerimaan yang kuat memberi pemerintah ruang lebih besar untuk membiayai pembangunan, termasuk infrastruktur jalan. Jalan yang layak, kata dia, bukan hanya soal kenyamanan berkendara, tetapi juga menyangkut kelancaran distribusi barang, mobilitas masyarakat, dan perputaran usaha.

Tetapi di sisi lain, pemerintah juga harus berbenah. Menuntut masyarakat taat pajak tanpa memastikan pelayanan mudah dan transparan dinilai bukan pendekatan yang cukup.

Muhidi meminta Samsat keliling, gerai pembayaran di pusat keramaian, hingga layanan digital terus diperluas. Edukasi pun harus mengikuti cara masyarakat menerima informasi saat ini—lebih singkat, persuasif, dan dekat dengan keseharian, termasuk melalui media sosial, video pendek, komunitas, dan generasi muda.

Ia juga menyoroti persoalan yang lebih mendasar: akurasi data kendaraan, transparansi penggunaan anggaran, dan rasa keadilan bagi wajib pajak.

Artinya, kepatuhan tidak boleh berjalan satu arah. Masyarakat dituntut memenuhi kewajiban, sementara pemerintah wajib memastikan uang yang dikumpulkan dikelola secara transparan dan kembali dalam bentuk pelayanan serta pembangunan yang dapat dirasakan.

Untuk itu, Muhidi mendorong kolaborasi pemerintah daerah, kepolisian, Jasa Raharja hingga perangkat nagari. Pendataan kendaraan, pelayanan, edukasi, dan pengawasan harus dibangun sebagai satu sistem, bukan berjalan sendiri-sendiri.

"Semakin tinggi kesadaran warga, semakin kuat kemampuan Sumatra Barat membiayai pembangunan," pungkas Muhidi. (*)



SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

KLIPIN

KORAN | HARI/T

0751 7057591



KETUA DPRD Sumbar Muhidi, Gubernur Sumbar Mahyeldi dan Kepala Bapenda Sumbar Al Amin bersama penerima piagam penghargaan saat Gebyar Pajak, di Padang, Sabtu (3/10).



KETUA DPRD Sumbar Muhidi memberi sambutan saat menghadiri Gebyar Pajak, di Padang, Sabtu (3/10).

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
KLIPING BERITA

KORAN | HARI/TANGGAL | HALAMAN
KORAN PADANG | RABU, 7 OKTOBER 2026 | 2

Muhidi Ajak Pelajar Luangkan Waktu Satu Jam Membaca Setiap Hari



KETUA *DPRD Sumbar Muhidi memberikan arahan dan motivasi kepada pelajar peserta Pelatihan Literasi SMA se-Kota Padang, di Pangeran City Hotel.*

PADANG, KP - Ketua DPRD Sumbar Muhidi mengajak para siswa untuk senantiasa menghormati jasa para guru yang telah mendidik dan membimbing mereka menuju pintu kesuksesan di masa depan.

Pesan tersebut disampaikannya saat memberikan motivasi kepada puluhan pelajar dalam kegiatan Pelatihan Menulis/Literasi Tingkat SMA negeri dan swasta, di Pangeran City Hotel Padang, Selasa (6/10).

Muhidi menekankan bahwa rasa hormat kepada guru harus dibarengi dengan semangat belajar yang tinggi serta penguatan kemampuan literasi. Dengan penguasaan literasi yang matang, pengetahuan yang diserap dari bangku sekolah dapat memberikan manfaat nyata bagi diri sendiri maupun lingkungan sekitar.

Ia menambahkan, kemampuan literasi merupakan modal krusial bagi generasi muda dalam membedah berbagai disiplin ilmu dan menjawab tantangan zaman. Karena itu, Muhidi mendorong para pelajar untuk membiasakan diri membaca buku setiap hari. "Membaca itu penting untuk memahami sesuatu. Minimal satu jam dalam sehari membaca buku-buku yang bisa menambah ilmu pengetahuan," ujarnya.

Lebih lanjut, politisi PKS itu mengingatkan bahwa jalur pendidikan merupakan sarana utama untuk meraih cita-cita. Keberhasilan seorang siswa tidak hanya diukur dari kecerdasan intelektual semata, melainkan juga dari kemauan belajar, rasa hormat kepada pendidik, serta karakter moral yang mulia.

Kegiatan pelatihan literasi kali ini memasuki angkatan ketiga dan diikuti sebanyak 80 peserta yang berasal dari empat sekolah di Kota Padang, yaitu SMAN 17, SMAN 3, SMAN 6, dan SMAN 4 Padang. **(fai)**

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
KLIPING BERITA

KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
Haluan	KAMIS, 8 OKTOBER 2026	8

MENUJU INDONESIA EMAS 2045

Ketua DPRD Sumbar Dorong Guru PPPK Jadi Penggerak Generasi Unggul

PADANG, HALUAN — Menjadi guru bukan sekadar berdiri di depan kelas dan menyampaikan pelajaran. Lebih dari itu, seorang pendidik memiliki tanggung jawab besar dalam membentuk cara berpikir, karakter hingga masa depan peserta didik.

Hal ini disampaikan Ketua DPRD Sumatera Barat, Muhidi, saat memberikan arahan pada Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan Kompetensi Guru PPPK Provinsi Sumatera Barat, Selasa (6/10).

Menurut Muhidi, guru memiliki peran strategis dalam menyiapkan generasi yang akan membawa Indonesia menuju cita-cita Indonesia Emas 2045.

Tantangan tersebut semakin besar karena perubahan dunia berlangsung sangat cepat dan menyentuh hampir seluruh bidang kehidupan.

"Pendidik bukan hanya mengajar, tetapi juga menjadi agen perubahan. Kita harus mampu mengubah pola pikir peserta didik, membangun karakter dan adab mereka, serta mengolah ilmu menjadi kompetensi yang memberikan manfaat," kata Muhidi.

Ia menilai, sekolah harus menjadi ruang yang mampu menumbuhkan semangat dan kepercayaan diri anak-anak. Karena itu, peserta didik perlu terus dimotivasi agar memiliki kemauan untuk belajar, berani berkembang dan tidak mudah menyerah dalam menghadapi tantangan.

Muhidi juga menekankan pentingnya kebersamaan dalam mendidik generasi muda. Menurutnya, keberhasilan pendidikan tidak hanya bergantung pada guru, tetapi membutuhkan hubungan yang kuat antara sekolah, peserta didik, orang tua dan lingkungan masyarakat.

"Kalau kita mengelola anak-anak, tidak bisa sendiri. Kebersamaan dan silaturahmi menjadi kunci. Dengan komunikasi yang baik, banyak hal positif yang bisa kita bangun bersama," ujarnya.

Ia mengingatkan, Indonesia tengah menuju momentum 100 tahun kemerdekaan pada 2045. Bonus demografi yang dimiliki Indonesia harus dipersiapkan sejak sekarang agar menjadi kekuatan pembangunan, bukan justru menjadi tantangan.

Karena itu, generasi yang dipersiapkan tidak cukup hanya memiliki kecerdasan akademik. Anak-anak juga harus memiliki keimanan yang kuat, akhlak yang mulia, wawasan luas serta kemampuan untuk memberikan manfaat bagi masyarakat dan bangsa.

"Kita berharap dalam 10 tahun ke depan bisa mencetak SDM yang unggul. Generasi yang kuat imannya, mulia akhlaknya, luas ilmu pengetahuannya dan mampu memberikan manfaat bagi kehidupan," tuturnya.

Muhidi menyebut perubahan global yang semakin cepat membuat dunia pendidikan harus ikut beradaptasi. Perkembangan teknologi, perubahan pola kerja dan disrupsi di berbagai sektor menuntut lahirnya sumber daya manusia yang fleksibel, kreatif dan mampu mengikuti perkembangan tanpa kehilangan nilai-nilai dasar.

"Kita membutuhkan SDM yang mampu menyesuaikan diri dengan perubahan, tetapi jangan sampai terbawa oleh perubahan. Ini menjadi tugas penting dunia pendidikan," katanya.



Menurutnya, kekayaan sumber daya alam Indonesia juga harus didukung oleh kualitas manusia yang mampu mengelolanya. Jika sumber daya manusia memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai, potensi yang dimiliki daerah maupun negara dapat diolah menjadi kekuatan ekonomi.

Di sinilah, kata Muhidi, pendidikan memegang peranan penting. Ia berharap para guru PPPK terus meningkatkan kompetensi sekaligus memperkuat keteladanan dalam menjalankan tugas. Guru tidak hanya dituntut menguasai materi pembelajaran, tetapi juga harus mampu menjadi contoh bagi peserta didik dalam sikap, disiplin dan kehidupan sehari-hari.

"Pendidikan bukan hanya mengajar, tetapi juga menginspirasi. Guru harus mampu memberikan keteladanan dan menanamkan nilai-nilai yang akan menjadi bekal anak-anak menghadapi masa depan," tegasnya.

Melalui peningkatan kompetensi guru, Muhidi berharap kualitas pendidikan di Sumatera Barat semakin kuat dan mampu melahirkan generasi yang tidak hanya cerdas, tetapi juga berkarakter, berdaya saing dan memiliki kepedulian terhadap lingkungan serta pembangunan bangsa.

"Guru hari ini sedang mempersiapkan generasi yang akan menentukan wajah Indonesia pada 2045. Karena itu, tugas seorang pendidik adalah tugas besar yang harus dijalankan dengan ilmu, keteladanan dan keikhlasan," pungkasnya. (*)



KETUA DPRD Sumatera Barat, Muhidi, saat memberikan arahan pada Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan Kompetensi Guru PPPK Provinsi Sumbar



BERFOTO bersama



PESERTA Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan Kompetensi Guru PPPK saat mengikuti kegiatan

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

KLIPING BERITA

KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
SINGGALANG	Kamis, 8 Oktober 2026 (25 Rabiul Akhir 1448 H)	8

SUKSESKAN INDONESIA EMAS 2045

Ketua DPRD Sumbar Dorong Guru PPPK Cetak Generasi Unggul

PADANG - SINGGALANG

Ketua DPRD Sumatera Barat (Sumbar), Muhidi, menegaskan bahwa guru memiliki tanggung jawab besar dalam membentuk karakter dan masa depan peserta didik, bukan sekadar mengajar di kelas.



Hal tersebut disampaikannya saat memberikan arahan pada Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan Kompetensi Guru PPPK Provinsi Sumbar, Selasa (6/10).

Menurut Muhidi, guru memegang peran strategis dalam menyiapkan generasi unggul menuju cita-cita Indonesia Emas 2045 di tengah disrupsi global.

"Pendidik adalah agen perubahan. Kita harus mampu mengubah pola pikir peserta didik, membangun karakter dan adab, serta mengolah ilmu menjadi kompetensi yang bermanfaat," ujar Muhidi.

Ia menambahkan, sekolah wajib menjadi ruang yang menumbuhkan semangat, kepercayaan diri, dan daya juang siswa. Namun, keberhasilan pendidikan tidak dapat bertumpu pada guru semata, melainkan butuh sinergi kuat antara sekolah, orang tua, dan masyarakat.

"Mengelola anak-anak tidak bisa sendiri. Kebersamaan, silaturahmi, dan komunikasi yang baik menjadi kunci pembangunan hal-hal positif," lanjutnya.

Menghadapi momentum 100 tahun kemerdekaan pada 2045, Muhidi mengingatkan pentingnya mempersiapkan bonus demografi.

Generasi masa depan tidak cukup hanya cerdas secara akademik, tetapi juga harus kuat secara iman, berakhlak mulia, berwawasan luas, serta adaptif terhadap perubahan zaman tanpa kehilangan nilai-nilai dasar. Kualitas SDM yang mumpuni juga diperlukan untuk mengelola kekayaan sumber daya alam menjadi kekuatan ekonomi.

Di akhir arahannya, Muhidi berharap para guru PPPK terus meningkatkan kompetensi dan memperkuat keteladanan dalam sikap maupun disiplin sehari-hari.

"Guru hari ini sedang menyiapkan generasi yang menentukan wajah Indonesia pada 2045. Tugas besar ini harus dijalankan dengan ilmu, keteladanan, dan ketikhlasan," pungkasnya.(*)



KLIPING BERITA







KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
KORAN PADANG	KAMIS, 8 OKTOBER 2026	12

Muhidi Dorong Guru PPPK Jadi Penggerak Generasi Unggul Menuju Indonesia Emas 2045

MENJADI seorang guru bukan sekadar berdiri di depan kelas dan menyampaikan pelajaran. Lebih dari itu, pendidik memikul tanggung jawab besar dalam membentuk pola pikir, karakter, hingga menentukan masa depan generasi penerus bangsa.

Hal tersebut ditegaskan Ketua DPRD Sumatera Barat, Muhidi, saat memberikan arahan dalam Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan Kompetensi Guru PPPK Provinsi Sumatera Barat di Padang, Selasa (6/10).

"Pendidik bukan hanya mengajar, tetapi juga agen perubahan (agent of change). Guru harus mampu mengubah cara berpikir peserta didik, membina karakter dan adab, serta mengolah ilmu pengetahuan menjadi kompetensi yang bermanfaat," ujar Muhidi.

Ia mengingatkan bahwa Indonesia tengah menyongsong momentum 100 tahun kemerdekaan pada 2045. Untuk memanfaatkan puncak bonus demografi tersebut, dunia pendidikan dituntut mencetak Sumber Daya Manusia (SDM) unggul yang adaptif terhadap perubahan teknologi tanpa mengikis nilai-nilai keimanan dan akhlak mulia.

Muhidi juga menggarisbawahi pentingnya kolaborasi dan sinergi yang kuat antara guru, sekolah, orang tua, dan lingkungan masyarakat dalam mendidik anak.

"Mengelola dan membimbing anak-anak tidak bisa dilakukan sendirian. Kebersamaan, komunikasi, serta silaturahmi menjadi kunci utama. Guru hari ini sedang menyiapkan generasi yang menentukan wajah Indonesia 2045, sehingga tugas ini harus dijalankan dengan ilmu, keteladanan, dan keikhlasan," tegasnya. *



KETUA *DPRD Sumbar Muhidi foto bersama dengan perwakilan guru dan para siswa usai memberikan pembekalan materi Bimtek Peningkatan Kompetensi.*

KETUA *DPRD Sumbar Muhidi memaparkan materi pentingnya peran pendidik sebagai agen perubahan karakter dan pola pikir generasi muda.*

GURU *PPPK se-Sumatera Barat menyimak materi dan arahan dalam Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Guru PPPK di Padang.*

KETUA *DPRD Sumbar Muhidi memberikan pengarahan dan motivasi kepada para peserta Bimtek Peningkatan Kompetensi Guru PPPK di Padang.*

KETUA *DPRD Sumbar Muhidi berfoto bersama seluruh jajaran panitia dan peserta Bimtek Peningkatan Kompetensi Guru PPPK.*

KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
Haluan	SELASA, 13 OKTOBER 2025	3

OPTIMALKAN PEMANFAATAN BMD

Pansus Aset DPRD Sumbar Dorong Optimalisasi Rumah PDRI di Bukittinggi

BUKITTINGGI, HALUAN- Potensi aset daerah tidak cukup hanya tercatat dalam administrasi pemerintahan, tetapi juga harus mampu memberikan manfaat bagi masyarakat. Hal inilah yang menjadi perhatian Panitia Khusus (Pansus) Aset DPRD Sumatera Barat saat meninjau Rumah Eks Penghubung Gubernur Wilayah (Pemgubwil) di Kota Bukittinggi yang dikenal sebagai Rumah PDRI, baru-baru ini.

Bangunan milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tersebut hingga kini belum dimanfaatkan secara optimal. Padahal, selain memiliki nilai sejarah, rumah itu berada di lokasi strategis dengan panorama alam yang indah. Potensi tersebut dinilai layak menjadi pertimbangan dalam merancang pemanfaatan aset daerah ke depan.

Dalam peninjauan lapangan itu, anggota Pansus Aset DPRD Sumbar dari Fraksi PKS, Rafdinal, menyoroti kondisi bangunan yang mulai terlihat rusak dan usang. Menurutnya, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian agar aset milik pemerintah daerah tidak terus dibiarkan tanpa pemanfaatan yang jelas.

"Tempat ini lokasinya sangat strategis dengan suguhan panorama yang indah. Sangat disayangkan, aset berharga seperti Rumah Eks Pemgubwil ini belum termanfaatkan dan kondisinya mulai merana," ujar Rafdinal.

Ia mengatakan, peninjauan lapangan menjadi bagian dari upaya Pansus Aset DPRD Sumbar mengevaluasi keberadaan aset daerah, termasuk melihat langsung kondisi fisik serta potensi yang dapat dikembangkan.

Menurut Rafdinal, aset pemerintah daerah semestinya dikelola dengan perencanaan yang jelas. Dengan demikian, keberadaannya tidak hanya menjadi beban pemeliharaan, tetapi juga berpeluang memberikan nilai tambah bagi daerah.

Karena itu, ia mendorong Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengkaji langkah konkret untuk menentukan arah pemanfaatan Rumah PDRI. Kajian tersebut perlu mempertimbangkan kondisi bangunan, nilai sejarah, serta potensi lingkungan di sekitarnya.

"Jangan sampai aset yang memiliki potensi besar dibiarkan begitu saja. Kita mendorong pemerintah provinsi mengkaji pemanfaatan yang tepat agar aset ini terawat dan bisa memberikan manfaat bagi masyarakat," katanya.

Perhatian serupa disampaikan anggota Pansus Aset DPRD Sumbar lainnya, Agusyahdeman. Ia menilai, Rumah PDRI memiliki sejumlah potensi yang dapat menjadi dasar dalam merumuskan pemanfaatan bangunan tersebut.

"Sayang sekali, aset milik pemerintah daerah yang berada di lokasi strategis dan memiliki panorama alam yang indah ini belum dimanfaatkan secara optimal. Apalagi, bangunan ini juga memiliki nilai sejarah yang penting bagi Sumatera Barat," ujar Agusyahdeman.

Menurutnya, kondisi bangunan yang mulai merana perlu segera menjadi perhatian. Pemerintah provinsi perlu mengevaluasi kondisi aset sekaligus mengkaji berbagai alternatif pemanfaatan agar keberadaannya tetap terjaga.

Ia berharap pengelolaan Rumah PDRI tidak berhenti pada pendataan aset semata. Diperlukan perencanaan yang terarah agar bangunan tersebut dapat dipelihara dengan baik dan memiliki fungsi yang jelas.

"Jangan sampai aset yang memiliki potensi besar justru dibiarkan tanpa kejelasan pemanfaatan. Kita berharap ada langkah konkret agar bangunan ini terawat dan bisa memberikan manfaat bagi masyarakat, tanpa mengabaikan nilai sejarahnya," tambahnya.

Peninjauan Rumah PDRI menjadi salah satu perhatian Pansus Aset DPRD Sumbar dalam melihat peluang optimalisasi barang milik daerah (BMD). Pengelolaan aset yang baik tidak hanya berkaitan dengan pencatatan administrasi, tetapi juga mencakup pemeliharaan, kepastian status, serta perencanaan penggunaan yang sesuai kebutuhan.

Rumah PDRI memiliki peluang untuk dikaji sebagai ruang edukasi sejarah atau destinasi wisata sejarah dengan tetap memperhatikan karakter bangunan dan ketentuan pengelolaan aset pemerintah. Namun,



pilihan pemanfaatannya memer lukan kajian lebih lanjut agar sesuai dengan kondisi bangunan dan kebutuhan daerah.

Melalui evaluasi tersebut, DPRD Sumbar mendorong agar aset-aset milik pemerintah provinsi yang belum termanfaatkan memperoleh perhatian dan tindak lanjut yang jelas.

Harapannya, kekayaan daerah dapat dikelola secara lebih produktif, nilai sejarah bangunan tetap terjaga, dan potensi yang dimiliki dapat dikembangkan untuk memberikan manfaat bagi masyarakat Sumatera Barat. (*)



Pansus Aset DPRD Sumbar saat meninjau Rumah Eks Penghubung Gubernur Wilayah (Pemgubwil) di Kota Bukittinggi yang dikenal sebagai Rumah PDRI, baru-baru ini



Pansus Aset DPRD Sumbar meninjau Rumah PDRI yang terletak di Bukittinggi



Pansus Aset DPRD Sumbar di depan Rumah PDRI, aset bangunan yang merupakan milik daerah



Berfoto bersama



SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

KLIPING BERITA

KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
KORAN PADANG	SELASA, 13 OKTOBER 2026	12

Pansus Aset DPRD Sumbar Dorong Optimalisasi Rumah PDRI di Bukit tinggi, Potensi Sejarah dan Wisata Jadi Perhatian

POTENSI aset milik daerah tidak cukup hanya sekadar tercatat secara administrasi, melainkan harus dikelola secara produktif agar memberi manfaat bagi masyarakat. Hal inilah yang mendasari Panitia Khusus (Pansus) Aset DPRD Sumatera Barat saat meninjau Rumah Eks Penghubung Gubernur Wilayah (Pemgubwil) di Kota Bukittinggi yang dikenal sebagai Rumah PDRI.

Bangunan bernilai sejarah milik Pemprov Sumbar ter sebut dinilai belum dimanfaatkan secara optimal. Padahal, aset yang berada di lokasi strategis dengan suguhan pano rama alam indah tersebut sangat potensial dikembangkan sebagai destinasi wisata atau ruang edukasi sejarah.

Anggota Pansus Aset DPRD Sumbar Fraksi PKS, Rafdinal, menyoroti kondisi fisik bangunan yang mulai tampak tua dan usang akibat terbiarkan tanpa pemanfaatan yang jelas.

"Tempat ini sangat strategis dan punya panorama yang indah. Sangat disayangkan aset berharga seperti Ru mah Eks Pemgubwil ini belum termanfaatkan dan kondisi nya mulai menua. Kita mendorong Pemprov Sumbar mela kukan kajian konkret agar ada pemanfaatan yang tepat dan berdaya guna," ujar Rafdinal.

Senada dengan itu, anggota Pansus Aset DPRD Sum bar, Agusyahdeman, menegaskan agar pengawasan aset milik daerah tidak berhenti pada pendataan di atas kertas semata.

"Jangan sampai aset dengan potensi besar dan berni lai sejarah penting bagi Sumbar ini dibiarkan begitu saja tanpa kejelasan fungsi. Perlu perencanaan terarah agar bangunan terawat dan menghasilkan nilai tambah bagi daerah," tegas Agusyahdeman.

Pansus Aset DPRD Sumbar mendorong Pemprov Sum bar segera mengevaluasi keberadaan barang milik daerah yang menang documentasi, agar seluruh aset mangkrak dapat difungsikan secara produktif demi kesejahteraan masyarakat. *



KLIPING BERITA

PANSUS *Aset DPRD Sumbar foto bersama di halaman Rumah Eks Pemgubwil Bukittinggi atau Rumah PDRI yang akbanyg untuk segera dikaji pemanfaatannya agar lebih berdaya guna.*

ANGGOTA *Pansus Aset DPRD Sumbar Rafdinal bersama tim meninjau fisik dan lingkungan sekitaring bangunan bernilai sejarah tersebut.*

ANGGOTA *Pansus Aset DPRD Sumbar Rafdinal mengabadikan momen bersama tim di kawasan Rumah Eks Pemgubwil Bukittinggi.*

ROMBONGAN *Pansus Aset DPRD Sumbar foto bersama di depan prasi papan nama aset milik Pemprov Sumbar yang terpasang di dinding bangunan Rumah Eks Pemgubwil Bukittinggi.*

TIM *Pansus Aset DPRD Sumbar berdiskusi di area pelataran Rumah Eks Pemgubwil (Rumah PDRI) Kota Bukittinggi saat melakukan peninjauan lapangan.*

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
KLIPING BERITA

KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
Haluan	RABU, 14 OKTOBER 2026	2

Muzli M Nur Salurkan Bantuan Alsintan di Pasaman

PASAMAN, HALUAN — Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), Muzli M. Nur, menyalurkan bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan) kepada sejumlah kelompok tani di Kabupaten Pasaman, Selasa (13/10). Bantuan berupa alat pengolah tanah sejenis bajak tersebut disalurkan melalui dana aspirasi atau pokok-pokok pikiran (pokir) Muzli M. Nur.

Penyerahan bantuan berlangsung di Dinas Pertanian Kabupaten Pasaman, didampingi jajaran Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Barat, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pasaman, serta Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP).

Bantuan alsintan ini diharapkan dapat membantu petani mengolah lahan secara lebih efektif, menghemat waktu dan tenaga, serta meningkatkan produktivitas pertanian di Kabupaten Pasaman.

Muzli M. Nur merupakan anggota DPRD Sumbar dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) yang telah menjalani enam periode sebagai wakil rakyat. Saat ini, ia bertugas di Komisi IV DPRD Sumbar sekaligus menjabat Ketua Badan Kehormatan DPRD Provinsi Sumatera Barat.

Penyaluran bantuan tersebut menjadi bagian dari upaya memperjuangkan kebutuhan petani, terutama dalam penyediaan sarana pendukung kegiatan pertanian.

Selain sektor pertanian, Muzli M. Nur juga memperjuangkan pembangunan dan peningkatan infrastruktur jalan provinsi di Pasaman. Infrastruktur jalan dinilai penting untuk menunjang mobilitas masyarakat sekaligus memperlancar distribusi hasil pertanian.



ANGGOTA DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), Muzli M. Nur. IST

Memperjuangkan pembangunan dan peningkatan infrastruktur jalan provinsi di Pasaman. Infrastruktur jalan dinilai penting untuk menunjang mobilitas masyarakat sekaligus memperlancar distribusi hasil pertanian.

Dukungan terhadap sarana pertanian dan infrastruktur jalan diharapkan dapat berjalan beriringan. Dengan pengolahan lahan yang lebih efisien serta akses transportasi yang memadai, petani diharapkan lebih mudah menjalankan usaha tani dan memasarkan hasil panennya.

Kelompok tani penerima bantuan diharapkan memanfaatkan alsintan sesuai peruntukannya serta menjaga dan merawat peralatan tersebut agar manfaatnya dapat dirasakan secara berkelanjutan.

Melalui dukungan sarana pertanian dan pembangunan infrastruktur, sektor pertanian Pasaman diharapkan semakin produktif dan mampu mendorong peningkatan kesejahteraan petani. **(h/rel)**



SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

KLIPING BERITA

KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
SINGGALANG	Rabu, 14 Oktober 2026 (2 Jumadil Awal 1448 H)	7

Muzli M. Nur Salurkan Bantuan Alsintan untuk Petani Pasaman

Pasaman, Singgalang

Anggota DPRD Sumatera Barat (Sumbar) Muzli M. Nur, menyalurkan bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan) berupa alat pembajak tanah kepada sejumlah kelompok tani di Pasaman, Selasa (13/10). Bantuan melalui dana pokok-pokok pikiran (pokir) ini diserahkan di Kantor Dinas Pertanian Pasaman.

Agenda tersebut didampingi jajaran Dinas Pertanian Sumbar, Plt. Kepala Dinas Pertanian Pasaman, serta Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) setempat.

Muzli mengatakan bantuan tersebut merupakan komitmen nyata dalam mengawal aspirasi masyarakat bawah. Ia berharap mekanisasi ini dapat menyederhanakan proses pengolahan lahan yang selama ini memakan waktu dan biaya besar.



Anggota DPRD Sumbar, Muzli M. Nur saat menyerahkan bantuan alsintan pada kelompok tani di Pasaman, Selasa (13/10). (ist)

"Kami ingin petani kita keluar dari metode tradisional yang melelahkan. Dengan alsintan ini, efisiensi kerja meningkat dan produktivitas pertanian Pasaman otomatis ikut naik. Saya minta kelompok tani merawatnya secara swadaya agar asas manfaatnya berjangka panjang," ujar Muzli di sela-sela penyerahan.

Legislator Fraksi PAN yang kini menjabat Ketua Badan Kehormatan serta anggota Komisi IV DPRD Sumbar ini menambahkan, intervensi di sektor pertanian tidak boleh setengah-setengah. Selain sarana produksi, ia menegaskan pentingnya interkoneksi jalan.

"Alsintan yang baik harus didukung infrastruktur jalan provinsi yang memadai. Jika jalannya mulus, distribusi hasil bumi ke pasar luar daerah menjadi lebih cepat dan murah. Sinergi inilah yang sedang kami perjuangkan demi mendongkrak kesejahteraan keluarga petani di Pasaman," pungkas legislator yang telah mengabdi selama enam periode tersebut. (601)



61

KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
Padang Ekspres	RABU 14 OKTOBER 2026	7

Donizar: Adat dan Budaya Pasaman Harus Dijaga

Pasaman, Padek—Kepedulian terhadap pelestarian adat dan budaya daerah menjadi pesan utama Anggota DPRD Sumatera Barat dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FKB), Donizar, saat membuka Festival 10 Induk di Terminal Bentereng, Tanjung Baringin, Kabupaten Pasaman, Senin (12/10). Kegiatan ini bersumber dari pokok pikiran (pokir) Donizar.

Bagi Donizar, adat dan budaya bukan sekadar warisan masa lalu, melainkan identitas yang membentuk karakter masyarakat dan harus terus dijaga di tengah perubahan zaman. Karena itu, kegiatan kebudayaan seperti Festival 10 Induk perlu mendapat dukungan agar tradisi yang diwariskan para pendahulu tetap hidup dan dikenal oleh generasi muda.

Pembukaan festival tersebut menjadi salah satu bentuk dukungan terhadap upaya merawat tradisi lokal sekaligus memperkuat kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kekayaan budaya daerah. Kehadiran Donizar juga menegaskan bahwa pelestarian budaya membutuhkan perhatian dan keterlibatan bersama, bukan hanya menjadi tanggung jawab kelompok atau komunitas tertentu.

"Tradisi dan kebudayaan daerah merupakan bagian dari identitas masyarakat yang harus dijaga bersama. Kegiatan seperti ini perlu terus didukung agar generasi muda mengenal dan menghargai warisan budaya daerahnya," ujar Donizar.

Menurut dia, keberlangsungan adat dan budaya sangat bergantung pada kepedulian masyarakat dalam mewariskan nilai-nilai luhur kepada generasi berikutnya. Pemerintah, tokoh adat, tokoh masyarakat, generasi muda, dan komunitas lokal perlu mengambil peran agar tradisi tidak tergerus oleh perkembangan zaman.

Di Kabupaten Pasaman, festival berbasis tradisi lokal memiliki arti penting sebagai ruang perjumpaan antargenerasi. Melalui kegiatan tersebut, masyarakat dapat mengenali kembali akar budayanya, mempererat hubungan sosial, serta memperkenalkan kekayaan tradisi daerah kepada khalayak yang lebih luas.

Donizar menilai, pelestarian budaya juga berkaitan erat dengan upaya menjaga kebersamaan masyarakat. Festival tidak hanya menjadi tempat warga berkumpul dan menyaksikan rangkaian acara, tetapi juga menjadi sarana membangun komunikasi dan memperkuat ikatan sosial yang tumbuh dari nilai-nilai budaya setempat.

Di sisi lain, kegiatan kebudayaan juga menyimpan potensi ekonomi bagi masyarakat. Kehadiran pengunjung dapat membuka peluang bagi pelaku usaha kecil untuk menawarkan produk dan jasa selama festival berlangsung. Dengan demikian, pelestarian budaya berpeluang memberikan manfaat sosial sekaligus ekonomi apabila dikelola secara berkelanjutan.

Namun, upaya menjaga adat dan budaya tidak boleh berhenti pada penyelenggaraan festival yang bersifat seremonial. Diperlukan kesinambungan kegiatan dan keterlibatan masyarakat agar tradisi tetap dipraktikkan, diwariskan, serta menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.

Donizar berharap Festival 10 Induk dapat menjadi momentum untuk menumbuhkan kepedulian masyarakat terhadap adat dan budaya lokal. Ia juga mendorong agar kegiatan serupa terus mendapat perhatian sehingga potensi kebudayaan Pasaman dapat berkembang dan tetap terjaga.

Menurutnya, kemajuan daerah tidak cukup diukur dari pembangunan fisik. Kemampuan masyarakat mempertahankan identitas, merawat nilai kebersamaan, dan menjaga warisan leluhur juga menjadi bagian penting dalam membangun daerah. Adat dan budaya, karena itu, harus ditempatkan sebagai kekayaan yang dirawat bersama agar tidak kehilangan makna bagi generasi mendatang. (wnl)



PELESTARIAN ADAT: Anggota DPRD Sumatera Barat dari Fraksi PKB, Donizar, membuka Festival 10 Induk di Terminal Bentereng, Tanjung Baringin, Kabupaten Pasaman, Senin (12/10).



KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
Haluan	KAMIS, 15 OKTOBER 2026	8

TINGKATKAN KUALITAS PENDIDIKAN

DPRD Sumbar Dorong Penguatan Peran Guru Wali

PADANG, HALUAN — Penguatan peran guru wali menjadi langkah strategis dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Sumatera Barat (Sumbar). Keberadaan guru wali dinilai sangat vital, terutama dalam mendampingi peserta didik, membangun karakter, serta mencegah dan menangani berbagai persoalan di lingkungan sekolah.

Hal tersebut ditegaskan oleh Ketua DPRD Sumatera Barat, Muhidi saat membuka pelaksanaan Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan Kapasitas Guru Wali SMA, SMK, dan SLB se-Sumbar yang diselenggarakan Dinas Pendidikan Provinsi Sumbar di The Axana Hotel Padang, 14–16 Oktober 2026.

Muhidi menilai bahwa penguatan peran tenaga pendidik di sekolah harus menjadi perhatian bersama. Menurutnya, guru tidak hanya bertugas menyampaikan materi pelajaran, tetapi juga memegang posisi kunci dalam mendampingi tumbuh kembang siswa, baik dari sisi akademik maupun pembentukan mental dan karakter.

"Kemahiran dan keterampilan yang dimiliki para guru diperoleh melalui latihan serta aktivitas yang relevan. Oleh karena itu, pendampingan yang baik membutuhkan kepedulian dan kemampuan guru dalam memahami kondisi siswa. Dengan begitu, persoalan peserta didik dapat terdeteksi lebih awal dan ditangani secara tepat," ujar Muhidi.

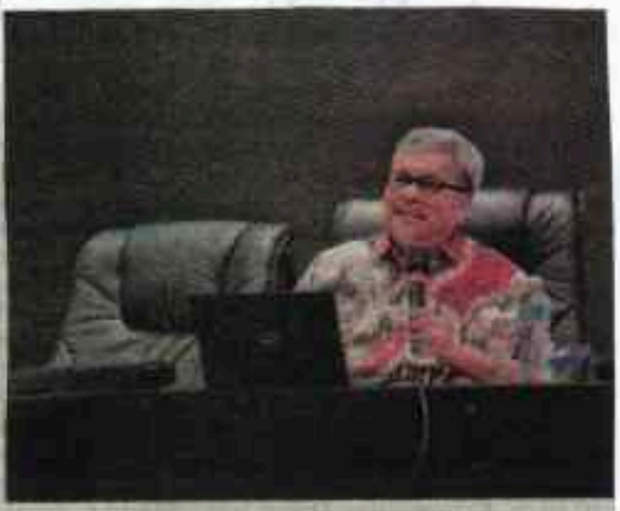
Ia menambahkan, keberhasilan pendampingan siswa memerlukan sinergi yang kuat antara berbagai pihak, mulai dari orang tua, guru Bimbingan Konseling (BK), pihak sekolah, dinas pendidikan, hingga pemangku kepentingan terkait lainnya.

"Sekolah harus menjadi lingkungan pembelajaran yang aman, inklusif, dan berkualitas. Kolaborasi yang efektif dibangun melalui komunikasi terbuka dan transparan tanpa ada salah penafsiran. Pemantauan terhadap perkembangan anak harus dilakukan secara berkesinambungan, baik di rumah maupun di sekolah," tegasnya.

Melalui pendampingan yang berkelanjutan ini, DPRD Sumbar mendorong agar peningkatan kapasitas tenaga pendidik terus berlanjut. Kualitas pendidikan diharapkan tidak hanya diukur dari capaian prestasi akademik semata, tetapi juga dari keberhasilan melahirkan generasi muda yang mandiri, sehat, berintegritas, dan berkarakter.

Bimtek yang digelar Dinas Pendidikan Sumbar ini diikuti oleh ratusan guru dari jenjang SMA, SMK, dan SLB kabupaten/kota se-Sumatera Barat.

Pada hari pertama pelaksanaan, Rabu (14/10/2026), tercatat sebanyak 450 peserta dijadwalkan mengikuti sesi Bimbingan Teknis yang terbagi ke dalam Angkatan I Kelas A dan Kelas B. Kegiatan ini dirancang untuk membekali guru wali agar lebih optimal dalam memenuhi hak-hak siswa, memperkuat karakter, serta merespons berbagai dinamika peserta didik di satuan pendidikan masing-masing. (*)



KETUA DPRD Sumbar, Muhidi



KLIPING BERITA



PESERTA kegiatan berfoto bersama dengan Ketua DPRD Sumbar



BIMBINGAN Teknis (Bimtek) Peningkatan Kapasitas Guru Wali SMA, SMK, dan SLB se-Sumbar yang diselenggarakan Dinas Pendidikan Provinsi Sumbar di The Axana Hotel Padang



KETUA DPRD Sumbar, Muhidi saat memberikan materi dalam kegiatan Bimtek Peningkatan Kapasitas Guru Wali SMA, SMK, dan SLB se-Sumbar yang diselenggarakan Dinas Pendidikan Provinsi Sumbar di The Axana Hotel Padang

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

KLIPING BERITA

KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
SINGGALANG	Kamis, 15 Oktober 2026 (3 Jumadil Awal 1448 H)	6

Pansus Aset Dorong Pemanfaatan Rumah Eks Pemgubwil

BUKITTINGGI - SINGGALANG

Potensi aset daerah tidak cukup hanya tercatat dalam administrasi pemerintahan, tetapi juga harus mampu memberikan manfaat bagi masyarakat. Hal inilah yang menjadi perhatian Panitia Khusus (Pansus) Aset DPRD Sumatera Barat saat meninjau Rumah Eks Penghubung Gubernur Wilayah (Pemgubwil) di Kota Bukittinggi yang dikenal sebagai Rumah PDRI, baru-baru ini.

Bangunan milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tersebut hingga kini belum dimanfaatkan secara optimal. Padahal, selain memiliki nilai sejarah, rumah itu berada di lokasi strategis dengan panorama alam yang indah. Potensi tersebut dinilai layak menjadi pertimbangan dalam merancang pemanfaatan aset daerah ke depan.

Dalam peninjauan lapangan itu, anggota Pansus Aset DPRD Sumbar dari Fraksi PKS, Rafdinal, menyoroti kondisi bangunan yang mulai terlihat tua dan usang. Menurutnya, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian agar aset milik pemerintah daerah tidak terus dibiarkan tanpa pemanfaatan yang jelas.

"Tempat ini lokasinya sangat strategis dengan suguhan panorama yang indah. Sangat disayangkan, aset berharga seperti Rumah Eks Pemgubwil ini belum termanfaatkan dan kondisinya mulai menua," ujar Rafdinal.

Ia mengatakan, peninjauan lapangan menjadi bagian dari upaya Pansus Aset DPRD Sumbar mengevaluasi keberadaan aset daerah, termasuk melihat langsung kondisi fisik serta potensi yang dapat dikembangkan.

Menurut Rafdinal, aset pemerintah daerah semestinya dikelola dengan perencanaan yang jelas. Dengan demikian, keberadaannya tidak hanya menjadi beban pemeliharaan, tetapi juga berpeluang memberikan nilai tambah bagi daerah.

Karena itu, ia mendorong Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengkaji langkah konkret untuk menentukan arah pemanfaatan Rumah PDRI. Kajian tersebut perlu mempertimbangkan kondisi bangunan, nilai sejarah, serta potensi lingkungan di sekitarnya.

"Jangan sampai aset yang memiliki potensi besar dibiarkan begitu saja. Kita mendorong pemerintah provinsi mengkaji pemanfaatan yang tepat agar aset ini terawat dan bisa memberikan manfaat bagi masyarakat," katanya.

Perhatian serupa disampaikan anggota Pansus Aset DPRD Sumbar lainnya, Agusyahdeman. Ia menilai, Rumah PDRI memiliki sejumlah potensi yang dapat menjadi dasar dalam merumuskan pemanfaatan bangunan tersebut.

"Sayang sekali, aset milik pemerintah daerah yang berada di lokasi strategis dan memiliki panorama alam yang indah ini belum dimanfaatkan secara optimal. Apalagi, bangunan ini juga memiliki nilai sejarah yang penting bagi Sumatera Barat," ujar Agusyahdeman.

Menurutnya, kondisi bangunan yang mulai menua perlu segera menjadi perhatian. Pemerintah provinsi perlu mengevaluasi kondisi aset sekaligus mengkaji berbagai alternatif pemanfaatan agar keberadaannya tetap terjaga.

Ia berharap pengelolaan Rumah PDRI tidak berhenti pada pendataan aset semata. Diperlukan perencanaan yang terarah agar bangunan tersebut dapat dipelihara dengan baik dan memiliki fungsi yang jelas.

"Jangan sampai aset yang memiliki potensi besar justru dibiarkan tanpa kejelasan pemanfaatan. Kita berharap ada langkah konkret agar bangunan ini terawat dan bisa memberikan manfaat bagi masyarakat, tanpa mengabaikan nilai sejarahnya," tambahnya.

Peninjauan Rumah PDRI menjadi salah satu perhatian Pansus Aset DPRD Sumbar dalam melihat peluang optimalisasi barang milik daerah (BMD). Pengelolaan aset yang baik tidak hanya berkaitan dengan pencatatan administrasi, tetapi juga mencakup pemeliharaan, kepastian status, serta perencanaan penggunaan yang sesuai kebutuhan.

Rumah PDRI memiliki peluang untuk dikaji sebagai ruang edukasi sejarah atau destinasi wisata sejarah dengan tetap memperhatikan karakter bangunan dan ketentuan pengelolaan aset pemerintah. Namun, pilihan pemanfaatannya memerlukan kajian lebih lanjut agar sesuai dengan kondisi bangunan dan kebutuhan daerah.

Melalui evaluasi tersebut, DPRD Sumbar mendorong agar aset-aset milik pemerintah provinsi yang belum termanfaatkan memperoleh perhatian dan tindak lanjut yang jelas.

Harapannya, kekayaan daerah dapat dikelola secara lebih produktif, nilai sejarah bangunan tetap terjaga, dan potensi yang dimiliki dapat dikembangkan untuk memberikan manfaat bagi masyarakat Sumatera Barat. (*)



KLIPING BERITA











SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

KLIPING BERITA

KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
KORAN PADANG	KAMIS, 15 OKTOBER 2026	12

DPRD Sumbar Dorong Penguatan Peran Guru Wali untuk Cegah Masalah di Sekolah

KEBERADAAN guru wali memiliki posisi sangat vital dalam mendampingi tumbuh kembang peserta didik, membangun karakter, serta mendeteksi dini berbagai persoalan di lingkungan sekolah. Penguatan peran strategis tenaga pendidik tersebut terus didorong guna meningkatkan mutu pendidikan di Sumatera Barat.

Hal itu ditegaskan Ketua DPRD Sumbar, Muhidi, saat memberi arahan pada Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan Kapasitas Guru Wali SMA, SMK, dan SLB se-Sumbar yang digelar Dinas Pendidikan Provinsi Sumbar, di The Axana Hotel Padang, Rabu (14/10).

"Kemahiran dan keterampilan yang dimiliki para guru diperoleh melalui latihan serta aktivitas yang relevan. Oleh karena itu, pendampingan yang baik membutuhkan kepedulian dan kemampuan guru dalam memahami kondisi siswa agar persoalan dapat terdeteksi lebih awal," ujar Muhidi.

Ia menilai, guru tak sekadar bertugas menyampaikan materi pelajaran di kelas, tetapi juga memegang kunci dalam membentuk mental dan integritas siswa.

Ia mendorong terwujudnya lingkungan sekolah yang aman, inklusif, dan berkualitas melalui komunikasi terbuka antara pihak sekolah, guru BK, hingga orang tua.

Langkah pendampingan secara berkesinambungan ini diharapkan mampu melahirkan generasi muda Sumbar yang mandiri, sehat, dan berkarakter, di samping menggapai prestasi akademik.

Bimtek yang berlangsung pada 14–16 Oktober 2026 ini diikuti ratusan guru dari berbagai kabupaten dan kota. Pada hari pertama, sebanyak 450 peserta yang terbagi dalam Angkatan I Kelas A dan Kelas B mendapatkan pembekalan intensif untuk merespons dinamika peserta didik di sekolah masing-masing."



KETUA *DPRD Sumbar Muhidi foto bersama para peserta dan panitia usai pembukaan Bimtek Peningkatan Kapasitas Guru Wali se-Sumbar di Padang.*

PARA *guru SMA, SMK, dan SLB se-Sumbar menyimak paparan materi dengan tekun saat Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Guru Wali.*

KETUA *DPRD Sumbar Muhidi menyampaikan arahan terkait pentingnya kepedulian guru dalam memahami kondisi dan karakter peserta didik.*

KETUA *DPRD Sumbar Muhidi memimpin sesi pembekalan materi dalam Bimtek Peningkatan Kapasitas Guru Wali SMA, SMK, dan SLB se-Sumbar.*

KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
KORAN PADANG	JUMAT, 16 OKTOBER 2026	6

Nurfirmanwansyah Serahkan Bantuan 20 Laptop untuk SMAN 2 Sumbar

PADANG, KP - Fasilitas pembelajaran digital di SMA Negeri 2 Sumatera Barat kini semakin memadai setelah sekolah tersebut menerima bantuan 20 unit laptop. Bantuan perangkat teknologi ini merupakan realisasi dari program aspirasi Wakil Ketua Komisi V DPRD Sumatera Barat dari Fraksi PKS, Nurfirmanwansyah.

Penyerahan bantuan yang dilakukan pada pekan lalu itu bertujuan untuk mendukung kegiatan belajar mengajar serta memperkuat pemanfaatan teknologi informasi di lingkungan sekolah. Melalui perangkat pendukung ini, guru dan siswa dapat lebih mudah mengakses berbagai sumber belajar berbasis digital.

Kepala SMAN 2 Sumatera Barat, Ratna Yulia, mengapresiasi dukungan yang diberikan untuk sekolahnya. Ia menyatakan bahwa sarana penunjang tersebut akan dimanfaatkan untuk kebutuhan akademis para siswa.

"Bantuan ini akan dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung kebutuhan pembelajaran siswa di sekolah," ujar Ratna Yulia, Kamis (15/10).

Menurutnya, ketersediaan fasilitas teknologi yang memadai menjadi salah satu penentu dalam mempermudah siswa menyerap materi pelajaran dan mengembangkan keterampilan digital. **(fai)**



WAKIL *Ketua Komisi V DPRD Sumbar Nurfirmanwansyah bersama Kepala SMAN 2 Sumbar Ratna Yulia meninjau penggunaan 20 unit laptop bantuan aspirasi di ruang laboratorium sekolah.*



SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

KLIPING BERITA

KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
KORAN PADANG	JUMAT, 16 OKTOBER 2026	6

Sri Kumala Dewi Ingatkan Bonus Demografi Berisiko Jadi 'Bom Waktu'

PADANG, KP — Jumlah penduduk usia muda di Sumatera Barat yang mencapai 60 persen berisiko menjadi masalah sosial besar, seperti pengangguran, maraknya judi online, hingga penyalahgunaan narkoba jika pemerintah tidak menyiapkan pembinaan yang memadai.

Peringatan tersebut disampaikan Anggota Komisi V DPRD Sumatera Barat, Sri Kumala Dewi. Ia menekankan pentingnya perhatian pemerintah melalui program pendidikan, sarana olahraga, serta wadah kreativitas bagi generasi muda.

"Pemuda bukan hanya objek pembangunan, pemuda adalah subjek penentu masa depan daerah. Jika negara tidak hadir memberikan perhatian khusus melalui pembinaan olahraga, pendidikan, dan ruang kreativitas, bonus demografi ini akan berubah menjadi bom waktu," kata Sri Kumala Dewi, Kamis (15/10).

Menurutnya, pemuda membutuhkan sarana untuk menyalurkan energi dan bakat melalui kegiatan positif agar tidak terjerumus pada masalah sosial. Oleh karena itu, pemerintah perlu memperkuat program kepemudaan yang memberikan dampak nyata.

Ia menambahkan, pembinaan melalui Peraturan Daerah tentang Olahraga menjadi salah satu acuan penting untuk membangun karakter dan disiplin anak muda. "Perda Olahraga ini adalah bentuk kehadiran negara untuk memastikan pemuda Sumbar tidak kehilangan arah," ujar politisi PDI Perjuangan tersebut. (fai)



SRI KUMALA DEWI



KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
		6

DPRD Sumbar Perkuat Aturan Lingkungan dan Olahraga, Mitigasi Bencana, hingga Prestasi Pemuda Jadi Perhatian

DPRD Sumatera Barat menyepakati dua rancangan peraturan daerah prakarsa dewan, Jumat (16/10). Dua regulasi itu menyangkut perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) serta penyelenggaraan keolahragaan. Isu lingkungan menjadi sorotan karena kerusakan hutan dan perubahan tutupan lahan dinilai memperbesar risiko banjir, banjir bandang, dan tanah longsor.

Kesepakatan diambil dalam rapat paripurna DPRD Sumbar yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Sumbar Nanda Satria, didampingi Ketua DPRD Sumbar Muhidi. Rapat itu dihadiri Gubernur Sumbar Mahyeldi.

Ranperda PPLH merupakan usul prakarsa Komisi IV DPRD Sumbar. Pembaruan regulasi diperlukan untuk menyesuaikan aturan daerah dengan perkembangan peraturan perundang-undangan nasional. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2012 yang selama ini menjadi pedoman dinilai perlu disesuaikan dengan ketentuan terbaru.

Nanda menjelaskan, persoalan lingkungan tidak bisa dipandang sebelah mata karena kerusakan alam dapat meningkatkan risiko bencana. Kerusakan hutan, perubahan tutupan lahan, serta terganggunya fungsi daerah resapan air berpotensi memperbesar ancaman banjir, banjir bandang, dan tanah longsor.

"Persoalan lingkungan bukan sekadar urusan administratif. Kerusakan hutan, perubahan tutupan lahan, serta terganggunya fungsi daerah resapan air berpotensi meningkatkan risiko banjir, banjir bandang, dan tanah longsor," katanya.

Pandangan serupa disampaikan Ketua Komisi IV DPRD Sumbar Doni Arsiva Yandra. Ia menilai degradasi sumber daya alam, kerusakan hutan, perubahan tutupan lahan, dan terganggunya fungsi daerah resapan air harus menjadi perhatian serius dalam penyusunan kebijakan lingkungan hidup.

Menurutnya, penguatan regulasi perlu diikuti tindakan konkret. Ranperda PPLH diharapkan menjadi dasar hukum untuk memperbaiki tata kelola lingkungan sekaligus mendukung mitigasi dan pengurangan risiko bencana di Sumbar.

Sementara itu, Ranperda Penyelenggaraan Keolahragaan merupakan usul prakarsa Komisi V DPRD Sumbar. Ranperda ini disusun untuk menyesuaikan regulasi daerah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan dan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan.

Penguatan aturan itu diharapkan mendorong pembinaan olahraga yang lebih terarah dan berkesinambungan. Generasi muda perlu memperoleh ruang dan kesempatan untuk mengembangkan potensi melalui kegiatan olahraga yang positif, terencana, dan berkelanjutan. Selain meningkatkan kesehatan masyarakat, pembinaan yang konsisten juga menjadi jalan untuk menemukan dan mengembangkan bakat atlet sejak dini.

Ketua Komisi V DPRD Sumbar, Lazuardi Erman mengatakan, salah satu persoalan mendasar yang melatarbelakangi penyusunan Ranperda tersebut adalah keberlanjutan kesejahteraan atlet setelah tidak lagi aktif bertanding.

Menurutnya, selama ini atlet mendapatkan perhatian dan penghargaan ketika berhasil meraih prestasi. Namun, setelah mengakhiri karier olahraga, sebagian atlet masih menghadapi ketidakpastian mengenai masa depan dan kesejahteraannya.

"Pembinaan yang konsisten, kesempatan berolahraga yang lebih luas, serta dukungan terhadap peningkatan prestasi menjadi sasaran penting yang perlu diterjemahkan dalam pelaksanaan kebijakan. Dengan demikian, pembangunan olahraga dapat memberikan manfaat nyata bagi kesehatan masyarakat sekaligus membuka ruang bagi lahirnya atlet berprestasi," ujarnya.

Sebelum disepakati dalam rapat paripurna, kedua Ranperda telah melalui tahapan pengkajian dan harmonisasi oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Sumbar. Proses tersebut melibatkan Komisi IV, Komisi V, tim perumus, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Sumatera Barat, serta organisasi perangkat daerah terkait.

Setelah disepakati sebagai usul prakarsa DPRD, kedua Ranperda akan diproses lebih lanjut sesuai mekanisme pembentukan peraturan daerah yang berlaku. *





...di, Ketua DPRD Sumbar Muhidi, dan Wakil Ketua DPRD Nanda Satria berdiri ...ia Raya pada pembukaan Rapat Paripurna DPRD Sumbar, Jumat (16/10).

...h tempat kejad...
...ok Timur Pasar

...Banj...
...Terim...

...elu- ...asinya ...
...ban- ...terhada...
...atan "Te...
...usat PT Huta...
kepada ...
...ntuk tentu sa...
...atan banjir t...
...am- butuhan...
...ter- la ...
koordin...
...di ganan s...
...kun- bencan...
...len- Se...
...Raju Hendri ...
...ndri sebut ...
pokok ...
...esi- jir. (aku/...



...r Nanda Satria memimpin jalannya rapat paripurna ...d dan Keolahragaan didampingi Ketua DPRD Muhidi.



KETUA Komisi V DPRD Sumbar Lazuardi Erman memaparkan penjelasan dan latar belakang Ranperda Penyelenggaraan Keolahragaan di podium rapat paripurna.



...mbar Dani Arsiva Yandra ...da PPLH kepada pimpinan ... Nanda Satria disaksikan ...ketua DPRD Muhidi.



KETUA Komisi V DPRD Sumbar Lazuardi Erman menyerahkan dokumen draf Ranperda Penyelenggaraan Keolahragaan kepada Wakil Ketua DPRD Nanda Satria usai penyampaian nota penjelasan.



SUASANA Rapat Paripurna DPRD Sumbar saat mendengarkan laporan dan nota penjelasan dua Ranperda prakarsa dewan di Gedung DPRD Sumbar.

...as PRR Kombe...
...rga terdampa...

KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
KORAN PADANG	JUMAT, 16 OKTOBER 2026	C

Perempuan Didorong Punya Pemahaman Politik dan Berani Bersuara



ANGGOTA *DPRD Sumbar Gustami Hidayat berfoto bersama para peserta Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas SDM dan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik Angkatan II di Hotel Rocky Plaza Padang, Kamis (15/10).*

PADANG, KP - Keterlibatan kaum perempuan dalam dunia politik tidak boleh sebatas menjadi pemilih saat pemilu, tetapi juga harus memiliki pemahaman yang baik serta keberani an dalam menentukan arah pembangunan daerah.

Hal itu ditegaskan Anggota DPRD Sumatera Barat dari Fraksi PKS, Gustami Hidayat, saat meng gelar Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas SDM dan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik Angkatan II di Rocky Plaza Hotel Padang, Kamis (15/10).

Menurut Gustami, perempuan memiliki po tensi besar dalam menentukan masa depan daerah. Oleh karena itu, kapasitas SDM perempuan perlu terus ditingkatkan agar mereka lebih percaya diri untuk mengambil peran serta menyampaikan aspirasi masyarakat.

"Perempuan memiliki potensi besar untuk ikut menentukan masa depan daerah. Kita ingin semakin banyak perempuan yang memahami po litik, berani menyampaikan aspirasi, serta mengambil peran dalam pembangunan dan kehidupan demokrasi," ujar Gustami dalam kegiatan yang berlangsung hingga Jumat (16/10) tersebut.

Ia menjelaskan, lewat pelatihan ini para peserta diharapkan mampu menjadi penggerak kesadaran politik di tengah masyarakat serta men jadi pemilih yang cerdas dan kritis pada pemilu mendatang.

Kegiatan yang bersumber dari program pokok-pokok pikiran anggota DPRD Sumbar ini diikuti puluhan peserta kaum perempuan dari berbagai latar belakang. **(fal)**



KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
Haluan	SABTU, 17 OKTOBER 2026	9

Nanda Satria: Kasus Yogi Jadi Pelajaran, Pengusaha Diminta Tertib Perizinan

PADANG, HALUAN — Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), Nanda Satria, mengapresiasi putusan hakim terhadap Yogi, pemuda asal Mentawai, dalam perkara terkait Starlink. Ia berharap keputusan tersebut menjadi momentum bagi semua pihak untuk mengambil pelajaran, terutama mengenai pentingnya ketertiban administrasi dan pemenuhan perizinan sesuai ketentuan yang berlaku.

Nanda Satria menegaskan, persoalan perizinan tidak boleh diabaikan oleh siapa pun yang menjalankan kegiatan usaha. Ia meminta para pengusaha untuk memeriksa kembali kelengkapan dokumen dan legalitas usahanya, termasuk memastikan bahwa penggunaan maupun penyediaan layanan teknologi telah memenuhi ketentuan yang berlaku.

"Saya mengapresiasi putusan hakim terhadap Yogi. Namun, kita juga harus melihat persoalan ini sebagai pembelajaran bersama. Para pengusaha harus lebih tertib dalam mengurus administrasi dan perizinan. Jangan menunggu muncul persoalan hukum baru kemudian melakukan pembenahan," ujar Nanda Satria.

Menurutnya, kepatuhan terhadap aturan merupakan bagian penting dalam membangun iklim usaha yang sehat dan memberikan kepastian hukum. Karena itu, setiap pelaku usaha diharapkan proaktif memastikan seluruh persyaratan yang diwajibkan telah dipenuhi.

"Kalau memang masih ada perizinan yang belum lengkap atau perlu diperbaiki, segera benahi melalui mekanisme yang berlaku. Jangan menganggap persoalan administrasi sebagai hal sepele. Ketertiban perizinan bukan hanya kewajiban, tetapi juga bentuk tanggung jawab pengusaha dalam menjalankan usahanya," tegasnya.

Di sisi lain, Nanda juga mengingatkan bahwa aparat penegak hukum harus dihormati dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Menurutnya, setiap proses hukum perlu disikapi secara dewasa dengan menghormati kewenangan aparat serta mekanisme hukum yang berlaku.

"Kita harus menghormati aparat penegak hukum dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Mereka bekerja berdasarkan kewenangan dan aturan yang berlaku, sehingga proses hukum harus kita sikapi dengan baik. Jika ada hal yang perlu dipertanyakan atau dikoreksi, tentu ada mekanisme hukum yang dapat ditempuh. Jangan sampai kita mengabaikan hukum hanya karena tidak sejalan dengan harapan kita," ungkapnya.

Ia menambahkan, penghormatan terhadap aparat penegak hukum tidak berarti menghilangkan hak masyarakat untuk memperoleh keadilan. Sebaliknya, penghormatan terhadap hukum harus berjalan beriringan dengan prinsip keadilan, transparansi, dan kepastian hukum bagi setiap warga negara.

Nanda berharap, kasus yang dihadapi Yogi dapat menjadi evaluasi bagi pelaku usaha maupun instansi terkait untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai prosedur perizinan. Hal ini dinilai penting, terutama bagi masyarakat di wilayah kepulauan seperti Mentawai, agar informasi mengenai persyaratan administrasi dapat diakses dengan jelas.

"Penegakan hukum harus kita hormati, sementara edukasi dan pembinaan kepada masyarakat juga harus diperkuat. Pemerintah dan instansi terkait perlu memastikan informasi mengenai perizinan tersampaikan dengan baik, sehingga masyarakat memahami apa yang boleh dilakukan, apa persyaratannya, dan bagaimana mengurusnya," katanya.



KLIPING BERITA

Ia menegaskan bahwa kepatuhan terhadap hukum, ketertiban administrasi, serta penghormatan terhadap aparat merupakan tanggung jawab bersama. Dengan demikian, masyarakat tetap memiliki ruang untuk berusaha dan berinovasi tanpa mengabaikan aturan yang berlaku.

"Kita ingin anak-anak muda Sumatera Barat berani berinovasi dan mengembangkan usaha. Tetapi, keberanian itu harus dibarengi dengan pemahaman hukum dan ketertiban administrasi. Hormati proses hukum, benahi perizinan, dan pastikan semua kegiatan usaha berjalan sesuai aturan. Dengan begitu, kepastian hukum dan iklim usaha yang sehat dapat kita bangun bersama," tutup Nanda Satria. (h/len)



Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumber), Nanda Satria



KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
SINGGALANG	Sabtu, 17 Oktober 2026 (5 Jumadil Awal 1448 H)	2

Nanda Satria Apresiasi Putusan Kasus Starlink Mentawai

PADANG - Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), Nanda Satria, mengapresiasi putusan majelis hakim terhadap Yogi, pemuda asal Mentawai, dalam kasus pelanggaran izin operasional Starlink. Nanda menilai vonis tersebut harus menjadi momentum evaluasi, terutama terkait ketertiban administrasi dan pemenuhan perizinan usaha teknologi.

Untuk diketahui, Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Padang menjatuhkan vonis pemaafan (rechterlijk pardon) kepada terdakwa Yogi Gilang Arya Setia.

Dalam sidang putusan yang digelar pada Kamis (15/10), hakim menyatakan Yogi terbukti bersalah melakukan tindak pidana telekomunikasi (menjual kembali layanan internet Starlink tanpa izin usaha resmi). Kendati demikian, Yogi tidak dijatuhi hukuman pidana penjara maupun denda.

Nanda menegaskan, legalitas dan kelengkapan dokumen tidak boleh diabaikan oleh pelaku usaha mana pun. Ia meminta pengusaha proaktif memeriksa kembali dokumen usaha mereka, termasuk memastikan penyediaan layanan teknologi telah memenuhi regulasi.

"Saya mengapresiasi putusan hakim terhadap Yogi. Kasus ini harus menjadi pelajaran bersama. Pengusaha harus tertib mengurus administrasi dan perizinan dari awal, jangan menunggu muncul persoalan hukum baru berbenah," ujar Nanda di Padang, Jumat (16/10).

Menurut politisi muda ini, kepatuhan terhadap aturan merupakan pilar utama untuk membangun iklim usaha yang sehat sekaligus memberikan kepastian hukum.

"Jika perizinan belum lengkap, segera benahi melalui mekanisme resmi. Jangan sepelekan urusan administrasi. Ketertiban izin adalah bentuk tanggung jawab pengusaha," tegasnya.

Di sisi lain, Nanda mengingatkan semua pihak untuk menghormati aparat penegak hukum yang menjalankan tugas.

Menurutnya, proses hukum harus disikapi secara dewasa dengan tetap memanfaatkan koridor hukum jika terdapat keberatan.

"Aparat bekerja berdasarkan kewenangan dan undang-undang. Kita harus menghormatinya. Jika ada yang perlu dikoreksi, tempuh mekanisme hukum yang sah, bukan dengan mengabaikan aturan," kata Nanda.

Kendati demikian, ia menambahkan bahwa penghormatan terhadap aparat hukum tidak menghilangkan hak masyarakat dalam memperoleh keadilan. Keduanya harus berjalan beriringan dengan prinsip transparansi dan kepastian hukum.

Lebih lanjut, Nanda berharap kasus Yogi memicu instansi terkait untuk menggencarkan edukasi prosedur perizinan, khususnya di wilayah kepulauan seperti Mentawai, agar akses informasi lebih merata.

"Pemerintah dan instansi terkait wajib memperkuat pembinaan. Pastikan informasi perizinan tersampaikan dengan jelas, sehingga masyarakat tahu batasan regulasi dan cara mengurusnya," tuturnya.

Nanda mendukung penuh inovasi anak muda di Sumbar dalam mengembangkan usaha. Namun, ia menekankan bahwa keberanian berinovasi wajib dibarengi dengan pemahaman hukum yang kuat.

"Kita ingin pemuda Sumbar berani berinovasi. Tetapi, keberanian itu harus berjalan di atas koridor hukum dan ketertiban administrasi," pungkasnya.(401)



KLIPING BERITA



Wakil Ketua DPRD Sumbar, **Nanda Satria**.



SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
KLIPING BERITA

KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
SINGGALANG	Sabtu, 17 Oktober 2026 (5 Jumadil Awal 1448 H)	9

DPRD Sumbar Tetapkan Dua Ranperda Sebagai Usul Prakarsa

PADANG - SINGGALANG

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) menetapkan dua rancangan peraturan daerah (ranperda) sebagai usul prakarsa DPRD saat rapat paripurna, Jumat (16/10) di gedung dewan setempat.

Kedua ranperda tersebut yakni ranperda tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta ranperda tentang penyelenggaraan keolahragaan.

Wakil Ketua DPRD Sumbar, Nanda Satria saat memimpin rapat paripurna itu mengatakan dua ranperda tersebut merupakan ranperda yang telah masuk dalam daftar program pembentukan perda (Propemperda) Sumbar Tahun 2026.

"Untuk tahun 2026, DPRD memiliki lima ranperda usul prakarsa. Kedua ranperda yang ditetapkan hari ini merupakan dua diantaranya," ujar Nanda.

Kedua Ranperda tersebut menyasar persoalan strategis dalam pembangunan daerah. Regulasi lingkungan diharapkan memperkuat upaya menjaga kelestarian alam dan mengurangi risiko bencana. Sementara itu, aturan keolahragaan diarahkan untuk memperkuat pembinaan generasi muda, memperluas partisipasi masyarakat dalam berolahraga, serta mendorong lahirnya atlet berprestasi yang mampu mengharumkan nama daerah.

Nanda Satria menjelaskan, selama ini, penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Sumbar berpedoman pada perda Nomor 14 Tahun 2012.

Namun, seiring dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, termasuk perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, serta terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2025 tentang Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, terdapat perkembangan mendasar dalam pengaturan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Perkembangan tersebut antara lain mencakup penyesuaian mekanisme perizinan lingkungan melalui persetujuan lingkungan dan integrasinya dengan perizinan berusaha berbasis risiko.

"Kondisi ini mengutut penyesuaian terhadap Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2012 agar tetap selaras dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat," kata Nanda.

Ranperda tentang PPLH merupakan usul prakarsa Komisi IV DPRD Sumbar. Pembaruan regulasi diperlukan untuk menyesuaikan aturan daerah dengan perkembangan peraturan perundang-undangan nasional. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2012 yang selama ini menjadi pedoman dinilai perlu disesuaikan dengan ketentuan terbaru.

Menurut Nanda, persoalan lingkungan tidak bisa dipandang sebelah mata karena kerusakan alam dapat meningkatkan risiko bencana. Kerusakan hutan, perubahan tutupan lahan, serta terganggunya fungsi daerah resapan air berpotensi memperbesar ancaman banjir, banjir bandang, dan tanah longsor.

"Persoalan lingkungan bukan sekadar urusan administratif. Kerusakan hutan, perubahan tutupan lahan, serta terganggunya fungsi daerah resapan air berpotensi meningkatkan risiko banjir, banjir bandang, dan tanah longsor," katanya.

Karena itu, penguatan regulasi lingkungan diharapkan menjadi landasan bagi pengelolaan sumber daya alam yang lebih bertanggung jawab. Upaya tersebut tidak hanya bertujuan menjaga kelestarian alam, tetapi juga memperkuat mitigasi bencana dan melindungi masyarakat dari dampak kerusakan lingkungan.

Pandangan serupa disampaikan Ketua Komisi IV DPRD Sumbar, Doni Arsiva Yandra. Ia menilai degradasi sumber daya alam, kerusakan hutan, perubahan tutupan lahan, dan terganggunya fungsi daerah resapan air harus menjadi perhatian serius dalam penyusunan kebijakan lingkungan hidup.

Menurutnya, penguatan regulasi perlu diikuti langkah konkret dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan. Dengan demikian, Ranperda PPLH diharapkan menjadi landasan hukum untuk memperbaiki tata kelola lingkungan sekaligus mendukung upaya mitigasi dan pengurangan risiko bencana di Sumbar.

Di sisi lain, ranperda tentang penyelenggaraan keolahragaan merupakan usul prakarsa Komisi V DPRD Sumbar. Ranperda ini disusun untuk menyesuaikan regulasi daerah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022



tentang Keolahragaan dan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan.

Nanda menjelaskan kepemudaan dan olahraga merupakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (2) huruf m Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Pembangunan keolahragaan pada hakikatnya bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia, baik secara jasmani, rohani, maupun sosial, sekaligus mewujudkan masyarakat yang sehat, sejahtera, dan berkarakter.

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan yang menggantikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, serta terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan, diperlukan penyesuaian terhadap regulasi daerah agar selaras dengan kebijakan keolahragaan nasional.

"Penyelenggaraan keolahragaan di Sumbar selama ini berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017. Oleh sebab itu, pembentukan peraturan daerah yang baru diperlukan agar penyelenggaraan keolahragaan di Sumbar mampu menjawab tantangan pembangunan olahraga pada masa mendatang," katanya.

Nanda berharap melalui pembentukan perda ini mendorong pembinaan olahraga yang lebih terarah dan berkesinambungan. Generasi muda perlu memperoleh ruang dan kesempatan untuk mengembangkan potensi melalui kegiatan olahraga yang positif, terencana, dan berkelanjutan.

Selain meningkatkan kesehatan masyarakat, pembinaan yang konsisten juga menjadi jalan untuk menemukan dan mengembangkan bakat atlet sejak dini. Dengan dukungan kebijakan yang tepat, Sumbar diharapkan mampu meningkatkan daya saing atlet dan melahirkan prestasi di tingkat daerah, nasional, hingga internasional.

Ketua Komisi V DPRD Sumbar, Lazuardi Erman, mengatakan salah satu persoalan mendasar yang melatarbelakangi penyusunan Ranperda tersebut adalah keberlanjutan kesejahteraan atlet setelah tidak lagi aktif bertanding.

Menurutnya, selama ini atlet mendapatkan perhatian dan penghargaan ketika berhasil meraih prestasi. Namun, setelah mengakhiri karier olahraga, sebagian atlet masih menghadapi ketidakpastian mengenai masa depan dan kesejahteraannya.

Karena itu, pembangunan olahraga tidak seharusnya hanya berorientasi pada perolehan medali dan pencapaian prestasi. Pemerintah daerah juga perlu menghadirkan kebijakan yang memberikan perlindungan, penghargaan, serta kepastian masa depan bagi atlet atas kontribusi yang telah mereka berikan kepada daerah.

"Pembinaan yang konsisten, kesempatan berolahraga yang lebih luas, serta dukungan terhadap peningkatan prestasi menjadi sasaran penting yang perlu diterjemahkan dalam pelaksanaan kebijakan. Dengan demikian, pembangunan olahraga dapat memberikan manfaat nyata bagi kesehatan masyarakat sekaligus membuka ruang bagi lahirnya atlet berprestasi," ujarnya.

Melalui Ranperda tersebut, diharapkan terbangun sistem pembinaan olahraga yang lebih komprehensif, mulai dari pengembangan bakat, peningkatan kualitas atlet, hingga pemberian penghargaan dan perhatian terhadap kesejahteraan mereka setelah tidak lagi aktif bertanding.

Sebelum disepakati dalam rapat paripurna, kedua Ranperda telah melalui tahapan pengkajian dan harmonisasi oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Sumbar. Proses tersebut melibatkan Komisi IV, Komisi V, tim perumus, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Sumatera Barat, serta organisasi perangkat daerah terkait.

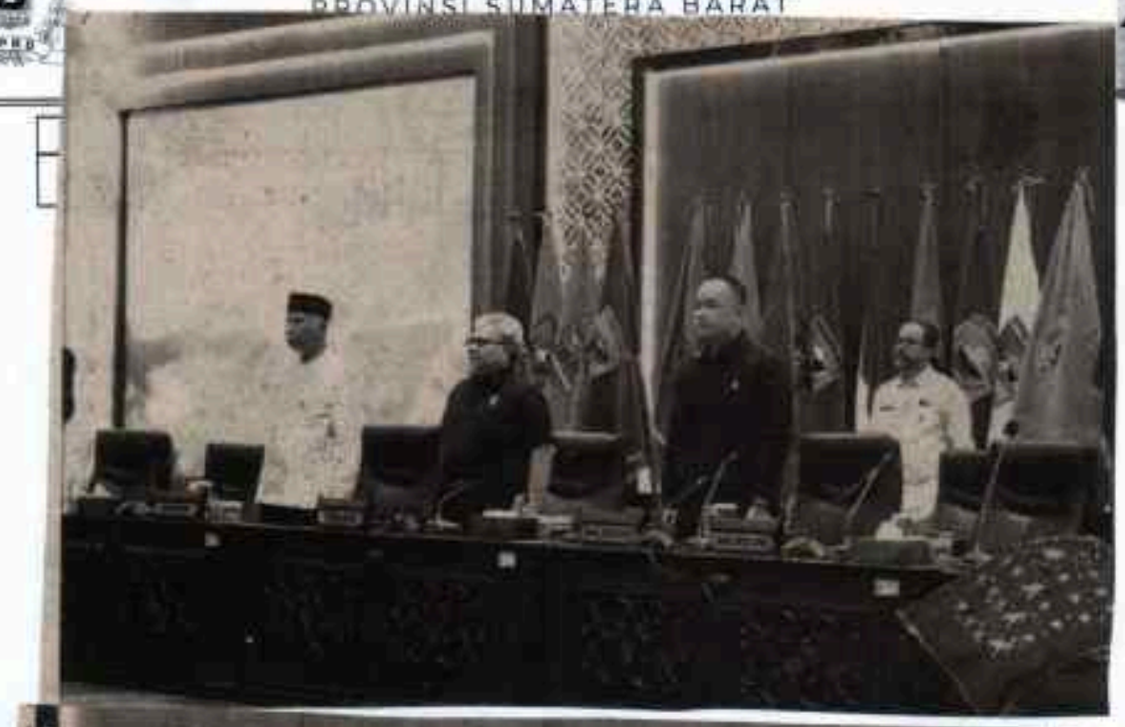
Setelah disepakati sebagai usul prakarsa DPRD, kedua Ranperda akan diproses lebih lanjut sesuai mekanisme pembentukan peraturan daerah yang berlaku. Tahapan berikutnya diharapkan menghasilkan regulasi yang tidak hanya kuat secara hukum, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan masyarakat.

Melalui dua Ranperda tersebut, DPRD Sumbar mendorong penguatan kebijakan yang berorientasi pada keselamatan masyarakat dan masa depan generasi muda. Perlindungan lingkungan menjadi bagian penting dalam mengurangi risiko bencana, sedangkan pembinaan olahraga diharapkan membuka lebih banyak kesempatan bagi generasi muda untuk mengembangkan potensi, meningkatkan prestasi, dan memperoleh masa depan yang lebih terjamin. (*)





SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT















NEWS
BREAKING
NEWS

KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
KORAN PADANG	SABTU, 17 OKTOBER 2026	4

Soal Kasus Starlink Mentawai, Nanda Satria Ingatkan Pentingnya Izin Usaha


NANDA SATRIA

PADANG, KP — Wakil Ketua DPRD Sumbar, Nanda Satria, meminta para pelaku usaha untuk lebih tertib melengkapi dokumen perizinan sebelum menjalankan kegiatan bisnis. Pernyataan tersebut disampaikan Nanda Satria merespons putusan hakim terhadap Yogi Gilang Arya Setia, pemuda asal Mentawai, dalam perkara penjualan ulang layanan internet Starlink, Jumat (16/10).

Diketahui, Majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Padang menyatakan terdakwa Yogi Gilang Arya Setia bersalah, namun majelis hakim memberikan putusan pemaafan tanpa menjatuhkan pidana, Kamis (15/10).

Nanda Satria mengapresiasi putusan hakim tersebut dan berharap peristiwa ini menjadi pelajaran penting bagi masyarakat maupun dunia usaha.

"Para pengusaha harus lebih tertib dalam mengurus administrasi dan perizinan. Jangan menunggu muncul persoalan hukum baru kemudian melakukan pembenahan," ujar Nanda Satria.

Ia mengingatkan, kelengkapan administrasi bukan sekadar formalitas, melainkan bentuk kepatuhan hukum yang wajib dipenuhi agar iklim usaha tetap sehat dan berkepastian.

Selain menekankan ketertiban izin, Nanda meminta masyarakat tetap menghormati proses penegakan hukum yang dijalankan aparat. Di sisi lain, pemerintah daerah dan instansi terkait juga didorong untuk memperkuat edukasi mengenai prosedur perizinan, khususnya bagi warga di wilayah kepulauan seperti Mentawai.

"Kita ingin anak-anak muda Sumatera Barat berani berinovasi dan mengembangkan usaha. Tetapi keberanian itu harus dibarengi dengan pemahaman hukum dan ketertiban administrasi," tegasnya. **(fai)**



SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

KLIPING BERITA

KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
Padang Ekspres	SABTU 17 OKTOBER 2025	7

Muhidi: Guru Penentu Nasib Indonesia 2045

MASA depan Indonesia 2045 tidak hanya ditentukan oleh kebijakan hari ini, tetapi juga oleh kualitas generasi yang sedang duduk di bangku sekolah. Di titik inilah guru memegang peran krusial: bukan sekadar mentransfer ilmu, melainkan membentuk karakter, menanamkan adab, dan menyiapkan anak-anak menghadapi perubahan zaman.

Ketua DPRD Sumbar Muhidi menegaskan pentingnya peran tersebut saat memberikan arahan dalam Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan Kompetensi Guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Provinsi Sumbar, Selasa (6/10).

Menurut Muhidi, tantangan pendidikan di tengah disrupsi global menuntut guru melampaui rutinitas mengajar. Penguasaan materi pelajaran saja tidak cukup jika tidak mampu membentuk pola pikir, karakter, dan kompetensi peserta didik untuk menghadapi kehidupan nyata.

"Pendidik adalah agen perubahan. Kita harus mampu mengubah pola pikir peserta didik, membangun karakter dan adab, serta mengolah ilmu menjadi kompetensi yang bermanfaat," ulas Muhidi.

Pesan itu menempatkan guru pada tanggung jawab yang lebih besar daripada sekadar menuntaskan kurikulum. Sekolah harus menjadi tempat siswa membangun kepercayaan diri, mengasah daya juang, dan mengembangkan potensi. Namun, tanggung jawab tersebut tidak bisa dipikul guru sendirian.

Muhidi menekankan perlunya keterlibatan orang tua dan masyarakat dalam membangun lingkungan yang mendukung tumbuh kembang anak. Tanpa komunikasi dan kerja sama yang baik, pembentukan karakter berisiko berhenti sebagai program sekolah, bukan kebiasaan yang hidup dalam keseharian.

"Mengelola anak-anak tidak bisa sendiri. Kebersamaan, silaturahmi, dan komunikasi yang baik menjadi kunci pembangunan hal-hal positif," katanya.

Muhidi mengingatkan, menuju satu abad kemerdekaan Indonesia pada 2045, bonus demografi harus diimbangi kualitas sumber daya manusia. Besarnya jumlah penduduk usia produktif tidak dengan sendirinya menjadi keunggulan jika tidak ditopang pendidikan, karakter, dan kemampuan beradaptasi.

Generasi masa depan, ujarnya, harus memiliki kecerdasan akademik, iman yang kuat, akhlak mulia, wawasan luas, serta kesiapan menghadapi perubahan tanpa kehilangan nilai-nilai dasar.

Kualitas manusia juga menentukan apakah kekayaan sumber daya alam Indonesia mampu diolah menjadi kekuatan ekonomi yang memberi manfaat bagi masyarakat. Artinya, pendidikan bukan semata urusan ruang kelas, melainkan fondasi bagi daya saing dan masa depan bangsa.

Karena itu, Muhidi mendorong guru PPPK terus meningkatkan kompetensi sekaligus memperkuat keteladanan melalui sikap dan disiplin sehari-hari. Pelatihan harus bermuara pada kualitas pembelajaran dan pembentukan karakter siswa, bukan berhenti pada kegiatan formal.

"Guru hari ini sedang menyiapkan generasi yang menentukan wajah Indonesia pada 2045. Tugas besar ini harus dijalankan dengan ilmu, keteladanan, dan kebijaksanaan," ujarnya. (*)





SUASANA Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan Kompetensi Guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Provinsi Sumbar, Selasa (6/10).



KETUA DPRD Sumbar Muhidi memberikan arahan dalam bimtek Peningkatan Kompetensi Guru PPPK Provinsi Sumbar, Selasa (6/10).



KETUA DPRD Sumbar Muhidi bersama peserta Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan Kompetensi Guru Pega

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
KLIPING BERITA

KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
Padang Ekspres	SABTU 17 OKTOBER 2026	8

Donizar Desak Pemerintah Lindungi Warga

Kabut Asap Kepung Sumbar, Hentikan Pembakaran Lahan

Padang, Padek—Kabut asap kiriman dari kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di provinsi tetangga mulai menyelimuti wilayah Sumatera Barat (Sumbar).

Bahkan bau asap menyengat sudah mulai tercium di Pasaman, sementara warga mulai mengenakan masker saat beraktivitas.

Di tengah kondisi tersebut, Anggota DPRD Sumbar yang juga Sekretaris DPW Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Sumbar, Donizar, meminta pemerintah provinsi dan kabupaten kota yang terpapar agar tidak lengah dalam melindungi keselamatan warga. Ia juga mengimbau masyarakat dan seluruh pihak untuk menghentikan praktik pembakaran lahan yang berpotensi memicu karhutla.

Donizar, yang berasal dari Dapil IV (Pasaman dan Pasaman Barat) ini menegaskan, penanganan kabut asap tidak boleh hanya berfokus pada dampak yang sudah dirasakan masyarakat. Pemerintah daerah perlu memastikan kesiapan layanan kesehatan, ketersediaan masker, serta langkah perlindungan bagi warga yang terpapar asap. Anak-anak, lanjut usia (lansia), dan ibu hamil harus diempatkan sebagai kelompok prioritas dalam upaya penanganan.

"Pemerintah daerah harus memperhatikan keselamatan warga. Kesiapan layanan kesehatan mesti terjamin, terutama bagi masyarakat yang terdampak kabut asap," tegas Donizar.

Ia meminta pemerintah daerah bergerak sesuai perkembangan kondisi di lapangan. Ketersediaan masker, kesiapan fasilitas kesehatan, dan kemudahan masyarakat memperoleh pertolongan medis perlu menjadi perhatian, terutama jika paparan asap semakin meluas.

Menurut Donizar, anak-anak tidak boleh luput dari perhatian karena mereka membutuhkan perlindungan khusus ketika kualitas udara memburuk. Begitu pula lansia dan ibu hamil yang perlu mendapatkan perhatian dalam upaya mengurangi risiko paparan asap.

"Anak-anak harus menjadi skala prioritas. Termasuk juga lansia dan ibu hamil. Keselamatan masyarakat harus benar-benar diperhatikan," ujarnya.

Ia menekankan, pemerintah daerah perlu memastikan masyarakat terdampak tidak menghadapi situasi ini tanpa perlindungan yang memadai. Kesiapan pelayanan kesehatan harus berjalan seiring dengan pemantauan kondisi udara dan penyampaian informasi kepada masyarakat mengenai langkah-langkah mengurangi paparan asap.

Jangan Bakar Lahan

Di sisi lain, Donizar yang sebelumnya dengan slogan "Politik Tanggung Jawab" ini mengingatkan bahwa upaya menghadapi kabut asap tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah. Masyarakat, pelaku usaha, dan seluruh pihak yang melakukan aktivitas pembukaan lahan diminta menghindari pembakaran yang dapat memicu kebakaran hutan dan lahan.

Ia mengajak masyarakat untuk mengutamakan cara pembukaan lahan yang tidak menggunakan api. Imbauan tersebut disampaikan agar aktivitas pembukaan lahan tidak menimbulkan kebakaran yang dampaknya dapat meluas hingga ke wilayah lain.

"Kami mengajak dan mengingatkan masyarakat maupun pihak mana pun untuk tidak melakukan pembakaran dalam membuka lahan," tegasnya.

Ia juga mengingatkan, dampak karhutla tidak berhenti di lokasi kebakaran. Asap yang terbawa angin dapat menyebar melintasi batas wilayah dan mengganggu kehidupan masyarakat di daerah lain. Karena itu, setiap pihak diminta bertanggung jawab atas aktivitas yang berpotensi menimbulkan kebakaran.

Ia juga mengajak masyarakat untuk tidak menganggap pembakaran lahan sebagai persoalan sepele. Pencegahan perlu dimulai dari kesadaran setiap orang untuk tidak menyalakan api dalam kegiatan pembukaan lahan, sekaligus ikut menjaga lingkungan agar tidak terjadi kebakaran yang merugikan banyak pihak.

Menurutnya, seluruh elemen masyarakat perlu mengambil bagian dalam pencegahan karhutla. Kesadaran bersama dan kepatuhan terhadap upaya pencegahan menjadi bagian penting untuk menekan risiko kebakaran serta menghindari berulangnya persoalan kabut asap.

Donizar turut menyoroti dampak karhutla terhadap kehidupan masyarakat, termasuk masyarakat adat yang ruang hidupnya dapat terancam akibat kebakaran hutan dan lahan. Persoalan ini, menurut sikap yang disampaikannya, bukan semata-mata menyangkut kerusakan lingkungan, melainkan juga keselamatan warga dan keberlangsungan kehidupan masyarakat yang bergantung pada wilayah tersebut. "Kebakaran merampas ruang hidup masyarakat adat. Partai Kebangkitan Bangsa berdiri bersama masyarakat," katanya.

Pernyataan tersebut menegaskan sikap PKB Sumbar untuk berpihak pada masyarakat yang terdampak persoalan karhutla. Donizar mengajak seluruh pihak menempatkan keselamatan manusia dan perlindungan ruang hidup masyarakat sebagai perhatian dalam upaya pencegahan maupun penanganan kebakaran.

Ia meminta agar kepentingan masyarakat tidak diabaikan ketika kebakaran dan kabut asap terjadi. Selain penanganan kesehatan bagi warga terdampak, pencegahan sumber kebakaran juga harus menjadi perhatian agar masyarakat tidak terus menanggung dampak yang sama.

Pasaman Diselimuti Asap

Sementara itu, berdasarkan pantauan awak media di Pasaman beberapa hari terakhir, kabut asap telah menyelimuti wilayah tersebut. Bau asap terasa menyengat hidung dan sejumlah warga mulai mengenakan masker saat beraktivitas.

Kondisi itu menjadi perhatian untuk meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap paparan asap. Warga dimbau mengurangi aktivitas di luar ruangan apabila kondisi udara memburuk, menggunakan masker yang sesuai, serta mencari pertolongan medis jika [illegible] kese[illegible]



0751 7057591

KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
		2

Iqra Chissa Ajak Masyarakat Perkuat Ketahanan Keluarga

PADANG, HALUAN — Wakil Ketua DPRD Sumatera Barat, Iqra Chissa, mengajak masyarakat memperkuat ketahanan keluarga dalam menghadapi tantangan sosial dan perkembangan teknologi digital.

Ajakan tersebut disampaikannya saat menyosialisasikan Peraturan Daerah (Perda) Sumatera Barat Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga. Kegiatan berlangsung di Gedung Pertemuan DPD Golkar Kota Padang, Minggu (18/10).

Menurut Iqra, keluarga memiliki peran penting dalam membentuk karakter anak, menjaga keharmonisan rumah tangga, dan membangun masyarakat sejahtera.

Ia menilai, orang tua perlu memberikan perhatian terhadap tumbuh kembang anak. Pengawasan penggunaan teknologi informasi juga menjadi bagian penting dalam menjaga ketahanan keluarga.

"Ketahanan keluarga harus dimulai dari lingkungan rumah. Orang tua perlu membangun komunikasi yang baik, memberikan teladan, dan mendampingi anak dalam menghadapi perkembangan zaman," ujar Iqra.

Ia menjelaskan, kemajuan teknologi informasi memberikan banyak manfaat bagi masyarakat. Namun, kemudahan akses terhadap berbagai konten digital juga menghadirkan tantangan bagi perkembangan anak.

Karena itu, Iqra mengingatkan orang tua agar aktif mengawasi aktivitas digital anak. Pendampingan perlu dilakukan melalui komunikasi terbuka dan pendekatan yang sesuai dengan usia anak.

Menurutnya, keluarga tidak cukup hanya memenuhi kebutuhan ekonomi. Orang tua juga perlu menyediakan waktu berkualitas, membangun kedekatan emosional, dan menanamkan nilai moral sejak dini.

Iqra turut mendorong masyarakat memanfaatkan program pemerintah daerah untuk memperkuat ekonomi keluarga. Dukungan tersebut diharapkan membantu keluarga memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan kesejahteraan.

Ia juga menyoroti pentingnya perhatian terhadap perempuan yang menjadi kepala keluarga. Akses terhadap pelatihan keterampilan dan pemberdayaan ekonomi dapat membuka peluang bagi mereka untuk meningkatkan kemandirian.

"Penguatan keluarga harus berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Keluarga yang kuat membutuhkan lingkungan yang mendukung, akses terhadap kesempatan ekonomi, dan perhatian dari pemerintah," katanya.

Iqra menilai, Perda Sumatera Barat Nomor 17 Tahun 2018 dapat menjadi landasan untuk memperkuat peran keluarga di tengah masyarakat.

Pelaksanaan kebijakan tersebut membutuhkan sinergi pemerintah daerah, lembaga terkait, dan masyarakat. Dengan demikian, program ketahanan keluarga dapat memberikan manfaat nyata bagi warga.

Ia juga menekankan pentingnya pola pengasuhan yang positif. Orang tua perlu menghindari perkataan yang merendahkan anak, terutama ketika menghadapi persoalan keluarga. (h/len)



KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
KORAN PADANG	SENIN, 19 OKTOBER 2026	2

Sumbar Didesak Bantu Daerah Tetangga Padamkan Karhutla


ALBERT HENDRA LUKMAN

PADANG, KP — Penanganan kabut asap kiriman akibat kebakaran hutan dan lahan yang tamban memicu sorotan tajam Anggota DPRD Sumatera Barat, Albert Hendra Lukman. Ia mendesak Gubernur Sumbar beserta para bupati dan wali kota agar bersurat ke provinsi tetangga untuk menawarkan bantuan pemadaman api secara gotong royong.

Sikap diam para pejabat di Sumbar menyikapi buruknya indeks kualitas udara dinilai sangat memprihatinkan. Pemprov Sumbar maupun pemerintah kabupaten dan kota yang terdampak di minta bergerak aktif menjalin koordinasi lintas daerah demi memadamkan titik api di sumbernya.

"Kabut asap kiriman dari provinsi tetangga membuat kualitas udara di Sumbar tidak baik. Harus ada protes dari kepala daerah kita kepada pemerintah provinsi tetangga. Kita ambil contoh di Kabupaten Dharmasraya, mana bupatinya? Harusnya surati Provinsi Jambi," ujar Albert, Sabtu (18/10).

Ia menilai, penanganan paparan polusi udara tidak bisa diselesaikan sebatas mengumumkan penurunan kualitas udara dan memberlakukan pembelajaran jarak jauh (PJJ) bagi siswa sekolah. Apalagi, kegiatan olahraga seperti Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) tetap digelar di tengah pekatnya kabut asap.

Menurutnya, solidaritas antardaerah perlu diwujudkan lewat tindakan nyata, seperti mengirimkan relawan pemadam kebakaran. Terlebih, Sumbar juga kerap menerima bantuan dari daerah lain ketika dilanda bencana alam.

"Api ini harus dipadamkan. Harus ada kerja sama dan sinergi, jangan ego sektoral yang dipelihara. Semestinya kita juga bisa membantu daerah lain yang sedang menghadapi bencana," kata Ketua Fraksi PDI Perjuangan dan PKB DPRD Sumbar tersebut.

Selain menawarkan bantuan pemadaman, Albert menyayangkan belum adanya aksi pembagian masker secara masif oleh Pemprov Sumbar maupun Pemko Padang kepada masyarakat. Pemerintah daerah juga diminta memberikan penjelasan ilmiah terkait keamanan air hujan yang ditampung warga selama kabut asap berlangsung.

Ia menambahkan, jika kabut asap kiriman terus terjadi, gubernur semestinya membawa persoalan ini ke pemerintah pusat agar dicarikan solusi permanen.

Ia juga mendesak Pemprov Sumbar segera menggelar rapat koordinasi bersama bupati dan wali kota guna merumuskan tindakan penanganan terpadu.

"Persoalan polusi udara ini tidak bisa kita anggap enteng. Pemerintah harus mengambil tindakan cepat. Jangan biarkan masyarakat berjuang sendiri menghadapi masalah ini tanpa merasakan kehadiran pemerintah," tegas Albert yang juga Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Padang. **(fai)**



KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
KORAN PADANG	SENIN, 19 OKTOBER 2026	9

Polemik Gelar Datuak, DPRD Sumbar Sosialisasikan Perda Lembaga Adat

LIMAPULUH KOTA, KP - Kontroversi pengukuhan gelar Datuak kepada sosok yang dinilai tidak memenuhi syarat sesuai norma agama dan adat Minangkabau di Jorong Ulu Aia, Kecamatan Harau, Kabupaten Limapuluh Kota, memicu protes dan keresahan di tengah masyarakat adat. Peristiwa tersebut dinilai melanggar tatanan adat Minangkabau.

Merespons polemik itu, Anggota DPRD Sumatera Barat, Ilson Cong Dt. Mangguang, menggelar Sosialisasi Peraturan Daerah (Sosper) Perda Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penguatan Lembaga Adat dan Pelestarian Nilai Budaya Minangkabau, di Gedung Pertemuan IPHI Kabupaten Limapuluh Kota, Tanjung Pati, Minggu (18/10).

Kegiatan tersebut dihadiri ratusan pemangku adat, alim ulama, cadiak pandai, bundo kanduang, serta tokoh masyarakat. Ilson Cong menegaskan, prosesi adat seperti yang telah terjadi itu tidak sah dan tidak boleh terulang kembali di Ranah Minang.

"Kita sangat menyayangkannya, apalagi menggunakan baju kebesaran adat Minangkabau. Jika hal tersebut terus dibiarkan akan menjadi preseden buruk ke depannya bagi masyarakat Minangkabau. Kita sudah melahirkan petisi dan rekomendasi terkait kondisi yang terjadi," kata Ilson Cong.

Ketua Forum Revitalisasi Kedaulatan Masyarakat Adat Minangkabau Luak Limopuluah, Ferizal Ridwan mengungkapkan, membenarkan bahwa kontroversi pemberian gelar adat tersebut memicu perdebatan luas di tengah masyarakat. Pihaknya mendesak pemerintah daerah memberikan pembinaan tegas.

Sementara itu, Sekretaris Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat, Fadli Junaidi, turut menyayangkan peristiwa di Nagari Ulu Aia tersebut. Ia meminta pemangku adat dan masyarakat menjaga keutuhan nilai budaya agar kejadian serupa tidak terulang.

Camat Harau Faizil Aziz mengapresiasi langkah sosialisasi aturan daerah ini. Menurutnya, Perda Adat sejatinya sudah disahkan sejak lama, namun pemahaman masyarakat masih perlu terus ditingkatkan.

Acara sosialisasi tersebut turut dihadiri mantan Ketua DPRD Kabupaten Limapuluh Kota Deni Asra dan Ismardi, serta Kakan Kesbangpol Limapuluh Kota Dedi Permana. **(dst)**



KLIPING BERITA



ANGGOTA *DPRD Sumbar Ilson Cong Dt. Mongguang memberikan arahan saat Sosialisasi Perda Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penguatan Lembaga Adat dan Pelestarian Nilai Budaya Minangkabau di Gedung IPHI Kabupaten Limapuluh Kota, Tanjung Pati, Minggu (18/10).*



KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
Padang Ekspres	SENIN 19 OKTOBER 2026	10

Ajak Warga Perkuat Ketahanan Keluarga di Era Digital

Padang, Padek—Wakil Ketua DPRD Sumbar, Muhammad Iqra Chissa Putra, mengajak masyarakat memperkuat ketahanan keluarga untuk menghadapi tantangan sosial, ekonomi, dan perkembangan teknologi digital.

Ajakan tersebut disampaikan Iqra saat menyosialisasikan Peraturan Daerah (Perda) Sumbar Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga di Gedung Pertemuan DPD Partai Golkar Kota Padang, Minggu (18/10).

Iqra yang juga menjabat Ketua DPD Partai Golkar Kota Padang itu mengatakan, keluarga memiliki peran penting sebagai tempat anggota keluarga saling mengenalkan, memberikan komunikasi, dan membudayakan berbagai perubahan.

"Keluarga adalah rumah yang pertama untuk kenal tempat kita berkembang, tempat kita belajar, berkomunikasi, saling menghargai, dan menanamkan nilai-nilai yang baik. Jika berhasil ini gagal, maka akan berdampak luas pada kehidupan sosial dan bernegara," ujar Iqra.

Menurutnya, ketahanan keluarga tidak hanya diukur dari kemampuan memenuhi kebutuhan materi. Ketahanan juga mencakup kemampuan keluarga pola pengasuhan anak, komunikasi yang sehat, serta kemampuan menyelesaikan persoalan bersama yang menjadi fokus penting.

Ia menilai, keluarga merupakan lingkungan pertama bagi anak untuk mengenal nilai moral, membangun kepercayaan dan belajar berinteraksi dengan orang lain. Karena itu, orang tua perlu menciptakan suasana rumah yang nyaman agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal.



SOSIALISASI: Wakil Ketua DPRD Sumbar, Muhammad Iqra Chissa Putra saat kegiatan sosialisasi Perda Sumbar Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga di Gedung Pertemuan DPD Partai Golkar Padang, Minggu (18/10).

Dalam sosialisasi tersebut, Iqra turut menyoroti tantangan pengasuhan anak di tengah perkembangan teknologi digital. Kemudahan mengakses berbagai informasi melalui perangkat digital memberikan manfaat bagi pendidikan dan aktivitas sehari-hari. Namun, tanpa pendampingan yang tepat, anak juga berisiko terpapar konten yang tidak sesuai dengan usia dan kebutuhannya.

Karena itu, ia mengingatkan orang tua agar lebih peduli terhadap aktivitas anak, termasuk ketika mengakses perangkat digital.

Menurutnya, pengawasan tidak cukup dilakukan dengan membatasi penggunaan gawai. Orang tua juga perlu memberikan komunikasi terbuka, memberikan teladan, dan menerapkan pola pengasuhan yang sesuai dengan perkembangan anak.

Iqra menambahkan, perhatian terhadap anak tidak cukup diwujudkan melalui pemenuhan kebutuhan pendidikan dan ekonomi keluarga, tetapi juga harus diimbangi dengan kehadiran orang tua secara emosional. orang tua juga diharapkan untuk menunjukkan kedekatan serta perhatian dalam keluarga.

Anak perlu diberikan ruang untuk mengungkapkan perasaan yang dirasakannya tanpa takut dihakimi atau dicela. Oleh sebab itu, orang tua diharapkan mampu hadir perhatian yang dapat membuka percakapan anak, termasuk ketika menghadapi persoalan remeh hingga.

Komunikasi yang sehat dan pola pengasuhan positif diharapkan membantu anak membentuk kepercayaan diri, mengembangkan karakter yang baik, serta memperkuat hubungan dengan orang tua.

Selain pola pengasuhan, Iqra menyoroti persoalan ekonomi sebagai salah satu aspek yang memengaruhi ketahanan rumah tangga.

Menurutnya, keluarga perlu memiliki kemampuan mengelola keuangan dan memanfaatkan peluang usaha agar dapat memenuhi kebutuhan hidup secara berkelanjutan.

Perhatian khusus juga perlu diberikan kepada pemerataan yang menjadi kepala keluarga. Akses terhadap pelatihan keterampilan, pemberdayaan ekonomi, dan perlunya usaha dinilai penting untuk memperkuat kemandirian serta membantu mereka memenuhi kebutuhan keluarga.

"Pengasuhan keluarga harus berjalan seiring dengan pemberdayaan kesejahteraan masyarakat. Keluarga yang kuat membutuhkan lingkungan yang mendukung akses terhadap kesempatan ekonomi, dan perhatian dari pemerintah," katanya.

Iqra menegaskan, pengasuhan keluarga membutuhkan kerja sama pemerintah daerah, lembaga terkait, dan masyarakat. Sinergi tersebut diperlukan agar program pemberdayaan keluarga dapat berjalan efektif dan memberikan manfaat nyata.

Perda Nomor 17 Tahun 2018 jadi Landasan

Iqra menjelaskan, Perda Sumbar Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga menjadi salah satu landasan dalam mendorong peran keluarga di tengah masyarakat.

Ia berharap regulasi tersebut tidak hanya dipahami sebagai aturan, tetapi juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Menurutnya, upaya memperkuat ketahanan keluarga perlu dilakukan secara berkelanjutan melalui penguatan ekonomi, pengasuhan anak, pendidikan, serta pencegahan kekerasan dalam rumah tangga. (rel19)

KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
METRO PADANG	SENIN, 19 OKTOBER 2026	8

DPRD Sumbar Tetapkan Dua Ranperda sebagai Usul Prakarsa

Perkuat Regulasi Perlindungan Lingkungan Hidup dan Penyelenggaraan Keolahragaan

PADANG, METRO

DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) menetapkan dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) sebagai usul prakarsa DPRD, dalam rapat paripurna di Ruang Sidang Utama DPRD Sumbar, Jumat (16/10). Kedua Ranperda tersebut mengatur tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) serta Ranperda tentang Penyelenggaraan Keolahragaan.

Rapat paripurna tersebut dipimpin Wakil Ketua DPRD Sumbar Nanda Satria didampingi Ketua DPRD Sumbar, Muhidi dan turut dihadiri Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), unsur Forkopimda, anggota DPRD Sumbar, serta undangan lainnya turut menghadiri rapat tersebut.

Dua Ranperda dinilai strategis karena menyentuh persoalan mendasar pembangunan daerah. Di satu sisi, perlindungan lingkungan berkaitan erat dengan keberlanjutan sumber daya alam dan pengurangan risiko bencana. Di sisi lain, regulasi keolahragaan diharapkan memperkuat pembinaan atlet, memperluas partisipasi masyarakat, dan meningkatkan prestasi olahraga Sumbar.

Dijelaskan Nanda Satria, Ranperda PPLH merupakan usul prakarsa Komisi IV DPRD Sumbar. Pembaruannya diperlukan untuk menyesuaikan regulasi daerah dengan perkembangan peraturan perundang-undangan nasional. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2012 yang selama ini menjadi pedoman dinilai perlu disesuaikan dengan ketentuan terbaru mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

"Persoalan lingkungan bukan sekadar urusan administratif. Kerusakan hutan, perubahan tutupan lahan, serta terganggunya fungsi daerah resapan air berpotensi meningkatkan risiko banjir, banjir bandang, dan tanah longsor. Karena itu, penguatan payung hukum lingkungan diharapkan dapat menjadi bagian dari upaya menjaga ketestarian alam sekaligus memperkuat mitigasi dan pengurangan risiko bencana di Sumbar," ungkap Nanda Satria.

Sementara itu, kata Nanda Satria, Ranperda tentang Penyelenggaraan Keolahragaan merupakan usul prakarsa Komisi V DPRD Sumbar. Ranperda ini diperlukan untuk menyesuaikan regulasi daerah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan dan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan. Regulasi baru diharapkan membuat pembangunan olahraga lebih terarah, terencana, dan berkesinambungan.

"Bagi masyarakat dan atlet, arah kebijakan tersebut diharapkan tidak berhenti pada pembentukan aturan. Pembinaan yang konsisten, kesempatan berolahraga yang lebih luas, serta dukungan terhadap peningkatan prestasi menjadi sasaran penting yang perlu diterjemahkan dalam pelaksanaan kebijakan. Dengan demikian, pembangunan olahraga dapat memberikan manfaat nyata bagi kesehatan masyarakat sekaligus membuka ruang bagi lahirnya atlet berprestasi," tegas Nanda Satria.

Sebelum penetapan, kedua Ranperda telah melalui tahapan pengkajian dan harmonisasi oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Sumbar. Proses tersebut melibatkan Komisi IV, Komisi V, tim perumus, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Sumbar, serta organisasi perangkat daerah terkait. Setelah memperoleh persetujuan dalam rapat paripurna, kedua usul prakarsa ditetapkan melalui keputusan DPRD, dengan kelengkapan selanjutnya dipersiapkan untuk memasuki tahapan pembahasan bersama sesuai mekanisme dan jadwal yang berlaku.

"Penetapan dua Ranperda ini menjadi awal dari proses legislasi yang perlu dikawal hingga menghasilkan regulasi berkualitas dan dapat dilaksanakan. Tantangannya adalah memastikan aturan perlindungan lingkungan benar-benar mendukung kelestarian alam dan pengurangan risiko bencana, sementara regulasi keolahragaan mampu memperkuat pembinaan serta prestasi atlet. Publik kini menantikan tindak lanjut nyata agar kedua Ranperda tersebut kelak memberikan manfaat bagi masyarakat Sumbar," pungkasnya. (*)





RAPAT PARIPURNA—Wakil Ketua DPRD Sumbar, Nanda Satria didampingi Ketua DPRD Sumbar, Muhidi memimpin rapat paripurna penetapan dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) sebagai usul prakarsa DPRD.



KETUA Komisi V DPRD Sumbar, Lazuardi Erman menyerahkan dokumen Ranperda Penyelenggaraan Kesehatragaan kepada Wakil Ketua DPRD , Nanda Satria didampingi Ketua DPRD Muhidi dan Gubernur Mahyeldi.



KETUA Komisi IV Doni HY menyerahkan dokumen Ranperda PPLH kepada Wakil Ketua DPRD Sumbar Nanda Satria, didampingi Ketua DPRD Sumbar, Muhidi dan Gubernur Sumbar, Mahyeldi.



KETUA DPRD Sumbar, Muhidi bersama Wakil Ketua Nanda Satria, Gubernur Mahyeldi dan para anggota DPRD Sumbar menyanyikan lagu Indonesia Raya.



SUASANA rapat paripurna penetapan dua Ranperda sebagai usul prakarsa DPRD Sumbar.



SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

KLIPING BERITA

KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
Rakyat Sumbar	SENIN 19 OKTOBER 2026	9

DPRD Sumbar Tetapkan Dua Ranperda Usul Prakarsa

Padang, Rakyat Sumbar—DPRD Provinsi Sumbar menetapkan dua usul prakarsa sebagai Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda). Kedua Ranperda itu merupakan usul prakarsa dari Komisi IV dan Komisi V dan telah melalui sejumlah tahapan.

"Keputusan DPRD diberi Nomor : 18 /SB/2026 tentang Penetapan Usul Prakarsa Ranperda Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Nomor: 19/SB/2026 tentang Penetapan Usul Prakarsa Ranperda Penyelenggaraan Keolahragaan," kata Wakil Ketua DPRD Sumbar Nanda Satria, saat memimpin rapat agenda tersebut, di ruang sidang utama lembaga itu, Jumat, (16/10), pukul 10.15 WIB.

Ia melanjutkan, para pengusul (Komisi IV dan Komisi V) bersama Bapemperda (Badan Pembentukan Peraturan Daerah), segera menyiapkan seluruh kelengkapan kedua Ranperda.

"Setelah seluruh persyaratan dan kelengkapan dipenuhi serta disampaikan sesuai dengan mekanisme, pembahasan bersama dapat dilaksanakan berdasarkan jadwal yang ditetapkan Badan Musyawarah," ucap Nanda, didampingi Ketua DPRD Sumbar Muhidi.

Menurut Nanda, Ranperda dari DPRD dapat diajukan oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda, yang dikoordinasikan oleh Bapemperda.

"Kedua Ranperda supaya menjadi landasan hukum yang kuat, sebagai upaya menjaga kelestarian lingkungan hidup di Ranah Minang, serta meningkatkan kualitas pembinaan dan prestasi olahraga di Sumbar," ungkapnya.

Ia mengakhiri, pembentukan peraturan daerah (Perda) yang baruadi harapkan dapat memperkuat landasan hukum perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Sumbar secara berkelanjutan.

"Sementara itu, pembentukan Perda yang baru diperlukan agar penyelenggaraan keolahragaan di Sumbar mampu menjawab tantangan pembangunan olahraga pada masa mendatang," pungkas Nanda. (*)



WAKIL Ketua DPRD Sumbar Nanda Satria didampingi Ketua Muhidi, menerima dokumen laporan dari Ketua Komisi IV DPRD Sumbar Doni Harsiva, pengusul Ranperda Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, saat rapat paripurna, di ruang sidang utama, Jumat, (16/10).





WAKIL Ketua DPRD Sumbar Nanda Satria didampingi Ketua Muhidi, saat membuka rapat paripurna penetapan usul prakarsa Ranperda Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Penyelenggaraan Keolahragaan, di ruang sidang utama, Jumat, (16/10)



WAKIL Ketua DPRD Sumbar Nanda Satria didampingi Ketua Muhidi, menerima dokumen laporan Ketua Komisi V DPRD Sumbar Lazuardi Herman, pengusul Ranperda Penyelenggaraan Keolahragaan, saat rapat paripurna, di ruang sidang utama, Jumat, (16/10).



WAKIL Ketua DPRD Sumbar Nanda Satria didampingi Ketua Muhidi, menerima dokumen laporan hasil harmonisasi, pembulatan, dan pemantapan konsepsi terhadap Ranperda Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Penyelenggaraan Keolahragaan, dari Juru Bicara Bapemperda DPRD Sumbar Indra Catri, saat rapat paripurna, di ruang sidang utama, Jumat, (16/10).



WAKIL Ketua DPRD Sumbar Nanda Satria didampingi Ketua Muhidi, dan Gubernur Mahyeldi, saat memimpin rapat paripurna penetapan usul prakarsa Ranperda Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Penyelenggaraan Keolahragaan, di ruang sidang utama, Jumat, (16/10).

KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
Rakyat Sumbar	SENIN 19 OKTOBER 2026	6

Tingkatkan Kewaspadaan pada Potensi Bencana

HANDI YANUAR
Harian Rakyat Sumbar

Padang, Rakyat Sumbar—Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat Nanda Satria mengatakan ancaman bencana tidak hanya bunji akibat curah hujan yang tinggi, sehingga kesiapsiagaan harus ditingkatkan.

"Berbagai jenis bencana lainnya juga perlu diantisipasi, mulai dari gempa bumi, tsunami, kebakaran hutan dan lahan, erupsi gunung api, kekeringan, angin kencang hingga tanah longsor," kata Nanda.

saat Sosialisasi Peraturan Daerah (Sosper) Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penanggulangan Bencana Daerah bersama pengurus KNPI Sumatera Barat, Sabtu (17/10).

Ia menambahkan pemahaman terhadap potensi bencana harus dibangun sejak dini. Masyarakat perlu mengetahui langkah-langkah yang tepat sebelum bencana terjadi, saat menghadapi keadaan darurat, hingga proses pemulihan setelah bencana.

Sosialisasi Perda Nomor 4 Tahun 2023 ini juga dilaksanakan mampu menumbuhkan kesadaran kolektif bahwa penanggulangan bencana bukan semata-mata tanggung jawab pemerintah, melainkan membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat.

Nanda menilai generasi muda mempunyai posisi strategis sebagai penggerak kepedulian sosial, penyebar informasi kebencanaan, sekaligus relawan yang dapat membantu masyarakat ketika bencana melanda.

"Sengaja Sumatera Barat, khususnya Kota Padang terletak dari dari bencana-bencana yang melanda. Peran generasi muda, terutama KNPI, harus menjadi garda terdepan dalam membantu saudara-saudara kita yang terdampak bencana," tegasnya.

Ia menyebutkan, sosialisasi Perda menjadi momentum penting untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap ancaman bencana. Sumatera Barat merupakan salah satu wilayah yang memiliki tingkat kerawanan bencana cukup tinggi.

"Ini menjadi momentum bagi kita semua, sebab Sumatera Barat merupakan daerah yang rentan dimana bencana. Apalagi menjelang akhir tahun, curah hujan cenderung meningkat. Tentunya, koordinasi harus menjadi perhatian dan kewaspadaan kita bersama," pungkas Nanda.

Pejabat Pungsional Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Rehab Rekon) BPBD Provinsi Sumatera Barat Akli El Rusa menyatakan bencana tidak hanya disebabkan oleh faktor alam, tetapi juga dapat muncul akibat aktivitas manusia dan persoalan sosial.

Selain satu bentuk bencana non-alam atau bencana sosial yang perlu diwaspadai salah konflik sosial antarkelompok maupun antarkomunitas, serta ancaman teror yang berpotensi menggangu keamanan dan keselamatan masyarakat.

"Penanggulangan bencana harus dilaksanakan secara terencana, terpadu, dan berkesinambungan. Upaya tersebut meliputi kebijakan pembangunan yang mempertimbangkan risiko bencana, kegiatan pencegahan, penanganan tanggap darurat, hingga rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah terdampak," beberapa. (byr)



KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
Rakyat Sumbar	SENIN 19 OKTOBER 2026	10

Perlindungan Lingkungan Perlu Aksi Nyata

Padang, Rakyat Sumbar— Ketua DPRD Provinsi Sumbar Muhidi mengatakan perlindungan lingkungan perlu diwujudkan melalui tindakan nyata, bukan hanya melalui aturan.

"Kalau ingin lingkungan yang aman dan nyaman, kita harus ikut menjaga bumi dan segala isinya," kata Muhidi, saat sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2020 Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) di Padang, Sabtu (17/10).

Ia melanjutkan, masyarakat harus ikut berperan dalam mencegah kerusakan alam, termasuk dengan memperhatikan kondisi lingkungan sebelum melakukan pembangunan.

"Perda ini menjadi pedoman agar perlindungan lingkungan dilakukan secara terencana, sekaligus mendorong masyarakat lebih peduli terhadap kondisi di sekitarnya," ucapnya.

Menurut Muhidi, memperhatikan fungsi saluran air dan kondisi kawasan sebelum mendirikan bangunan sangat penting.

"Kalau membeli rumah, perhatikan dahulu lokasinya, apakah berada di jalur aliran air atau tidak," ungkap Muhidi.

Ia menambahkan, pembangunan yang mengabaikan tata ruang dan jalur aliran air berpotensi menimbulkan persoalan lingkungan, terutama ketika hujan dengan intensitas tinggi terjadi.

"Saluran yang sudah dibangun pemerintah juga jangan dipersempit atau ditutup karena dapat menghambat aliran air. Hal-hal seperti ini merupakan bentuk kepedulian masyarakat dalam mencegah banjir," ulasnya.

Ia menyampaikan, pengawasan terhadap pembangunan harus dilakukan sejak tahap perencanaan. Upaya pencegahan dinilai lebih efektif dibandingkan penanganan setelah kerusakan lingkungan menimbulkan dampak bagi masyarakat.

"Kita ingin sosialisasi ini menjadi langkah preventif. Mencegah lebih baik daripada memperbaiki setelah terjadi kerusakan. Jika sejak awal pembangunan memperhatikan lingkungan dan masyarakat ikut mengawasi, insyaallah lingkungan kita bisa tetap aman, bersih, dan nyaman," pungkasnya.

Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat Yomike Yusra mengatakan RPPLH merupakan dokumen perencanaan yang menjadi acuan dalam mengarahkan pembangunan dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.

Dokumen tersebut dirancang agar pengelolaan lingkungan tidak hanya berorientasi pada kebutuhan saat ini, tetapi juga keberlangsungan hidup generasi mendatang.

"Kalau dokumen ini dimanfaatkan untuk mengarahkan pembangunan, upaya perlindungan lingkungan akan lebih terjaga. Lingkungan yang baik menjadi dasar kehidupan masyarakat, bukan hanya untuk sekarang, tetapi juga untuk masa depan," tutup Yomike. (byr)



SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

KLIPING BERITA

KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
Haluan	SENIN, 19 OKTOBER 2026	2

Ade Putra Sosialisasikan Perda No 3 Tahun 2023

PASAMAN BARAT, HALUAN — Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat, Ade Putra, menyosialisasikan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Komoditas Unggulan Perkebunan sekaligus membahas pembentukan dan peran Satuan Tugas (Satgas) harga Tandan Buah Segar (TBS) kebun mitra. Kegiatan tersebut berlangsung di aula kantor bupati setempat, Sabtu (17/10) kemarin.

Kegiatan ini turut dihadiri Staf Ahli Bidang Agama dan Kesejahteraan Sosial, Getri Ardenis anggota DPRD Kabupaten Pasaman Barat dari Fraksi Gerindra, jajaran Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Barat, perusahaan kelapa sawit serta unsur terkait lainnya.

Sosialisasi tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat pelaksanaan regulasi di sektor perkebunan, khususnya dalam menjamin hak-hak petani, memperjelas pola kemitraan dengan perusahaan, serta mendorong terciptanya harga TBS yang adil dan transparan.

Staf Ahli Bidang Agama dan Kesejahteraan Sosial, Getri Ardenis, mengajak seluruh peserta mengikuti kegiatan secara serius, terutama materi yang berkaitan dengan pengelolaan komoditas unggulan perkebunan.

Ia mengatakan, masyarakat sangat berharap harga sawit tetap stabil dan tidak terjadi praktik permainan harga yang dapat merugikan petani.

"Masyarakat tentunya berharap agar harga sawit ini stabil. Kita juga berharap tidak terjadi permainan harga. Karena itu, mari kita ikuti kegiatan ini dengan baik, terutama paparan yang disampaikan oleh Dinas Perkebunan dan anggota dewan Ade Putra," ujarnya.

Sementara itu, anggota DPRD Sumbar Ade Putra menegaskan bahwa sosialisasi Perda ini merupakan bagian dari tanggung jawab legislatif untuk memastikan kebijakan daerah benar-benar diterapkan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Menurutnya, DPRD memiliki kewajiban untuk bermitra dengan pemerintah daerah dan mendorong pelaksanaan regulasi yang berpihak kepada kepentingan rakyat, termasuk petani perkebunan.

"Kami di DPRD Provinsi Sumatera Barat berkewajiban memastikan Perda ini berjalan sebagaimana mestinya. Keberpihakan kepada masyarakat harus diwujudkan melalui pelaksanaan aturan, bukan hanya sebatas penyampaian kebijakan," kata Ade Putra.

Ia menjelaskan, tata kelola perkebunan harus mengacu pada ketentuan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan yang mengatur kewajiban perusahaan memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku.

Ade juga menyinggung sejumlah regulasi turunan yang mengatur perizinan usaha perkebunan, fasilitasi pembangunan kebun masyarakat, kemitraan, serta penetapan harga TBS.

Menurutnya, keberadaan Perda Nomor 3 Tahun 2023 menjadi salah satu instrumen penting bagi pemerintah daerah dan DPRD untuk memperkuat pengawasan terhadap tata kelola komoditas unggulan perkebunan.

Ia menegaskan, hubungan kemitraan antara perusahaan dan petani tidak boleh hanya menguntungkan perusahaan, tetapi harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat yang menjadi mitra.

"Kalau sudah bermitra, harus dilihat apakah hak-hak petani telah diberikan. Hak masyarakat harus dipenuhi sesuai ketentuan. Kemitraan jangan hanya menjadi formalitas, tetapi harus benar-benar memberikan manfaat bagi petani," tegasnya.

Ade juga mendorong perusahaan perkebunan, pemerintah daerah, dan instansi terkait agar menindaklanjuti hasil sosialisasi tersebut secara serius. Pengawasan di lapangan, menurutnya, penting untuk memastikan seluruh ketentuan dijalankan dan potensi pelanggaran dapat ditangani sesuai aturan. (h/ows)

57591 https:/

98

KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
Haluan	SENIN, 19 OKTOBER 2026	6

SMAN 2 Payakumbuh Terima Bantuan 10 Laptop dari Nurkhalis

PAYAKUMBUH, HALUAN — Anggota Fraksi Gerindra DPRD Sumbar yang juga Ketua Umum Ikatan Alumni Kampus Flamboyan Bukik Sitabua (Ikaflas), Nurkhalis Dt. Bijo Dirajo menyerahkan bantuan 10 unit laptop untuk SMA Negeri (SMAN) 2 Payakumbuh.

Bantuan tersebut merupakan tindak lanjut atas aspirasi pihak sekolah yang disampaikan kepada Nurkhalis beberapa waktu lalu.

Penyerahan bantuan ini dilakukan secara simbolis sebagai bentuk dukungan terhadap pemenuhan sarana pendidikan dan peningkatan kualitas proses belajar mengajar di sekolah tersebut.

Nurkhalis mengatakan, bantuan diserahkan pada Kamis (15/10), berawal dari aspirasi Kepala SMAN 2 Payakumbuh yang disampaikan kepadanya saat kegiatan halal bihalal di Hotel Mangkuto beberapa waktu lalu.

Sebagai wakil rakyat di DPRD Sumbar sekaligus alumni sekolah tersebut, ia merasa memiliki tanggung jawab untuk menindaklanjuti kebutuhan yang disampaikan pihak sekolah.

"Aspirasi ini disampaikan langsung oleh kepala sekolah ketika kami menghadiri halal bihalal di Hotel Mangkuto. Karena itu, kami berupaya menindaklanjutinya agar bantuan laptop ini bisa dimanfaatkan untuk menunjang kegiatan belajar mengajar," ujar Nurkhalis.

Nurkhalis menegaskan, dukungan terhadap sektor pendidikan merupakan bagian dari perhatian yang perlu terus diperkuat, termasuk melalui upaya mendorong pemenuhan fasilitas pembelajaran di sekolah.

Menurutnya, ketersediaan sarana pendukung yang memadai diharapkan dapat membantu guru dan siswa melaksanakan proses pembelajaran secara lebih optimal, seiring dengan perkembangan teknologi dalam dunia pendidikan.

Nurkhalis berharap, 10 unit laptop tersebut dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan sekolah dan memberikan manfaat bagi para siswa dalam meningkatkan kemampuan serta semangat belajar. **(h/len)**



ANGGOTA Fraksi Gerindra DPRD Sumbar yang juga Ketua Umum Ikatan Alumni Kampus Flamboyan Bukik Sitabua (Ikaflas), Nurkhalis Dt. Bijo Dirajo menyerahkan bantuan 10 unit laptop untuk SMA Negeri (SMAN) 2 Payakumbuh IST



KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
Haluan	SENIN, 19 OKTOBER 2026	1

ATASI DAMPAK KABUT ASAP KIRIMAN

Pemda Didesak Segera Ambil Langkah Konkret

PADANG, HALUAN— Anggota DPRD Sumatera Barat (Sumbar), Albert Hendra Lukman mengkritik lambannya langkah pemerintah daerah (pemda) di Sumbar dalam menanggani dampak kabut asap kiriman dari provinsi tetangga.

Albert mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumbar serta pemerintah kabupaten/kota terdampak segera mengambil langkah konkret untuk melindungi masyarakat dari paparan polusi udara akibat kabut asap ini.

Menurutnya, penanganan kabut asap tidak cukup hanya dengan menyampaikan informasi mengenai penurunan indeks kualitas udara dan menerapkan pembelajaran jarak jauh (PJJ) bagi siswa sekolah.

Pemda perlu memberikan perlindungan langsung kepada masyarakat, antara lain dengan mengedarkan imbauan penggunaan masker, melaksanakan pembagian masker secara luas, serta memberikan edukasi mengenai dampak polusi udara atas adanya kabut asap ini kepada masyarakat.

"Soal kabut asap ini, saya bingung dengan pemimpin daerah kita di Sumbar ini. Apalagi pemerintah provinsi, tidak satupun pejabat kita di provinsi yang mengomentari soal kabut asap ini, semua diam seribu bahasa. Malahan di tengah kabut asap yang terjadi dilaksanakan lah Porprov, sementara indeks kualitas udara dengan adanya kabut asap ini sangatlah buruk," ujar Albert, Minggu (18/10).

Albert menilai pemda harusnya menerbitkan surat edaran yang mengimbau masyarakat menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan. Pemprov Sumbar dan pemerintah kabupaten/kota juga diminta membagi



>>PEMDA, hal 07

BREAKING NEWS

0751 7057591 https://dprd.sumbarprov.go.id/

100

ran kabut asap ini.

Di Kota Padang saja, yang notabene ibu kota provinsi dan sudah merasakan dampak dari kabut asap yang cukup parah, belum terlihat pembagian masker secara luas oleh Pemprov Sumbar dan juga Pemerintah Kota (Pemko) Padang.

"Ini menjadi tanda tanya bagi saya. Kok tidak ada langkah-langkah preventif yang dilaksanakan pemerintah kita. Yang ada cuma disampaikan bahwa kualitas udara memburuk, dan untuk anak sekolah diberlakukan kebijakan PJJ. Tidak ada surat edaran atau imbauan lebih lanjut menghadapi kabut asap ini," katanya.

Selain mengeluarkan imbauan untuk penggunaan masker serta membagikan masker kepada masyarakat, ia juga mendesak pemerintah daerah juga memberikan informasi yang jelas mengenai langkah-langkah antisi selama kabut asap berlangsung. Salah satunya terkait penggunaan air hujan yang ditampung untuk kebutuhan sehari-hari.

Ia mencontohkan, dari informasi yang diperolehnya mengenai Singapura yang terdampak kabut asap kiriman dari Indonesia. Air hujan yang ditampung masyarakat di negara itu berubah warna menjadi hitam. Hal tersebut diduga terjadi akibat pencemaran polutan di udara. Berangkat dari hal ini, pemda diminta perdu memberikan penjelasan yang dapat dipertang gungjawabkan mengenai keamanan air hujan selama kabut asap terjadi.

Politisi PDI Perjuangan itu mengatakan, kualitas udara di Sumbar memang sempat membaik setelah turunnya hujan pada beberapa waktu lalu. Namun, kondisi kembali memburuk setelah hujan berhenti dan kebakaran yang diduga menjadi sumber kabut asap di provinsi tetangga masih berlangsung.

Dengan kondisi kiriman kabut asap yang terus berulang, seharusnya gubernur sudah menyam paikan kepada pusat bahwa masyarakat Sumbar begitu terdampak dengan kabut asap ini. "Minta pusat agar membantu mencarikan solusinya," ucapnya.

Kemudian ia juga meminta gubernur dan bupati/wali kota yang wilayahnya terdampak agar menjalin komunikasi dengan provinsi tetangga yang mengalami kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Karena ia menilai dalam penanganan permasalahan ini diperlukan upaya bersama untuk mengatasi sumber kebakaran dengan koordinasi lintas daerah.

Komunikasi seperti ini diperlukan untuk mengetahui kebutuhan penanganan kebakaran sekaligus menjalin bantuan yang dapat diberikan Sumbar, termasuk kemungkinan mengirimkan personel dan tenaga penanggulangan kebakaran ke daerah terdampak, seperti Jambi dan Sumatera Selatan (Sumsel).

"Harusnya pemimpin daerah kita menjalin komunikasi dengan provinsi tetangga yang wilayah mereka jadi sumber datangnya kabut asap ini. Seriit, bagaimana solusi untuk mengatasi kabut asap ini, dan tanyakan apa saja yang mereka butuhkan agar bisa kita bantu," ujar Ketua Fraksi PDI Perjuangan dan PKB DPRD Sumbar tersebut.

Ia mengatakan, solidaritas antardaerah perlu diwujudkan melalui tindakan nyata. Sumbar yang pernah merasakan bantuan saat menghadapi bencana hidrometeorologi juga perlu menunjukkan kepedulian terhadap daerah lain yang tengah berjuang memadamkan kebakaran.

"Api ini harus dipadamkan. Harus ada kerja sama dan sinergi. Jangan ego sektoral yang dipelihara. Ketika kita terkena bencana, daerah lain datang membantu. Sementara kita juga bisa membantu daerah lain yang sedang menghadapi bencana. Kita kan satu kesatuan dalam NKRI, harus bersama-sama mencari solusi atas masalah yang ada," ucapnya.

Lebih lanjut, Albert meminta Pemprov Sumbar segera menggelar rapat koordinasi bersama pemerintah kabupaten/kota guna merumuskan langkah penanganan terpadu, baik untuk melindungi masyarakat maupun meng kung upaya pemadaman karhutla di daerah sumber asap.

Terkait pembagian masker selama terjadinya kabut asap, Albert mengaku, PDIP Padang sendiri telah dua kali membagikan masker sejak kabut asap terjadi. Pembagian masker berikutnya juga diren canakan untuk membantu masyarakat terdampak.

"Persoalan polusi udara ini tidak bisa kita anggap enteng. Pemerintah harus mengambil langkah cepat. Jangan biarkan masyarakat berju ang sendiri menghadapi masalah ini sementara sekan lahannya pemerintah," tutur Albert. (h/hm)



SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

KLIPING BERITA

KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
Haluan	SENIN, 19 OKTOBER 2026	8

DPRD Sumbar Tetapkan Dua Ranperda sebagai Usul Prakarsa

PADANG, HALUAN- Ancaman bencana akibat kerusakan lingkungan dan kebutuhan memperkuat pembinaan generasi muda menjadi perhatian DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar).

Untuk menjawab tantangan tersebut, DPRD Sumbar menyepakati dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) sebagai usul prakarsa dewan, yakni tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) serta Penyelenggaraan Keolahragaan.

Kesepakatan itu diambil dalam rapat paripurna DPRD Sumbar, Jumat (16/10), yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Sumbar Nanda Satria, didampingi Ketua DPRD Sumbar Muhidi. Rapat tersebut juga dihadiri Gubernur Sumbar Mahyeldi.

Kedua Ranperda tersebut menyasar persoalan strategis dalam pembangunan daerah. Regulasi lingkungan diharapkan memperkuat upaya menjaga kelestarian alam dan mengurangi risiko bencana. Sementara itu, aturan keolahragaan diarahkan untuk memperkuat pembinaan generasi muda, memperluas partisipasi masyarakat dalam berolahraga, serta mendorong lahirnya atlet berprestasi yang mampu mengharumkan nama daerah.

Nanda Satria menjelaskan, Ranperda tentang PPLH merupakan usul prakarsa Komisi IV DPRD Sumbar. Pembaruan regulasi diperlukan untuk menyesuaikan aturan daerah dengan perkembangan peraturan perundang-undangan nasional. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2012 yang selama ini menjadi pedoman dinilai perlu disesuaikan dengan ketentuan terbaru.

Menurutnya, persoalan lingkungan tidak bisa dipandang sebelah mata karena kerusakan alam dapat meningkatkan risiko bencana. Kerusakan hutan, perubahan tutupan lahan, serta terganggunya fungsi daerah resapan air berpotensi memperbesar ancaman banjir, banjir bandang, dan tanah longsor.

"Persoalan lingkungan bukan sekadar urusan administratif. Kerusakan hutan, perubahan tutupan lahan, serta terganggunya fungsi daerah resapan air berpotensi meningkatkan risiko banjir, banjir bandang, dan tanah longsor," katanya.

Karena itu, penguatan regulasi lingkungan diharapkan menjadi landasan bagi pengelolaan sumber daya alam yang lebih bertanggung jawab. Upaya tersebut tidak hanya bertujuan menjaga kelestarian alam, tetapi juga memperkuat mitigasi bencana dan melindungi masyarakat dari dampak kerusakan lingkungan.

Pandangan serupa disampaikan Ketua Komisi IV DPRD Sumbar, Doni Arsiva Yandra. Ia menilai degradasi sumber daya alam, kerusakan hutan, perubahan tutupan lahan, dan terganggunya fungsi daerah resapan air harus menjadi perhatian serius dalam penyusunan kebijakan lingkungan hidup.

Menurutnya, penguatan regulasi perlu diikuti langkah konkret dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan. Dengan demikian, Ranperda PPLH diharapkan menjadi landasan hukum untuk memperbaiki tata kelola lingkungan sekaligus mendukung upaya mitigasi dan pengurangan risiko bencana di Sumbar.

Di sisi lain, Ranperda tentang Penyelenggaraan Keolahragaan merupakan usul prakarsa Komisi V DPRD Sumbar. Ranperda ini disusun untuk menyesuaikan regulasi daerah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan dan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan.

Penguatan aturan tersebut diharapkan mendorong pembinaan olahraga yang lebih



102

terarah dan berkesinambungan. Generasi muda perlu memperoleh ruang dan kesempatan untuk mengembangkan potensi melalui kegiatan olahraga yang positif, terencana, dan berkelanjutan.

Selain meningkatkan kesehatan masyarakat, pembinaan yang konsisten juga menjadi jalan untuk menemukan dan mengembangkan bakat atlet sejak dini. Dengan dukungan kebijakan yang tepat, Sumbar diharapkan mampu meningkatkan daya saing atlet dan melahirkan prestasi di tingkat daerah, nasional, hingga internasional.

Ketua Komisi V DPRD Sumbar, Lazuardi Erman, mengatakan salah satu persoalan mendasar yang melatarbelakangi penyusunan Ranperda tersebut adalah keberlanjutan kesejahteraan atlet setelah tidak lagi aktif bertanding.

Menurutnya, selama ini atlet mendapatkan perhatian dan penghargaan ketika berhasil meraih prestasi. Namun, setelah mengakhiri karier olahraga, sebagian atlet masih menghadapi ketidakpastian mengenai masa depan dan kesejahteraannya.

Karena itu, pembangunan olahraga tidak seharusnya hanya berorientasi pada perolehan medali dan pencapaian prestasi. Pemerintah daerah juga perlu menghadirkan kebijakan yang memberikan perlindungan, penghargaan, serta kepastian masa depan bagi atlet atas kontribusi yang telah mereka berikan kepada daerah.

"Pembinaan yang konsisten, kesempatan berolahraga yang lebih luas, serta dukungan terhadap peningkatan prestasi menjadi sasaran penting yang perlu diterjemahkan dalam pelaksanaan kebijakan. Dengan demikian, pembangunan olahraga dapat memberikan manfaat nyata bagi kesehatan masyarakat sekaligus membuka ruang bagi lahirnya atlet berprestasi," ujarnya.

Melalui Ranperda tersebut, diharapkan terbangun sistem pembinaan olahraga yang lebih komprehensif, mulai dari pengembangan bakat, peningkatan kualitas atlet, hingga pemberian penghargaan dan perhatian terhadap kesejahteraan mereka setelah tidak lagi aktif bertanding.

Sebelum disepakati dalam rapat paripurna, kedua Ranperda telah melalui tahapan pengkajian dan harmonisasi oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Sumbar. Proses tersebut melibatkan Komisi IV, Komisi V, tim perumus, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Sumatera Barat, serta organisasi perangkat daerah terkait.

Setelah disepakati sebagai usul prakarsa DPRD, kedua Ranperda akan diproses lebih lanjut sesuai mekanisme pembentukan peraturan daerah yang berlaku. Tahapan berikutnya diharapkan menghasilkan regulasi yang tidak hanya kuat secara hukum, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan masyarakat.

Melalui dua Ranperda tersebut, DPRD Sumbar mendorong penguatan kebijakan yang berorientasi pada keselamatan masyarakat dan masa depan generasi muda. Perlindungan lingkungan menjadi bagian penting dalam mengurangi risiko bencana, sedangkan pembinaan olahraga diharapkan membuka lebih banyak kesempatan bagi generasi muda untuk mengembangkan potensi, meningkatkan prestasi, dan memperoleh masa depan yang lebih terjamin. (*)



Menyanyikan Lagu Indonesia Raya dalam rapat paripurna



SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
KLIPING BERITA

KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
KORAN PADANG	SELASA, 20 OKTOBER 2026	6

Warga Limau Manis Bersyukur Jalan Lingkungan Selesai Diaspal

PADANG, KP - Warga Kelurahan Limau Manis Selatan, Kota Padang, kini menikmati akses jalan yang lebih nyaman setelah Jalan Fisika I dan Fisika II selesai diaspal. Perbaikan jalan lingkungan yang menjadi kebutuhan mendasar untuk menunjang mobilitas sehari-hari ini terealisasi setelah usulan warga diperjuangkan sejak 2024.

Meski demikian, warga berharap perbaikan infrastruktur dapat berlanjut ke ruas jalan lain yang belum tersentuh. Harapan itu mengemuka dalam kegiatan syukuran bersama masyarakat pada Minggu (18/10). Kegiatan tersebut dihadiri Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat Muhidi, anggota DPRD Kota Padang Rafdi, tokoh masyarakat Musliar Kasim, serta warga setempat.

Pengaspalan jalan tersebut terealisasi melalui program pembangunan yang diperjuangkan Muhidi dengan fasilitasi Rafdi. Kehadiran pembangunan ini menjadi momentum bagi masyarakat untuk menyampaikan kebutuhan lanjutan di kawasan mereka.

Ketua RT 03, Bahrizal Basir mengatakan, perbaikan jalan yang telah lama diusulkan itu sangat berarti bagi warga. Ia mengapresiasi dukungan Muhidi dan Rafdi yang ikut mendorong terealisasinya kebutuhan infrastruktur di lingkungan mereka.

Meski demikian, Bahrizal mengingatkan masih ada pekerjaan yang perlu dilanjutkan. Salah satunya ruas jalan di sekitar Madrasah Diniyah Awaliyah (MDA) yang diharapkan dapat diperbaiki hingga tersambung dengan jalan utama.

"Kami berharap jalan yang belum selesai bisa dilanjutkan agar akses masyarakat semakin nyaman. Warga juga harus ikut menjaga lingkungan supaya hasil pembangunan ini bertahan lama," katanya.

Sementara itu, tokoh masyarakat Musliar Kasim menilai kemajuan suatu kawasan tidak cukup diukur dari pembangunan fisik. Penguatan pendidikan, pembinaan karakter, dan kebersamaan warga juga perlu menjadi perhatian agar pembangunan memberikan dampak jangka panjang.

Ia berharap peningkatan pendidikan keagamaan melalui Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah (MDTA) dan pengembangan program Smart Surau dapat terus didorong untuk membentuk generasi muda yang berilmu dan berakhlak.

"Kita ingin anak-anak memiliki pengetahuan yang luas sekaligus bekal agama dan akhlak yang kuat. Karena itu, pendidikan harus terus mendapat perhatian agar generasi muda tumbuh menjadi pribadi yang berkarakter dan peduli terhadap lingkungannya," tutur Musliar.

Anggota DPRD Padang, Rafdi menambahkan, pembangunan di kawasan tersebut merupakan hasil kolaborasi dalam memperjuangkan kebutuhan masyarakat. Ia menyebut pada tahun ini terdapat sejumlah pembangunan yang mendapat perhatian, termasuk pengaspalan jalan di Blok B dengan panjang lebih dari 200 meter.

Pada kesempatan itu, Muhidi mengatakan, pembangunan yang menjawab kebutuhan masyarakat membutuhkan komunikasi dan kerja sama berbagai pihak. Menurutnya, aspirasi warga perlu disampaikan secara jelas agar dapat menjadi bahan pertimbangan dalam mendorong program pembangunan.

"Pemerintah, legislatif, dan masyarakat harus berjalan bersama. Apa yang sudah dibangun perlu dijaga, sementara kebutuhan yang belum terpenuhi harus terus dikomunikasikan agar pembangunan dapat berjalan secara bertahap dan memberikan manfaat lebih luas," tuturnya. **(fal)**





KETUA *DPRD Sumatera Barat Muhidi, Anggota DPRD Padang Rafdi, tokoh masyarakat Mustiar Kasim, dan warga, saat syukuran pengaspalan Jalan Fisika I dan II di Kelurahan Limau Manis Selatan, Kota Padang, Minggu (18/10).*



SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

KLIPING BERITA

KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
KORAN PADANG	SELASA, 20 OKTOBER 2026	6

Peran Keluarga dan Masyarakat Jadi Kunci Pencegahan Narkoba

PADANG, KP - Penanganan darurat narkoba tidak bisa hanya dibebankan kepada aparat penegak hukum. Keluarga dan masyarakat dituntut ikut mengambil peran aktif, mulai dari mengenali tanda-tanda penyalahgunaan hingga berani melaporkan aktivitas peredaran di lingkungan masing-masing.

Hal ini disampaikan Wakil Ketua DPRD Sumatera Barat, Evi Yandri Rajo Budiman, saat Sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya di Gedung Rohana Kudus, Padang, Minggu (18/10). Peserta sosialisasi diajak meneruskan pemahaman tersebut kepada keluarga dan kerabat.

Menurut Evi, ancaman narkoba bukan persoalan individu atau keluarga semata. Dampaknya merusak kualitas sumber daya manusia dan ketahanan sosial.

"Kalau kita mendengar kata darurat, seharusnya kita langsung waspada dan bergerak bersama. Persoalan ini membutuhkan kepedulian dan tindakan nyata dari semua pihak," katanya.

Diterangkannya, Perda Nomor 9 Tahun 2018 telah mengatur peran pemerintah dan masyarakat dalam upaya pencegahan. Upaya awal dapat dimulai dengan mengenali jenis narkotika dan zat adiktif, memahami indikasi penyalahgunaan, serta meningkatkan pengawasan terhadap anggota keluarga dan lingkungan sekitar.

"Jika menemukan indikasi peredaran narkoba, laporkan supaya bisa segera ditangani dan mendapatkan rehabilitasi," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Badan Kesbangpol Sumbar, Mursalim menyebut, narkoba sebagai kejahatan luar biasa karena dampaknya dapat merusak generasi dan melemahkan ketahanan bangsa.

Ia mengingatkan masyarakat tidak bersikap diam atau menutupi dugaan penyalahgunaan dengan alasan kasihan.

Mursalim mencontohkan kasus transaksi sabu di kawasan Gaung beberapa tahun lalu yang sempat dibiarkan warga sebelum akhirnya ditindak kepolisian.

"Kami juga mendorong setiap kelurahan membentuk program Kelurahan Bersinar atau Bersih dari Narkoba," tegasnya.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Seksi Perizinan Kecamatan Padang Barat, Ida Puji Astuti, menegaskan pihak kecamatan siap berkolaborasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan melindungi generasi muda dari bahaya narkotika. **(fai)**



WAKIL *Ketua DPRD Sumatera Barat Evi Yandri Rajo Budiman menjadi narasumber dalam Sosialisasi Perda Nomor 9 Tahun 2018 di Gedung Rohana Kudus, Padang, Minggu (18/10).*

KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
Rakyat Sumbar	SELASA, 20 OKTOBER 2026	9

Ranperda Penyelenggaraan Keolahragaan Sangat Strategis

Padang, Rakyat Sumbar — Ketua DPRD Provinsi Sumbar Muhidi mengatakan Ranperda Penyelenggaraan Keolahragaan menjadi sangat penting dan strategis karena memuat beberapa pembaharuan mendasar.

"Pertama, kewajiban melaksanakan Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) melalui Desain Olahraga Daerah (DOD) yang disesuaikan dengan potensi Sumbar. Kedua, amanat untuk menyelenggarakan kelas olahraga di sekolah SD sampai SMA dan pembinaan olahraga pelajar di bawah koordinasi Dinas Pendidikan," kata Muhidi, saat menutup rapat paripurna Penyampaian Nota Penjelasan Ranperda tersebut, di ruang sidang utama, Jumat, (16/10/2026) dimulai sekira pukul 14.00 WIB lewat.

Ketiga, sambung Muhidi, penguatan sport science, teknologi, dan inovasi olahraga sebagai sumber ekonomi baru daerah. Keempat, jaminan penghargaan dan perlindungan kesejahteraan bagi atlet berprestasi dan purnatlet, termasuk akses bagi penyandang disabilitas," tambah Muhidi, didampingi wakil ketua DPRD Yandri Rajo Budiman.

Muhidi menyebutkan, Pemerintah Provinsi Sumbar telah menyampaikan penjelasan dan pandangan terhadap Ranperda tersebut. Selanjutnya, Ranperda ini akan dibahas bersama Komisi V DPRD Sumbar.

"Kami berharap pembahasan Ranperda ini dapat berjalan lancar, sehingga dapat segera ditetapkan menjadi Perda yang benar-benar bermanfaat bagi masyarakat," ujarnya.

Ia menegaskan, paradigma baru keolahragaan nasional hari ini menempatkan olahraga bukan hanya sebagai kegiatan fisik, tetapi juga investasi kesejahteraan atlet.

"Fakta yang sering kita dengar di lapangan-sebagaimana disampaikan Komisi V dalam Nota Penjelasannya, adalah: Atlet kita berlatih, berprestasi, tetapi setelah pensiun mereka tidak mendapat apa-apa lagi. Ini tidak manusiawi dan tidak adil. Inilah yang ingin kita ubah bersama," tegasnya.

Ranperda ini merupakan usul prakarsa dari Komisi V DPRD Sumbar, telah melalui tahapan kajian oleh Bapemperda, harmonisasi dengan Kanwil Kemenkum Sumatera Barat, dan pembulatan konsepsi bersama Tim Pemprov. (*)



KLIPING BERITA



KETUA DPRD Sumbar Muhidi, wakil ketua Evi Yandri Rajo Budiman, Sekdaprov Arry Yuswandi, Juru Bicara Komisi V, berfoto bersama saat rapat paripurna Nota Penjelasan Ranperda Penyelenggaraan Keolahragaan, Jumat, (16/10) siang.



KETUA DPRD Sumbar Muhidi didampingi wakil ketua Evi Yandri Rajo Budiman, menyerahkan dokumen Nota Penjelasan Ranperda Penyelenggaraan Keolahragaan kepada Sekdaprov Arry Yuswandi, saat rapat paripurna, Jumat, (16/10) siang.



KETUA DPRD Sumbar Muhidi, didampingi wakil ketua Evi Yandri Rajo Budiman, saat memimpin rapat paripurna Nota Penjelasan Ranperda Penyelenggaraan Keolahragaan, Jumat, (16/10) siang.



KETUA DPRD Sumbar Muhidi, didampingi wakil ketua Evi Yandri Rajo Budiman, dan Sekdaprov Arry Yuswandi, saat rapat paripurna Nota Penjelasan Ranperda Penyelenggaraan Keolahragaan, Jumat, (16/10) siang.



KETUA DPRD Sumbar Muhidi didampingi wakil ketua Evi Yandri Rajo Budiman, menerima dokumen Nota Penjelasan Ranperda Penyelenggaraan Keolahragaan dari Juru Bicara Komisi V, saat rapat paripurna, Jumat, (16/10) siang.



KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
POSMETRO PADANG	SELASA, 20 OKTOBER 2025	7

Evi Yandri Gelorakan Semangat Perangi Narkoba

PADANG, METRO

Bukan hanya merusak fisik dan mental, narkoba sangat berpotensi mengancam eksistensi sebuah bangsa dan negara. Negara bisa hancur, bahkan runtuh. Oleh karena itulah, perang terhadap narkoba harus terus digalakkan. Darurat narkoba di Indonesia sangat perlu dianggap serius oleh semua unsur masyarakat.

Hal tersebut mengemuka saat kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 9 Tahun 2018 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoti ka, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya, Minggu (18/10), di Gedung Rona Kudus, Padang. Kegiatan ini dilaksanakan Wakil Ketua DPRD Sumbar, Evi Yandri Rajo Budiman.

Ia menegaskan bahwa kalimat "darurat narkoba" yang disebutkan Presiden Jokowi beberapa tahun lalu bukanlah sekadar kata-kata. Bahkan sampai sekarang, peredaran dan penyalahgunaan narkoba masih mengancam negara ini.

"Normalnya, jika kita mendengar kata 'darurat', kita langsung awas dan bergerak bersama. Itulah yang seharusnya kita lakukan dalam memerangi narkoba," kata Evi.

Ia mengimbau peserta untuk mengajak semua kenalan dan keluarga agar ambil bagian secara aktif dalam gerakan mencegah peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Di dalam perda tersebut, hal ini memang telah diatur, termasuk hak dan kewajiban masyarakat, pemerintah, serta seluruh unsur dalam gerakan pencegahan penyalahgunaan narkoba.

"Penyalahgunaan narkoba ini susah untuk diberantas karena banyak faktor. Jika masyarakat membantu secara aktif, hasilnya akan lebih optimal," ujarnya lagi.

Keaktifan masyarakat bisa dimulai dari mengetahui berbagai jenis narkoba dan zat adiktif, memahami ciri-ciri serta gejala pemakai, hingga melakukan pengawasan terhadap anggota keluarga bahkan lingkungan.

"Jika ada sanak saudara yang menggunakan narkoba, bawa ke tempat rehabilitasi. Jika mendengar atau melihat aktivitas penyalahgunaan narkoba, laporkan kepada RT/RW agar bisa diidentifikasi tindakannya. Mari kita pahami bahwa darurat narkoba di negara ini sudah lama terjadi," katanya.

Senada dengan Evi Yandri, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Sumbar, Mursalim, yang juga menjadi narasumber sosialisasi hari itu, menyebut narkoba sebagai kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang dapat menghancurkan keutuhan bangsa.

Ia mencontohkan sejarah "Perang Candu" di Tiongkok pada abad ke-19. Saat itu, pelemahan generasi muda melalui narkotika menjadi strategi efektif untuk meruntuhkan sebuah negara.

Mursalim menyayangkan sikap sebagian masyarakat yang cenderung pasif dan menutup-nutupi kasus penyalahgunaan narkoba di lingkungan sekitar dengan dalih rasa iba. Ia mencontohkan kasus di kawasan Gaung beberapa tahun lalu, saat aktivitas transaksi sabu sempat dibiarkan oleh warga sekitar sebelum akhirnya ditindak tegas oleh kepolisian.

"Jika masyarakat melihat, mendengar, atau menemukan indikasi penyalahgunaan, segera laporkan. Jangan diam saja. Kami juga mendorong setiap kelurahan untuk membentuk program Kelurahan Bersinar (Bersih dari Narkoba)," tegas Mursalim.

Apresiasi terhadap sosialisasi ini turut disampaikan oleh pihak jajaran kecamatan. Kepala Seksi Perizinan Kecamatan Padang Barat, Ida Puji Astuti, menyatakan bahwa pihak kecamatan siap berkolaborasi penuh dalam mendukung implementasi perda tersebut demi menyelamatkan generasi muda dari ancaman narkotika. (*)



SOSIALISASI — Wakil Ketua DPRD Sumbar, Evi Yandri Rajo Budiman saat menyosialisasikan Perda tentang Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya.



SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
KLIPING BERITA

KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
SINGGALANG	Rabu, 21 Oktober 2026 (9 Jumadil Awal 1448 H)	8

SOSPER WAKIL KETUA DPRD SUMBAR, EVI YANDRI RAJO BUDIMAN

Narkoba Ancam Eksistensi Bangsa, Warga Diimbau Proaktif

PADANG - SINGGALANG

Bukan hanya merusak fisik dan mental, narkoba sangat berpotensi mengancam eksistensi sebuah bangsa dan negara. Negara bisa hancur, bahkan runtuh. Oleh karena itulah, perang terhadap narkoba harus terus digalakkan. Darurat narkoba di Indonesia sangat perlu dianggap serius oleh semua unsur masyarakat.

Hal tersebut mengemuka saat kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 9 Tahun 2018 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya, Minggu (18/10), di Gedung Rohana Kudus, Padang. Kegiatan ini dilaksanakan Wakil Ketua DPRD Sumbar, Evi Yandri Rajo Budiman.

Ia menegaskan bahwa kalimat "darurat narkoba" yang disebutkan Presiden Jokowi beberapa tahun lalu bukanlah sekadar kata-kata. Bahkan sampai sekarang, peredaran dan penyalahgunaan narkoba masih mengancam negara ini.

"Normalnya, jika kita mendengar kata 'darurat', kita langsung awas dan bergerak bersama. Itulah yang seharusnya kita lakukan dalam memerangi narkoba," kata Evi.

Ia mengimbau peserta untuk mengajak semua kemalan dan keluarga agar ambil bagian secara aktif dalam gerakan mencegah peredaran dan penyalahgunaan narkoba.

Di dalam perda tersebut, hal ini memang telah diatur, termasuk hak dan kewajiban masyarakat, pemerintah, serta seluruh unsur dalam gerakan pencegahan penyalahgunaan narkoba.

"Penyalahgunaan narkoba ini susah untuk diberantas karena banyak faktor. Jika masyarakat membantu secara aktif, hasilnya akan lebih optimal," ujarnya lagi.

Keaktifan masyarakat bisa dimulai dari mengetahui berbagai jenis narkoba dan zat adiktif, memahami ciri-ciri serta gejala pemakai, hingga melakukan pengawasan terhadap anggota keluarga bahkan lingkungan.

"Jika ada sanak saudara yang menggunakan narkoba, bawa ke tempat rehabilitasi. Jika mendengar atau melihat aktivitas penyalahgunaan narkoba, laporkan kepada RT/RW agar bisa dihentikan. Lakukanlah itu. Mari kita pahami bahwa darurat narkoba di negara ini sudah lama terjadi," katanya.

Senada dengan Evi Yandri; Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Sumbar, Mursalim, yang juga menjadi narasumber sosialisasi hari itu, menyebut narkoba sebagai kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang dapat menghancurkan keutuhan bangsa.

Ia mencontohkan sejarah "Perang Candu" di Tiongkok pada abad ke-19. Saat itu, pelemahan generasi muda melalui narkotika menjadi strategi efektif untuk meruntuhkan sebuah negara.

Mursalim menyayangkan sikap sebagian masyarakat yang cenderung pasif dan menutup-nutupi kasus penyalahgunaan narkoba di lingkungan sekitar dengan dalih rasa iba. Ia mencontohkan kasus di kawasan Gaung beberapa tahun lalu, saat aktivitas transaksi sabu sempat dibiarkan oleh warga sekitar sebelum akhirnya ditindak tegas oleh kepolisian.

"Jika masyarakat melihat, mendengar, atau menemukan indikasi penyalahgunaan, segera laporkan. Jangan diam saja. Kami juga mendorong setiap kelurahan untuk membentuk program Kelurahan Bersinar (Bersih dari Narkoba)," tegas Mursalim.

Apresiasi terhadap sosialisasi ini turut disampaikan oleh pihak jajaran kecamatan. Kepala Seksi Perizinan Kecamatan Padang Barat, Ida Puji Astuti, menyatakan bahwa pihak kecamatan siap berkolaborasi penuh dalam mendukung implementasi perda tersebut demi menyelamatkan generasi muda dari ancaman narkotika. (*)



SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
. PROVINSI SUMATERA BARAT







0751 7057591

https://dprd.sumbarprov.go.id/

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
KLIPING BERITA

KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
Haluan	RABU, 21 OKTOBER 2026	8

Wakil Ketua DPRD Sumbar Ajak Masyarakat Perangi Narkoba

PADANG, HALUAN — Ancaman narkoba tidak hanya merusak kesehatan fisik dan mental, tetapi juga mengancam masa depan generasi muda hingga keutuhan bangsa dan negara. Karena itu, upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba membutuhkan keterlibatan aktif seluruh elemen masyarakat.

Hal itu ditegaskan Wakil Ketua DPRD Sumbar, Evi Yandri Raja Budiman, saat menggelar Sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 9 Tahun 2018 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya di Gedung Rohana Kudus, Padang, Minggu (18/10).

Evi mengatakan, kondisi darurat narkoba yang pernah disuarakan Presiden Joko Widodo bukan sekadar peringatan. Hingga kini, peredaran dan penyalahgunaan narkoba masih menjadi ancaman serius yang harus dihadapi bersama.

"Normalnya, jika kita mendengar kata darurat, kita langsung awas dan bergerak bersama. Itulah yang seharusnya kita lakukan dalam memerangi narkoba," kata Evi.

Ia mengimbau masyarakat untuk memulai upaya pencegahan dari lingkungan terdekat, dengan mengajak keluarga, kerabat, dan orang-orang di sekitar agar turut berperan aktif mencegah peredaran serta penyalahgunaan narkoba.

Menurutnya, Perda Nomor 9 Tahun 2018 telah mengatur peran, hak, dan kewajiban masyarakat serta pemerintah dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika. Karena itu, implementasi perda tersebut perlu didukung melalui kepedulian dan keterlibatan nyata masyarakat.

"Penyalahgunaan narkoba ini susah diberantas karena banyak faktor. Jika masyarakat membantu secara aktif, hasilnya akan lebih optimal," ujarnya.

Evi menjelaskan, peran masyarakat dapat dimulai dengan mengenali jenis-jenis narkoba dan zat adiktif, memahami ciri-ciri serta gejala penyalahgunaan, hingga meningkatkan pengawasan terhadap anggota keluarga dan lingkungan sekitar.

Ia juga mengingatkan masyarakat agar tidak menutup mata ketika menemukan indikasi penyalahgunaan narkoba. Anggota keluarga yang terjerat narkoba perlu diarahkan untuk mendapatkan rehabilitasi, sedangkan dugaan aktivitas penyalahgunaan di lingkungan masyarakat harus segera dilaporkan kepada pihak berwenang.

"Jika ada saudara yang menggunakan narkoba, bawa ke tempat rehabilitasi. Jika mendengar atau melihat aktivitas penyalahgunaan narkoba, laporkan kepada RT/RW agar bisa dihentikan. Mari kita pahami bahwa darurat narkoba di negara ini sudah lama terjadi," tuturnya.

Senada dengan Evi, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Sumbar, Mursalim, menyebut narkoba sebagai kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang berpotensi merusak generasi muda dan mengancam keutuhan bangsa.

Ia mencontohkan Perang Candu di Tiongkok pada abad ke-19, ketika penyebaran opium menimbulkan dampak luas terhadap kehidupan masyarakat. Menurutnya, pengalaman sejarah tersebut menjadi pelajaran tentang besarnya bahaya narkotika bagi kekuatan suatu bangsa.



Mursalim menyayangkan masih adanya masyarakat yang memilih diam atau menutupi kasus penyalahgunaan narkoba di lingkungan mereka karena rasa iba. Sikap tersebut justru berpotensi memberi ruang bagi peredaran narkoba untuk terus berkembang.

Ia mencontohkan kasus di kawasan Gaung beberapa tahun lalu, ketika aktivitas transaksi sabu sempat dibiarkan warga sebelum akhirnya ditin

dak tegas oleh kepolisian.

"Jika masyarakat melihat, mendengar, atau menemukan indikasi penyalahgunaan, segera laporkan. Jangan diam saja. Kami juga mendorong setiap kelurahan untuk membentuk program Kelurahan Bersinar (Bersih dari Narkoba)," tegas nya.

Sementara itu, Kepala Seksi Perizinan Kecamatan Padang Barat, Ida Puji Astuti, menyam

but baik pelaksanaan sosialisasi tersebut. Ia menyatakan pihak kecamatan siap berkolaborasi dalam mendukung implementasi Perda Nomor 9 Tahun 2018.

Menurutnya, sinergi antara pemerintah dan masyarakat sangat penting untuk memper kuat upaya pencegahan penya lahgunaan narkoba sekaligus melindungi generasi muda dari ancaman narkotika. (*)









KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
Haluan	KAMIS, 22 OKTOBER 2026	2

Doni Harsiva Sosialisasikan Perda Penanggulangan Bencana di Koto Berapak

PESISIR SELATAN, HALUAN — Anggota DPRD Sumatera Barat, Doni Harsiva Yandra, menyosialisasikan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penanggulangan Bencana di Nagari Koto Berapak, Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan, pada 17–18 Oktober 2026 lalu.

Kegiatan tersebut dihadiri Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sumatera Barat, Ilham Wahab, Wali Nagari Koto Berapak Lazuardi, Ketua Bamus Yunizal, tokoh masyarakat, ninik mamak, *bundo kanduang*, pemuda-pemudi, serta masyarakat setempat.

Doni Harsiva menegaskan bahwa penanggulangan bencana bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan keterlibatan aktif seluruh elemen masyarakat. Menurutnya, pemahaman terhadap regulasi dan langkah-langkah mitigasi bencana sangat penting untuk meningkatkan kesadaran bersama dalam mengurangi risiko serta meminimalkan dampak bencana.

"Sosialisasi ini bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya penanggulangan bencana sekaligus menyebarluaskan informasi tentang Perda Sumbar Nomor 4 Tahun 2023 sebagai landasan dalam upaya penanggulangan bencana di daerah," katanya, Rabu (21/10).

Doni berharap, kegiatan tersebut memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Nagari Koto Berapak, terutama dalam meningkatkan kesiapsiagaan dan kesadaran terhadap risiko bencana.

"Semoga kegiatan ini membawa manfaat besar bagi masyarakat Nagari Koto Berapak, khususnya dalam mitigasi bencana dan meningkatkan kesadaran untuk mengurangi risiko bencana dengan bersama-sama menjaga lingkungan," ujarnya.

Ia mengajak masyarakat untuk berperan aktif menjaga lingkungan dan membangun kesiapsiagaan sebagai bagian dari upaya mengurangi risiko bencana di wilayah masing-masing. **(h/rel)**



DONI Harsiva Yandra sosialisasikan Perda Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penanggulangan Bencana di Nagari Koto Berapak. IST

0751 7057591 https://dprd.sumbarprov.go.id/

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

KLIPING BERITA

KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
KORAN PADANG	KAMIS, 22 OKTOBER 2026	12

Muhidi Dorong Pembangunan Berkelanjutan, Jalan Lingkungan Limau Manis Selatan Mulai Berbenah

PENGASPALAN Jalan Fisika I dan Fisika II di Kelurahan Limau Manis Selatan, Kecamatan Pauh, Kota Padang, kini resmi dimanfaatkan warga setempat setelah usulan perbaikannya diperjuangkan sejak tahun 2024. Pengaspalan jalan tersebut terealisasi melalui program pembangunan yang diperjuangkan Ketua DPRD Sumbar Muhidi dengan fasilitasi anggota DPRD Padang Rafdi.

Atas terealisasinya pembangunan infrastruktur jalan lingkungan tersebut, masyarakat setempat menggelar syukuran, Minggu (18/10). Acara ini turut dihadiri langsung Muhidi dan Rafdi, tokoh masyarakat Mustiar Kasim, serta pengurus RT/RW setempat.

Ketua RT 03 Kelurahan Limau Manis Selatan, Bahrizal Basir, mengapresiasi kolaborasi erat antara Muhidi dan Rafdi yang sukses memperjuangkan aspirasi jalan warga hingga diaspal mulus.

"Alhamdulillah, usulan sejak 2024 akhirnya terealisasi. Kami sangat berterima kasih kepada Bapak Muhidi dan Bapak Rafdi. Kami berharap perbaikan dapat berlanjut ke ruas jalan sekitar MDA agar seluruh akses tersambung sempurna ke jalan utama," ungkap Bahrizal.

Anggota DPRD Padang, Rafdi menjelaskan, pengaspalan di Blok B sepanjang lebih dari 200 meter tersebut merupakan hasil sinergi dan kolaborasi anggaran daerah. Ke depan, pihaknya berencana mendorong penyediaan fasilitas umum pendukung seperti gedung serbaguna bagi warga.

Sementara itu, Ketua DPRD Sumbar Muhidi menegaskan bahwa pembangunan daerah tak hanya berfokus pada fisik semata, melainkan juga pemberdayaan kapasitas ekonomi masyarakat melalui pelatihan UMKM dan literasi pendidikan.

"Pembangunan butuh kemauan untuk berkolaborasi. Apa yang sudah dibangun mari kita jaga bersama lewat semangat gotong royong agar manfaatnya bertahan lama," pungkas Muhidi. *





KETUA *DPRD Sumbar Muhidi memberikan arahan kepada warga setempat pada acara syukuran atas selesainya pengaspalan jalan lingkungan.*



KETUA *DPRD Sumbar Muhidi bersama Anggota DPRD Padang Rafdi, mantan Rektor Unand Musliar Kasim, dan tokoh masyarakat duduk bersama pada acara syukuran pengaspalan Jalan Fisika I dan II di Limau Manis Selatan, Padang.*



KETUA *DPRD Sumbar Muhidi bersama rombongan dan tokoh masyarakat meninjau langsung kondisi Jalan Fisika yang telah diaspal mulus.*



KETUA *DPRD Sumbar Muhidi menyapa warga dan anak-anak dengan hangat di lokasi syukuran pengaspalan jalan.*



KETUA *DPRD Sumbar Muhidi beramah-tamah dengan warga serta tokoh masyarakat Limau Manis Selatan usai acara syukuran.*



SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
KLIPING BERITA

KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
SINGGALANG	Sabtu, 24 Oktober 2026 (12 Jumadil Awal 1448 H)	9

Pimpinan dan Anggota Dewan Intensifkan Sosialisasi Perda

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) terus aktif melaksanakan sosialisasi peraturan daerah (perda) kepada masyarakat.

Sosialisasi perda ini dilaksanakan secara berkala dan menjadi agenda rutin. Seluruh unsur pimpinan dan anggota DPRD melaksanakan sosialisasi perda tersebut di daerah pemilihan (dapil) masing-masing.

Perda yang disosialisasikan beragam dan berbeda-beda. Namun, secara keseluruhan merupakan perda-perda yang baru saja ditetapkan dan diberlakukan di Sumbar.

Ketua DPRD Sumbar, Muhidi, menyosialisasikan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Sumbar di Padang, baru-baru ini.

Muhidi menyoroti maraknya alih fungsi lahan dan penyempitan drainase akibat pembangunan hunian yang mengabaikan aspek lingkungan.

"Perda ini bukan sekadar dokumen administratif, melainkan instrumen hukum adaptasi lingkungan. Konstruksi bangunan yang menutup jalur aliran air secara ilegal menjadi pemicu utama genangan ekstrem saat curah hujan tinggi," ujarnya.

Menurut Muhidi, pengawasan preventif harus diperketat sejak tahap perencanaan tata letak bangunan. Ia mengimbau masyarakat untuk memastikan legalitas dan kelayakan geografis lahan sebelum mendirikan bangunan guna meminimalkan risiko hidrometeorologi.

Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Sumbar, Yomike Yusra, menjelaskan bahwa Perda RPPLH mengintegrasikan daya dukung dan daya tampung lingkungan ke dalam rencana pembangunan jangka panjang. Indikator keberhasilan perda ini diukur dari stabilitas kualitas udara, ketersediaan air bersih, dan ketahanan sektor agraria.

Yomike juga mengingatkan karakteristik polusi udara lintas batas, seperti kabut asap, yang penanganannya memerlukan standardisasi regulasi antarwilayah.

"Persoalan ekologi tidak dibatasi oleh sekat administratif. Oleh karena itu, edukasi publik harus melibatkan struktur adat seperti cadiak pandai dan Bundo Kanduang untuk menggeser paradigma masyarakat menuju konsep permukiman hijau," katanya.

Perda Nomor 2 Tahun 2020 ini diadopsi berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Regulasi ini mengikat secara hukum bagi pemerintah daerah, sektor korporasi, hingga tingkat rumah tangga di Sumbar.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Sumbar, Evi Yandri Rajo Budiman, menggelar Sosialisasi Peraturan Daerah (Sosper) Nomor 9 Tahun 2018 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya di Gedung Rohana Kudus, Padang, Minggu (18/10).

Evi menegaskan, status darurat narkoba bukan sekadar retorika karena peredarannya nyata-nyata mengancam eksistensi negara.

"Jika mendengar kata darurat, kita harus langsung awas dan bergerak bersama. Perang terhadap narkoba memerlukan keterlibatan aktif seluruh lapisan masyarakat agar hasilnya optimal," ujar Evi.

Menurutnya, Perda Nomor 9 Tahun 2018 telah mengatur jelas hak dan kewajiban masyarakat serta pemerintah dalam pencegahan. Warga diimbau mengenali jenis narkoba, memahami gejala penggguna, serta memperketat pengawasan keluarga. "Bawa saudara yang terindikasi memakai narkoba ke tempat rehabilitasi. Jika melihat aktivitas mencurigakan, segera laporkan ke RT/RW," imbuhnya.

Senada dengan itu, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Sumbar, Mursalim, selaku narasumber, menyebut narkoba sebagai kejahatan luar biasa (extraordinary crime). Ia berkaca pada sejarah Perang Candu di Tiongkok abad ke-19, di mana narkotika menjadi senjata efektif untuk meruntuhkan sebuah bangsa melalui pelemahan generasi muda.

Mursalim menyayangkan sikap sebagian warga yang cenderung pasif atau menutup-nutupi kasus narkoba di lingkungannya karena rasa iba yang salah.

"Jangan diam saja. Segera laporkan indikasi penyalahgunaan. Kami juga mendorong pembentukan program Kelurahan Bersinar (Bersih dari Narkoba)," tegas Mursalim.

Apresiasi dan dukungan terhadap sosialisasi perda ini turut disampaikan oleh Kepala Seksi Perizinan Kecamatan Padang Barat, Ida Puji Astuti. Ia menyatakan jajaran kecamatan siap berkolaborasi penuh demi menyelamatkan generasi muda dari ancaman narkotika.



KLIPING BERITA

Di lokasi berbeda, Anggota DPRD Sumbar, Ali Muda, mengajak generasi muda menjauhi narkoba dan kenakalan remaja. Hal itu ia sampaikan saat menyosialisasikan Peraturan Daerah (Perda) Sumbar Nomor 12 Tahun 2017 tentang Kepemudaan di Kogusda Unit 1 Rao, Nagari Taruang-Taruang, Kecamatan Rao, Kabupaten Pasaman, Sabtu (17/10).

Ali menegaskan bahwa pemuda memegang peran krusial dalam menyongsong Indonesia Emas 2045. Oleh karena itu, generasi muda harus membekali diri dengan pengetahuan, keterampilan, dan karakter yang kuat.

"Pemuda adalah generasi penerus yang menentukan masa depan bangsa. Kita butuh pemuda berkualitas, kreatif, dan berkontribusi nyata bagi pembangunan," ujarnya.

Menurut Ali, tantangan zaman saat ini makin berat. Maraknya kenakalan remaja dan penyalahgunaan narkoba menjadi ancaman nyata yang membutuhkan perhatian bersama dari keluarga, lingkungan, hingga pemerintah. Ia mengimbau para pemuda mengalihkan energi mereka ke sektor produktif seperti olahraga, wirausaha, dan kegiatan sosial.

"Jangan sampai terjerumus pergaulan yang merusak masa depan. Manfaatkan waktu untuk mengasah bakat dan kemampuan," tambahnya.

Ali berharap agenda ini tidak sekadar menjadi seremonial belaka. Sosialisasi ini ditargetkan mampu memlongkrak kesadaran pemuda di Pasaman mengenai hak, kewajiban, dan tanggung jawab mereka dalam bermasyarakat.

Acara tersebut turut dihadiri Kepala Bidang Pengembangan Pemuda Dispora Sumbar, Ilmi; Wakil Ketua DPRD Pasaman, Harisudin; serta Sekretaris Nagari Taruang-Taruang, Rajab.

Tak ketinggalan, Anggota DPRD Provinsi Sumbar, Sitti Izzati Azis, menyosialisasikan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penanggulangan Bencana di Aula SMA Negeri 1 Lubuk Alung, Sabtu (17/10).

Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kesadaran dan membekali masyarakat dengan pengetahuan tindakan sebelum, saat, dan setelah bencana terjadi.

"Kita tidak ingin bencana terjadi, tetapi masyarakat harus memahami langkah penyelamatan diri dan mitigasi. Dengan begitu, warga akan lebih siap menghadapi situasi darurat serta mampu meminimalisasi risiko dampak bencana," ujar Sitti.

Ia menekankan bahwa pemahaman kebencanaan tidak cukup hanya dengan mengetahui potensi ancaman di lingkungan sekitar. Masyarakat juga wajib mengenali prosedur evakuasi, lokasi aman, serta tindakan tepat untuk melindungi keluarga. Kesiapsiagaan tersebut dinilai perlu dibangun secara berkelanjutan melalui edukasi yang konsisten.

Lebih lanjut, Sitti menjelaskan bahwa Perda Nomor 4 Tahun 2023 merupakan landasan hukum penyelenggaraan penanggulangan bencana di Sumbar. Sosialisasi ini sekaligus menjadi bagian dari pelaksanaan fungsi DPRD dalam mendekatkan kebijakan daerah kepada konstituen.

Sebagai unsur penyelenggara pemerintahan, Sitti memaparkan bahwa DPRD memiliki tiga fungsi utama, yakni pembentukan peraturan daerah, penganggaran, dan pengawasan. Melalui ketiga fungsi tersebut, DPRD berkomitmen memastikan regulasi serta alokasi anggaran penanggulangan bencana berjalan optimal dan tepat sasaran.

Ia berharap sosialisasi ini memicu peran aktif masyarakat dalam membangun ketangguhan bencana di lingkungan masing-masing.

Wakil Ketua DPRD Sumbar, Nanda Satria, mengajak generasi muda meningkatkan kepedulian dan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana. Ajakan ini disampaikan Nanda saat Sosialisasi Peraturan Daerah (Sosper) Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penanggulangan Bencana Daerah bersama pengurus Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Sumbar, Sabtu (17/10).

Menurut Nanda, sosialisasi ini krusial mengingat Sumbar merupakan wilayah berpotensi bencana tinggi. Apalagi menjelang akhir tahun, curah hujan cenderung meningkat sehingga risiko banjir dan tanah longsor ikut mengintai.

"Ini menjadi momentum bagi kita semua. Menjelang akhir tahun, curah hujan cenderung meningkat. Kondisi ini harus menjadi perhatian dan kewaspadaan bersama," ujar Nanda.

Nanda mengingatkan ancaman bencana di Sumbar sangat kompleks, mulai dari gempa bumi, tsunami, kebakaran hutan, erupsi gunung api, kekeringan, hingga angin kencang. Oleh karena itu, pemahaman mitigasi harus dibangun sejak dini agar masyarakat paham langkah preventif, tanggap darurat, hingga pemulihan.

Perda No. 4/2023 ini diharapkan menumbuhkan kesadaran kolektif bahwa penanggulangan bencana bukan hanya tanggung jawab pemerintah, melainkan peran aktif generasi muda sebagai relawan garda terdepan.

Sementara itu, Pejabat Fungsional Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Sumbar, Akli El Bana, memaparkan bahwa bencana tidak hanya dipicu faktor alam, tetapi juga aktivitas manusia dan persoalan sosial seperti konflik antarkelompok. Akli menegaskan, penanggulangan bencana harus terencana, terpadu, dan berkesinambungan melalui kebijakan pembangunan berbasis risiko, pencegahan, tanggap darurat, hingga rehabilitasi.

"Di sinilah pentingnya kesiapsiagaan. Kita harus mampu mengantisipasi potensi bencana melalui pengorganisasian langkah yang tepat dan berdaya guna," kata Akli.(*)








SOSIALISASI PERDA





K	N









SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

KLIPING BERITA

KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
Haluan	SABTU, 24 OKTOBER 2026	4

PERKUAT KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

Sekretariat DPRD Sumbar Kembangkan 19 Inovasi Layanan

PADANG, HALUAN— Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) terus memperkuat keterbukaan informasi publik melalui optimalisasi media sosial, media massa, dan layanan digital. Langkah ini dilakukan untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi mengenai kegiatan, kebijakan, serta kinerja pimpinan dan anggota DPRD.

Komitmen tersebut disampaikan Sekretaris DPRD Sumbar, Maifrizon, didampingi Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan, Dahrul Idris, dalam presentasi Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik 2026 yang digelar Komisi Informasi (KI) Sumbar di Aula Kantor Bappeda Sumbar, Kamis (22/10).

Dalam presentasi itu, Sekretariat DPRD Sumbar memaparkan capaian publikasi, inovasi pelayanan, serta strategi pengembangan keterbukaan informasi. Salah satu capaian yang disorot adalah meningkatnya jangkauan media sosial resmi DPRD Sumbar sepanjang 2024-2026.

Data presentasi menunjukkan, jumlah pengikut Instagram DPRD Sumbar meningkat dari 4.484 pada 2024 menjadi 10.200 pada 2026. Jangkauan akun juga naik dari 306.000 menjadi 870.600, sedangkan jumlah unggahan bertambah dari 2.148 menjadi 5.180.

Peningkatan serupa terlihat pada platform digital lainnya. Jumlah pelanggan YouTube DPRD Sumbar naik dari 639 menjadi 766, dengan jumlah video bertambah dari 209 menjadi 249. Sementara itu, pengikut TikTok meningkat dari 1.667 menjadi 2.094 dan jumlah suka bertambah dari 12.900 menjadi 18.800.

Adapun akun Facebook DPRD Sumbar tercatat memiliki sekitar 6.700 pengikut, sedangkan akun X atau Twitter memiliki 273 pengikut.

Selain memanfaatkan media digital, DPRD Sumbar juga mendekatkan diri kepada masyarakat melalui kegiatan yang melibatkan partisipasi publik, seperti Jalan Sehat Bersama Parlemen. Kegiatan tersebut menjadi ruang bagi masyarakat untuk berinteraksi langsung dengan pimpinan dan anggota DPRD sekaligus membangun kebersamaan.

Maifrizon menyampaikan, pengembangan keterbukaan informasi didukung peningkatan kompetensi sumber daya manusia, penguatan pelayanan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), serta kerja sama dengan wartawan parlemen untuk menyebarluaskan informasi mengenai aktivitas dan kinerja kedewanan.

Strategi publikasi tersebut mengusung motto Cepat Diterima, Mudah Dicerna (CDMD). Melalui pendekatan ini, informasi diharapkan tidak hanya cepat sampai kepada masyarakat, tetapi juga mudah dipahami.

Publikasi DPRD Sumbar juga diarahkan untuk menjangkau aktivitas anggota dewan di lapangan, konsultasi publik, dialog dengan masyarakat, hingga kegiatan sosial di daerah. Dengan begitu, informasi yang disampaikan tidak hanya berkutat pada agenda formal, tetapi juga menggambarkan persoalan dan kebutuhan masyarakat yang menjadi perhatian lembaga perwakilan rakyat.

Untuk memperkuat pelayanan informasi, Sekretariat DPRD Sumbar turut memaparkan 19 inovasi di bidang publikasi, dokumentasi, literasi, dan pelayanan masyarakat.

Inovasi tersebut meliputi Kios Layanan PPID, Kios Layanan JDIH, layanan disabilitas, aplikasi E-PPID, Pojok



Baca Digital, Mimbar DPRD, Repository Produk Hukum, TV Agenda, videowall, aplikasi ASIK untuk aspirasi publik, E-Kliping, aplikasi KuBe (Kumpulan Berita), E-Pustaka, Podcast ASIK, aplikasi Agenda ASIK, Buku Tamu Digital ASIK, kerja sama perpustakaan digital, storytelling, serta manajemen kendaraan.

Sejumlah inovasi tersebut berkaitan langsung dengan kemudahan masyarakat mengakses informasi. Kios Layanan PPID memfasilitasi permohonan informasi publik, sedangkan Kios Layanan JDIH membantu masyarakat menelusuri dokumen hukum.

Aplikasi ASIK disiapkan sebagai sarana penyampaian aspirasi kepada anggota DPRD. Sementara itu, E-Kliping dan KuBe mendukung dokumentasi serta penyebaran pemberitaan mengenai aktivitas DPRD yang dipublikasikan melalui berbagai media.

Sekretariat DPRD Sumbar juga menyediakan fasilitas pendukung pelayanan, seperti fasilitas bagi penyandang disabilitas, ruang laktasi, dan klinik kesehatan. Adapun TV Agenda digunakan untuk menyampaikan informasi mengenai jadwal dan lokasi rapat DPRD. (*)



Sekretaris DPRD Sumbar, Maifrizon, didampingi Kabag Persidangan dan Perundang-undangan, Dahrul Idris saat presentasi Monev Keterbukaan Informasi Publik 2026 yang digelar KI Sumbar



Sekretaris DPRD Sumbar, Maifrizon, didampingi Kabag Persidangan dan Perundang-undangan, Dahrul Idris memaparkan inovasi pelayanan yang dimiliki Sekretariat DPRD Sumbar



Kegiatan presentasi Monev Keterbukaan Informasi Publik 2026 yang digelar Komisi Informasi (KI) Sumbar



Berfoto bersama

BREAKING NEWS!
0751 7057591
https://dprd.sumbarprov.go.id/

122

KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
KORAN PADANG	JUMAT, 23 OKTOBER 2026	12

MONEV KI SUMBAR 2026

Sekretariat DPRD Paparkan Capaian Publikasi dan Inovasi Layanan

SEKRETARIAT DPRD Provinsi Sumatera Barat terus memperkuat keterbukaan informasi publik melalui penguatan media sosial, media massa, serta optimalisasi layanan digital guna mempermudah akses masyarakat terhadap kinerja dan kebijakan kedewanan.

Komitmen tersebut disampaikan Sekretaris DPRD Sumbar, Maifrizon, didampingi Kabag Hukum dan Perundang-undangan Dahrul Idris, saat memaparkan presentasi Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik 2026 di Aula Kantor Bappeda Sumbar, Kamis (22/10).

Dalam pemaparan di hadapan tim penilai Komisi Informasi (KI) Sumbar, Maifrizon menyoroti lonjakan signifikan jangkauan media sosial resmi DPRD Sumbar sepanjang 2024–2026. Akun Instagram resmi tercatat mengalami kenaikan pengikut dari 4.484 menjadi 10.200 akun, dengan jangkauan meroket hingga 870.600 serta total 5.180 unggahan.

"Pengembangan media digital ini mengusung motto Cepat Diterima, Mudah Dicerna (CDMD). Informasi mengenai agenda dewan, konsultasi publik, hingga kegiatan lapangan anggota DPRD kita sajikan secara cepat dan mudah dipahami masyarakat," terang Maifrizon.

Guna mendukung keterbukaan informasi yang inklusif, Sekretariat DPRD Sumbar turut memamerkan 19 inovasi layanan. Beberapa di antaranya meliputi Kios Layanan PPID, Kios Layanan JDIH, aplikasi E-PPID, Pojok Baca Digital, Podcast ASIK, hingga aplikasi ASIK untuk penampungan aspirasi masyarakat.

Di samping itu, Sekretariat DPRD Sumbar juga melengkapi gedung dewan dengan fasilitas ramah disabilitas, ruang laktasi, serta TV Agenda Rapat. Penguatan publikasi ini turut disokong oleh penambahan SDM tim kreatif, kolaborasi bersama wartawan parlemen, dan rekam jejak prestasi sebagai Badan Publik Informatif periode 2020–2025. *



SEKRETARIS *DPRD Sumbar Maifrizon memaparkan materi presentasi mengenai penguatan saluran komunikasi digital dan 19 inovasi layanan publik DPRD Sumbar di hadapan penguji.*





SEKRETARIS *DPRD Sumbar Malfrizon bersama Kabag Hukum dan Perundang-undangan Dahrul Idris foto bersama tim penilai Komisi Informasi (KI) Sumbar usai sesi presentasi Monev Keterbukaan Informasi Publik 2026 di Aula Bappeda Sumbar.*



SEKRETARIS *DPRD Sumbar Malfrizon bersama Kabag Hukum dan Perundang-undangan Dahrul Idris menyimak tanggapan dan masukan dari tim penilai Komisi Informasi Sumbar.*



SUASANA *sesi pemaparan dan uji kepatuhan Monev Keterbukaan Informasi Publik 2026 yang diikuti jajaran Sekretariat DPRD Sumbar di Aula Kantor Bappeda Sumbar.*



SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

KLIPING BERITA

KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
SINGGALANG	Senin, 26 Oktober 2026 (14 Jumadil Awal 1448 H)	4

KETUA DPRD SUMBAR, MUHIDI :

Masjid Mesti Jadi Ruang Aman dan Edukatif bagi Anak

PADANG - SINGGALANG

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat (Sumbar), Muhidi mendorong transformasi masjid di Sumbar agar tidak sekadar menjadi tempat ibadah ritual, melainkan juga ruang yang aman, nyaman, dan edukatif bagi anak-anak. Langkah strategis ini dinilai krusial sebagai fondasi dalam membentuk karakter dan keimanan generasi muda di tengah tantangan perubahan zaman.

Komitmen tersebut ditegaskan Muhidi saat memberikan materi pada Bimbingan Teknis (Bimtek) Konvensi Hak Anak (KHA) dalam rangka mewujudkan Rumah Ibadah Ramah Anak (RIRA) di Kota Padang, Jumat (23/10).

Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat pemahaman mengenai perlindungan dan pemenuhan hak anak di lingkungan rumah ibadah.

Menurut Muhidi, pendidikan generasi muda tidak dapat hanya mengandalkan institusi sekolah formal. Diperlukan kolaborasi yang kuat antara pengurus masjid, keluarga, dan lingkungan masyarakat agar anak-anak memperoleh perlindungan serta pendampingan yang berkelanjutan.

Ia menilai, masjid harus menjadi ruang yang menumbuhkan kecintaan terhadap ibadah sekaligus memberikan kesempatan kepada anak untuk belajar dan berinteraksi sosial.

"Anak-anak kita harus dibekali ilmu, keterampilan, keimanan, dan pengalaman. Semua itu akan lebih mudah mereka jalani ketika merasa nyaman dengan lingkungan tempat mereka tumbuh dan belajar," ujar Muhidi.

Lebih lanjut, ia mengajak masyarakat untuk membiasakan anak-anak dekat dengan masjid sejak usia dini melalui pendekatan yang menyenangkan dan penuh kasih sayang. Pengelola rumah ibadah diharapkan mampu menghadirkan suasana yang bersahabat agar anak merasa diterima, termasuk memberikan ruang bermain yang wajar tanpa mengabaikan ketertiban dan kesakralan ibadah.

Sebagai langkah konkret, Muhidi meluncurkan gagasan program satu kelurahan satu masjid ramah anak. Program ini diharapkan memperkuat pendidikan karakter berbasis nilai agama, seperti kedisiplinan, kepedulian, dan tanggung jawab sosial. Penguatan peran masjid ini juga memiliki arti historis bagi Sumbar yang dikenal memiliki sejarah panjang dalam melahirkan tokoh-tokoh besar dunia, seperti Buya Hamka dan Sutan Sjahrir.

Kendati demikian, politisi tersebut menyadari bahwa merealisasikan masjid ramah anak menghadapi tantangan besar, terutama dalam mengubah paradigma dan membangun kesadaran bersama di masyarakat.

"Saya berharap pengurus MTI (Majelis Taklim Indonesia) serta seluruh elemen masyarakat untuk menghadapi dinamika zaman ini secara bersama-sama dengan pendekatan yang persuasif, tenang, dan tanpa paksaan," katanya lagi.

Realisasi program Rumah Ibadah Ramah Anak ini juga memerlukan standardisasi infrastruktur dan fasilitas penunjang yang memadai. Masjid-masjid di Sumbar diharapkan mulai berbenah dengan menyediakan sarana fisik yang aman bagi anak, seperti ruang laktasi bagi ibu menyusui, tempat wudu khusus anak, hingga ketersediaan pojok baca atau literasi keagamaan yang menarik.

Pemenuhan fasilitas ini bukan bermaksud mengubah esensi masjid, melainkan bentuk adaptasi lingkungan ibadah agar lebih inklusif terhadap kebutuhan tumbuh kembang fisik dan mental generasi muda.

"Semoga gerakan ini akan menjadi pilar utama dalam mewujudkan provinsi yang madani dan sejahtera," tutornya.

Melalui integrasi antara pemenuhan hak anak dan penguatan nilai keagamaan di masjid, Sumbar diproyeksikan mampu mencetak generasi penerus yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki ketahanan moral yang kokoh. Upaya kolektif ini diharapkan dapat mengembalikan fungsi historis masjid Minangkabau sebagai pusat peradaban, tempat bermaung, sekaligus kawah candradimuka pembentukan akhlak mulia sejak usia dini.(*)








Hotel Rocky Padang tanggal 23-


BIMTEK
HAK ANAK
Dalam Rangka Mewujudkan Rumah Ibadah Ramah Anak (RIRA)
Angkatan ke-7


BREAKING
NEWS !
0751 7057591
https://dprd.sumbarprov.go.id/

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

KLIPING BERITA

KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
Haluan	SENIN, 26 OKTOBER 2026	8

Ketua DPRD Sumbar Dorong Masjid Ramah Anak

PADANG, HALUAN — Masjid bukan sekadar tempat menunaikan ibadah, tetapi juga memiliki peran penting dalam membentuk karakter generasi muda. Pesan ini ditekankan Ketua DPRD Sumbar, Muhidi saat mengisi Bimbingan Teknis (Bimtek) Konvensi Hak Anak (KHA) untuk mewujudkan Rumah Ibadah Ramah Anak (RIRA) di Rocky Hotel Kota Padang, Jumat (23/10).

Muhidi menegaskan, mewujudkan Rumah Ibadah Ramah Anak merupakan langkah strategis untuk menghadirkan lingkungan keagamaan yang aman, nyaman, dan edukatif bagi anak-anak. Menurutnya, masjid harus menjadi ruang yang mampu menumbuhkan kecintaan terhadap ibadah sekaligus memberikan kesempatan kepada generasi muda untuk belajar, berkembang, dan mengenal nilai-nilai kebaikan sejak dini.

Upaya menjadikan masjid ramah anak juga menjadi bagian penting dalam menjawab tantangan pembinaan generasi muda di tengah perubahan zaman. Anak-anak membutuhkan lingkungan yang tidak hanya memberikan pengetahuan agama, tetapi juga menanamkan sikap saling menghormati, kedisiplinan, kepedulian, dan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari.

Muhidi menekankan, keberhasilan program Rumah Ibadah Ramah Anak tidak bisa hanya dibebankan kepada pengurus masjid. Diperlukan kolaborasi yang kuat antara pengurus masjid, keluarga, dan lingkungan masyarakat agar anak-anak memperoleh perlindungan serta pendampingan yang berkelanjutan, baik ketika berada di rumah, di lingkungan sosial, maupun saat mengikuti kegiatan keagamaan.

Dalam penerapannya, masjid ramah anak perlu menghadirkan suasana yang bersahabat bagi anak-anak, tanpa mengabaikan ketertiban dan kesakralan tempat ibadah. Lingkungan yang bersih, aman, nyaman, serta kegiatan keagamaan yang sesuai dengan kebutuhan perkembangan anak dapat menjadi pintu masuk untuk membangun kedekatan mereka dengan masjid.

Lebih dari itu, Rumah Ibadah Ramah Anak diharapkan mampu memperkuat pendidikan karakter berbasis nilai-nilai agama. Pembinaan akhlak, kecerdasan spiritual, dan sikap luhur perlu dilakukan secara konsisten agar anak-anak tumbuh menjadi pribadi yang berintegritas, menghargai sesama, serta memiliki kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungannya.

Bimtek Konvensi Hak Anak menjadi momentum penting untuk memperkuat pemahaman mengenai perlindungan dan pemenuhan hak anak di lingkungan rumah ibadah. Melalui pemahaman tersebut, pengelola masjid diharapkan dapat membangun pendekatan yang lebih peduli terhadap kebutuhan anak, termasuk menciptakan suasana yang mendukung tumbuh kembang mereka secara positif.

Bagi Sumatera Barat, penguatan peran masjid sebagai pusat pembinaan umat memiliki arti penting dalam menjaga keberlanjutan nilai-nilai keagamaan dan budaya luhur. Kolaborasi antara keluarga, pengurus masjid, dan masyarakat diharapkan mampu menjadikan rumah ibadah sebagai tempat yang tidak hanya memperkuat hubungan manusia dengan Allah SWT, tetapi juga menumbuhkan kepedulian, kasih sayang, dan tanggung jawab sosial.

Pesan Muhidi dalam Bimtek KHA tersebut menegaskan bahwa masa depan generasi muda perlu dipersiapkan melalui lingkungan yang mendukung pertumbuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial anak. Dengan mendorong terwujudnya Rumah Ibadah Ramah Anak, masjid diharapkan semakin berperan sebagai ruang pembelajaran dan pembentukan akhlak, sekaligus menjadi fondasi untuk melahirkan generasi Sumatera Barat yang beriman, berkarakter, dan siap menghadapi tantangan masa depan. (*)





BIMBINGAN Teknis (Bimtek) Konvensi Hak Anak (KHA) untuk mewujudkan Rumah Ibadah Ramah Anak (RIRA) yang digelar di Rocky Hotel Kota Padang



Berfoto bersama



KETUA DPRD Sumber, Muhidi



PESERTA Bimtek Konvensi Hak Anak saat sesi tanya jawab

KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
KORAN PADANG	SENIN, 26 OKTOBER 2026	6

Anak Penyandang CP Butuh Pendampingan Psikologis dan Terapi Jangka Panjang

PADANG, KP - Anggota DPRD Sumbar dari Fraksi PKS, Rafdinal, menegaskan pentingnya kepedulian bersama agar anak-anak dengan cerebral palsy (CP) memperoleh perawatan serta dukungan psikologis yang berkelanjutan. Pernyataan itu disampaikan Rafdinal saat menghadiri peringatan Hari Cerebral Palsy Sedunia di Gedung DPRD Sumbar, Sabtu (24/10).

Peringatan Hari Cerebral Palsy Sedunia (World Cerebral Palsy Day) 2026 menjadi momentum krusial untuk memperkuat perhatian publik terhadap kebutuhan terapi dan pendampingan anak dengan cerebral palsy (CP).

Kegiatan yang diinisiasi Yayasan Rumah Gadang (Raga) CP berkolaborasi dengan Departemen Psikologi Universitas Andalas tersebut mengusung tema 'Unik dalam Cerita, Bersama Lebih Kuat' (#UniqueAndUnited).

"Anak-anak penyandang disabilitas, khususnya dengan CP, membutuhkan perhatian penuh dari keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Perawatan dan terapi jangka panjang menjadi kebutuhan utama yang harus terus kita dukung bersama," ujar Rafdinal.



ANGGOTA *DPRD Sumbar Rafdinal berfoto bersama jajaran pengurus Yayasan Raga CP, akademisi Universitas Andalas, serta anak-anak penyandang cerebral palsy dan para orang tua usai peringatan Hari Cerebral Palsy Sedunia 2026 di Gedung DPRD Sumbar, Sabtu (24/10).*

Ia menekankan pentingnya edukasi pengasuhan serta pendampingan mental bagi para orang tua. Mengingat sebagian besar latihan pemulihan dilakukan di rumah, penguatan kapasitas keluarga menjadi kunci utama tumbuh kembang anak.

Sementara itu, Sekretaris Dinas Sosial Sumbar, Lili Fitriani mewakili gubernur, menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan lingkungan yang inklusif dan ramah disabilitas.

Ketua Yayasan Raga CP, Raisa Karima menambahkan bahwa acara ini menjadi wadah berharga bagi orang tua untuk saling menguatkan, berbagi cerita, serta berdiskusi langsung dengan tim pakar psikologi Unand. **(fal)**



KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
KORAN PADANG	SENIN, 26 OKTOBER 2026	12

Muhidi Ajak Masjid Jadi Pusat Pembinaan Karakter Anak

PENGURUS masjid didorong untuk mentransformasi fungsi rumah ibadah agar lebih inklusif terhadap tumbuh kembang anak. Langkah ini dinilai efektif untuk membendung berbagai pengaruh negatif eksternal sekaligus membentuk mentalitas generasi muda yang berakhlak dan berkarakter.

Hal tersebut ditegaskan Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Muhidi saat menjadi pemateri Bimbingan Teknis Konvensi Hak Anak (KHA) di Rocky Hotel, Kota Padang, Jumat (23/10). Ia mendorong pengurus tempat ibadah untuk menerapkan konsep Rumah Ibadah Ramah Anak (RIRA).

"Masjid perlu menghadirkan lingkungan yang aman dan nyaman agar anak-anak tidak hanya mengenal ajaran agama, tetapi juga tumbuh dengan akhlak dan perilaku yang baik," kata Muhidi.

Diterangkannya, rumah ibadah memiliki potensi besar untuk menjadi pusat pendidikan moral di luar lingkungan rumah dan sekolah. Selain difungsikan sebagai lokasi salat, ruang masjid dapat dimanfaatkan bagi interaksi sosial yang menanamkan nilai kejujuran, kepedulian, dan disiplin sejak usia dini.

Menurutnya, keberhasilan pembinaan ini menuntut adanya keselarasan langkah antara pengurus masjid, para orang tua, serta tokoh masyarakat sekitar. Lingkungan tempat ibadah harus dijaga kebersihannya serta menyajikan kegiatan keagamaan yang mengakomodasi kebutuhan peserta didik.

"Sinergi antara pengurus masjid, keluarga, dan masyarakat sangat menentukan agar anak memperoleh perhatian, perlindungan, dan pendidikan yang berkesinambungan," tuturnya.

Melalui kedekatan yang terbangun sejak awal, anak-anak diharapkan merasa diterima serta nyaman beraktivitas di lingkungan masjid.

Muhidi meyakini bahwa pola pengasuhan berbasis tempat ibadah ini mampu memperkuat fondasi keimanan sekaligus kepedulian sosial generasi muda di Sumatera Barat. *



KLIPING BERITA



KETUA *DPRD Sumbar Muhidi memaparkan materi pentingnya penguatan peran masjid sebagai Rumah Ibadah Ramah Anak dalam mencetak generasi berkarakter mulia.*



KETUA *DPRD Sumbar Muhidi foto bersama para peserta dan panitia Bimtek Konvensi Hak Anak dengan memperagakan salam 'Stop Kekerasan pada Anak' di Rocky Hotel Padang.*



PARA *peserta Bimtek Konvensi Hak Anak yang terdiri dari pengurus masjid dan tokoh masyarakat menyimak materi pembekalan terkait konsep Rumah Ibadah Ramah Anak.*



SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

KLIPING BERITA

KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
Rakyat Sumbar	SENIN 26 OKTOBER 2026	10

Pengembangan KIP Didukung Peningkatan Kompetensi SDM

Padang, Rakyat Sumbar— Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) terus memperkuat keterbukaan informasi publik (KIP) melalui optimalisasi media sosial, media massa, dan layanan digital. Langkah ini dilakukan untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi mengenai kegiatan, kebijakan, serta kinerja pimpinan dan anggota DPRD.

Komitmen tersebut disampaikan Sekretaris DPRD Sumbar, Maifrizon, didampingi Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan, Dahrul Idris, dalam presentasi Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik 2026 yang digelar Komisi Informasi (KI) Sumbar di Aula Kantor Bappeda Sumbar, Kamis (22/10).

Dalam presentasi itu, Sekretariat DPRD Sumbar memaparkan capaian publikasi, inovasi pelayanan, serta strategi pengembangan keterbukaan informasi. Salah satu capaian yang disorot adalah meningkatnya jangkauan media sosial resmi DPRD Sumbar sepanjang 2024-2026.

Data presentasi menunjukkan, jumlah pengikut Instagram DPRD Sumbar meningkat dari 4.484 pada 2024 menjadi 10.300 pada 2026. Jangkauan akun juga naik dari 306.000 menjadi 870.600, sedangkan jumlah unggahan bertambah dari 2.148 menjadi 5.100.

Peningkatan serupa terlihat pada platform digital lainnya. Jumlah pelanggan YouTube DPRD Sumbar naik dari 639 menjadi 766, dengan jumlah video bertambah dari 209 menjadi 249. Sementara itu, pengikut TikTok meningkat dari 1.667 menjadi 2.094 dan jumlah suka bertambah dari 12.900 menjadi 18.600.

Adapun akun Facebook DPRD Sumbar tercatat memiliki sekitar 6.700 pengikut, sedangkan akun X atau Twitter memiliki 273 pengikut.

Selain memanfaatkan media digital, DPRD Sumbar juga mendekatkan diri kepada masyarakat melalui kegiatan yang melibatkan partisipasi publik, seperti Jalan Sehat Bersama Parlemen. Kegiatan tersebut menjadi ruang bagi masyarakat untuk berinteraksi langsung dengan pimpinan dan anggota DPRD sekaligus membangun kebersamaan.

Maifrizon menyampaikan, pengembangan keterbukaan informasi didukung peningkatan kompetensi sumber daya manusia (SDM), pengisian pelayanan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), serta kerja sama dengan wartawan parlemen untuk menyebarluaskan informasi mengenai aktivitas dan kinerja kedewanan.

Strategi publikasi tersebut mengusung motto Cepat Diterima, Mudah Dicerna (CDMD). Melalui pendekatan ini, informasi diharapkan tidak hanya cepat sampai kepada masyarakat, tetapi juga mudah dipahami.

Publikasi DPRD Sumbar juga diarahkan untuk menjangkau aktivitas anggota dewan di lapangan, konsultasi publik, dialog dengan masyarakat, hingga kegiatan sosial di daerah. Dengan begitu, informasi yang disampaikan tidak hanya berkutat pada agenda formal, tetapi juga menggambarkan persoalan dan kebutuhan masyarakat yang menjadi perhatian lembaga perwakilan rakyat.

Sekretariat DPRD Sumbar turut memaparkan 19 inovasi di bidang publikasi, dokumentasi, literasi, dan pelayanan masyarakat untuk memperkuat pelayanan informasi.

Inovasi tersebut meliputi Kios Layanan PPID, Kios Layanan IDIH, layanan disabilitas, aplikasi E-PPID, Pojok Baca Digital, Mimbar DPRD, Repository Produk Hukum, TV Agenda, videowall, aplikasi ASIK untuk aspirasi publik, E-Kliping, aplikasi KuBe (Kumpulan Berita), E-Pustaka, Podcast ASIK, aplikasi Agenda ASIK, Buku Tamu Digital ASIK, kerja sama perpustakaan digital, storytelling, serta manajemen kendaraan.

Sejumlah inovasi tersebut berkaitan langsung dengan kemudahan masyarakat mengakses informasi. Kios Layanan PPID memfasilitasi permohonan informasi publik, sedangkan Kios Layanan IDIH membantu masyarakat menelusuri dokumen hukum.

Aplikasi ASIK disiapkan sebagai sarana penyampaian aspirasi kepada anggota DPRD. Sementara itu, E-Kliping dan KuBe mendukung dokumentasi serta penyebaran pemberitaan mengenai aktivitas DPRD yang dipublikasikan melalui berbagai media.

Sekretariat DPRD Sumbar juga menyediakan fasilitas pendukung pelayanan, seperti fasilitas bagi penyandang disabilitas, ruang laktasi, dan klinik kesehatan. Adapun TV Agenda digunakan untuk menyampaikan informasi mengenai jadwal dan lokasi rapat DPRD.

Selain mengembangkan teknologi dan layanan digital, Sekretariat DPRD Sumbar juga menaruh perhatian pada penguatan sumber daya manusia. Penambahan tenaga publikasi menjadi salah satu langkah untuk mendukung peliputan, dokumentasi, pengolahan materi berita, serta distribusi informasi mengenai kegiatan pimpinan dan anggota DPRD.

Upaya tersebut diperkuat melalui kerja sama dengan wartawan parlemen, wawancara anggota DPRD dengan media, serta rapat koordinasi pengelola PPID. Penguatan kapasitas sumber daya manusia, PPID, tim teknologi informasi, dan wartawan parlemen diharapkan dapat meningkatkan kualitas penyampaian informasi kepada masyarakat.

Dalam presentasi tersebut, Sekretariat DPRD Sumbar juga memaparkan sejumlah penghargaan di bidang keterbukaan informasi publik, inovasi pemerintahan, dokumentasi hukum, dan kerja sama penyiaran. Penghargaan yang dicantumkan antara lain predikat badan publik informatif pada periode 2020-2025, Anugerah Tinarbuka 2023, serta penghargaan terkait integrasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) dengan sistem nasional yang masuk lima terbaik se Indonesia.

Berbagai capaian dan inovasi tersebut menjadi bagian dari upaya Sekretariat DPRD Sumbar memperkuat keterbukaan informasi publik. Namun, keberhasilan keterbukaan informasi tidak cukup diukur dari pertumbuhan pengikut media sosial maupun jumlah konten yang dipublikasikan. (byr/rel)



SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

KLIPING BERITA

KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
Padang Ekspres	SENIN 26 OKTOBER 2026	6

DPRD Sumbar Dorong Perda Jadi Solusi Nyata

BANJIR akibat buruknya tata ruang, ancaman narkoba, masa depan generasi muda, hingga kepastian menghadapi bencana menjadi persoalan yang membutuhkan tindakan nyata, bukan sekadar imbauan. Di tengah tantangan tersebut, DPRD Sumbar mengintensifkan sosialisasi peraturan daerah (perda) untuk mendekatkan kebijakan kepada masyarakat sekaligus mendorong ketelibatan publik.

Penegasan dan ajakan DPRD Sumbar turun ke daerah pemilihan masing-masing untuk menyosialisasikan sejumlah perda. Materinya beragam, mulai dari perlindungan lingkungan hidup, pencegahan narkoba, kepemudaan, hingga penanggulangan bencana.

Ketua DPRD Sumbar Muhidi saat memyosialisasikan Perda Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Sumbar di Padang, menyoroti alih fungsi lahan dan penyempitan drainase akibat pembangunan yang mengabaikan aspek lingkungan.

Menurutnya, pembangunan yang menutup jalur aliran air secara ilegal dapat memperparah genangan ketika curah hujan tinggi. Karena itu, pengawasan harus dilakukan sejak tahap perencanaan bangunan, termasuk memastikan legalitas dan kelayakan geografis lahan. "Perda ini bukan sekadar dokumen administratif, melainkan instrumen hukum adaptasi lingkungan," tegas Muhidi.

Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Sumbar, Vornike Yuniarti Mursalim, yang menjadi narasumber, menyebut narkoba sebagai ancaman serius yang merusak generasi muda. Ia mengingatkan bahaya narkoba tidak hanya berdampak pada kesehatan, tetapi juga merusak masa depan keluarga dan masyarakat.

Evi menilai kejahatan narkoba kini semakin terorganisir dan memanfaatkan teknologi digital, sehingga pencegahan tidak cukup hanya dengan penindakan hukum. Ia mengajak masyarakat, khususnya orang tua dan pendidik, untuk lebih peka terhadap perubahan perilaku anak serta aktif melaporkan jika menemukan indikasi penyalahgunaan narkoba di lingkungan sekitar.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Sumbar Evi Yandri Rajo Budiman, saat memyosialisasikan Perda Nomor 9 Tahun 2018 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya di Gedung Rakoma Kudus, Padang, Minggu (18/10), mengajak masyarakat dalam berantas narkoba dan kenakalan remaja, sekaligus mengingatkan potensi meningkatnya gangguan sosial.

Ali mengingatkan, pemuda harus menjauhi diri dengan pergaulan, kesempatan, dan kemudahan untuk menyalahgunakan Indonesia Emas 2045. Kegiatan ini turut dihadiri Kepala Bidang Pengembangan Pemuda Dispora Sumbar, Umi Wahid Ketua DPRD Pasaman, Hasrizaldi; serta Sekretaris Nagari Taruang-Taruang, Rajab.

Kesiapsiagaan bencana juga menjadi perhatian utama. Anggota DPRD Sumbar Siti Izzati Adlia memosialisasikan Perda Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penanggulangan Bencana di Aula SMA Negeri 1 Lubuksikaping, Sabtu (17/10). Ia menekankan pentingnya pemahaman mengenai evakuasi, lokasi aman, serta langkah penyelamatan sebelum, saat, dan setelah bencana.

Pesan senada disampaikan Wakil Ketua DPRD Sumbar Nanda Satria, dalam sosialisasi perda yang sama bersama pengurus Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Sumbar. Ia mengingatkan ancaman bencana di Sumbar, seperti risiko bencana akibat tahun lalu, untuk menjadikan momentum mengubah akibat tersebut menjadi kesadaran kolektif.

Rangkaian sosialisasi tersebut menegaskan pentingnya menghadirkan perda di tengah persoalan sehari-hari masyarakat. Namun, efektivitasnya tidak cukup sekadar disampaikan. Pengawasan, koordinasi lintas sektor, dan keterlibatan warga menjadi kunci agar regulasi benar-benar memberi dampak nyata di Sumbar. (*)



133



WAKIL Ketua DPRD Sumbar Evi Yandri Rajo Budiman bersama peserta saat menyosialisasikan Perda Nomor 9 Tahun 2018 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya di Padang.



KETUA DPRD Sumbar Muhidi bersama peserta saat menyosialisasikan Perda Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Sumbar di Padang.



WAKIL Ketua DPRD Sumbar M Iqra Chissa Putra saat menyosialisasikan Perda Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga di Padang.



WAKIL Ketua DPRD Sumbar Nanda Satria saat sosialisasi Perda Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penanggulangan Bencana sama bersama pengurus KNPI Sumbar di Padang.

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

KLIPING BERITA

KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
Rakyat Sumbar	SELASA, 27 OKTOBER 2026	1

WSYF, Penggerak Ekonomi Kreatif dan Gastronomi

Padang, Rakyat Sumbar — Wali Kota Padang Fadly Amran menghadiri puncak West Sumatera Youth Fest (WSYF) 2026 yang dipusatkan di kawasan Kota Tua Padang, Minggu (25/10) malam.

Kegiatan yang berlangsung pada 24-25 Oktober 2026 tersebut turut dihadiri Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi, Wakil Ketua DPRD Sumbar Nanda Satria, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sumbar dan Kota Padang, serta unsur terkait lainnya.

Fadly Amran mengapresiasi penyelenggaraan WSYF 2026 yang memadukan ekonomi kreatif, panggung hiburan, dan gastronomi. Menurutnya, kegiatan tersebut sejalan dengan upaya Pemerintah Kota (Pemko) Padang dalam mengembangkan kawasan Kota Tua sebagai destinasi wisata unggulan.

"Melalui Program Unggulan (Progul) Jelajah Padang, kita terus mengembangkan kawasan Kota Tua menjadi destinasi wisata unggulan. Terima kasih kepada Pemerintah Provinsi Sumbar, Wakil Ketua DPRD Sumbar Nanda Satria, dan para sponsor yang berkolaborasi menggelar WSYF 2026 sebagai ruang kreativitas anak muda sekaligus penggerak ekonomi kreatif dan gastronomi," ujar Fadly.

Ia menilai WSYF 2026 tidak hanya menjadi ajang hiburan, tetapi juga wadah bagi anak muda untuk menampilkan karya, mengembangkan potensi, dan membuka peluang ekonomi kreatif. Ia berharap kegiatan serupa terus digelar untuk memperkuat daya tarik Kota Tua sebagai destinasi wisata unggulan.

"WSYF menjadi wadah bagi anak-anak muda Padang untuk berkarya, berinovasi, dan mengangkat potensi lokal agar mampu bersaing di tingkat nasional maupun global. Pemko Padang akan terus mendukung ruang kreatif seperti ini untuk mengembangkan talenta muda dan memperkuat ekonomi kreatif," katanya.

Fadly berharap kegiatan ekonomi kreatif dapat terus dikembangkan melalui kolaborasi pemerintah, komunitas, pelaku usaha, dan generasi muda. Dengan demikian, potensi lokal Kota Padang dapat semakin dikenal, sekaligus membuka peluang usaha dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Mengusung tema "Create Locally, Go Globally", WSYF 2026 menghadirkan 21 subsektor ekonomi kreatif sebagai ruang bagi generasi muda untuk mengekspresikan kreativitas, menampilkan karya, serta mengangkat potensi lokal agar dikenal lebih luas.

Beragam agenda memeriahkan festival tersebut, mulai dari pameran, bazar, berbagai kompetisi, kuliner, live art, live music, hingga networking. Kegiatan ini juga menampilkan penampilan 20 band pelajar tingkat SMP dan SMA sederajat yang menarik perhatian pengunjung.

Kegiatan semakin semarak dengan penampilan penyanyi asal Sumbar Yaya Fara serta grup musik Orkes Taman Bunga. Perpaduan pertunjukan musik, aktivitas kreatif, dan kuliner menjadikan kawasan Kota Tua sebagai ruang berkumpul sekaligus berekspresi bagi generasi muda dan masyarakat. (mul)



WALI Kota Padang Fadly Amran berfoto bersama saat menghadiri puncak West Sumatera Youth Fest di kawasan Kota Tua Padang, Minggu (25/10) malam.



SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

KLIPING BERITA

KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
SINGGALANG	Rabu, 28 Oktober 2026 (16 Jumadil Awal 1448 H)	6

KETUA DPRD SUMBAR, MUHIDI :

Guru, Kunci Utama Wujudkan Generasi Tangguh

PADANG - SINGGALANG

Sektor pendidikan memegang peranan krusial dalam mencetak generasi unggul yang siap membawa bangsa menuju gerbang Indonesia Emas. Menyadari hal tersebut, Ketua DPRD Sumatera Barat (Sumbar), Muhidi menegaskan komitmen penuhnya untuk terus mengawal dan memajukan mutu pendidikan di ranah Minang.

Komitmen strategis ini disampaikan Muhidi, saat menjadi narasumber dalam agenda Seminar dan Berbagi Praktik Baik Guru Fisika SMA dan SMK se-Sumbar. Acara yang berlangsung di Aula Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Negeri Padang (UNP) baru-baru ini.

Dalam pemaparannya yang bertajuk "Bagaimana Menjadi Pendidik Unggul Menuju Indonesia Emas," Muhidi membedah tantangan besar yang dihadapi dunia pendidikan kontemporer. Sebagai teknik yang memiliki latar belakang sebagai seorang pendidik, ia menekankan bahwa guru memiliki tanggung jawab moral yang jauh lebih besar daripada sekadar menuntaskan kurikulum di dalam kelas.

"Karena latar belakang saya adalah seorang pendidik, fokus dan program kerja yang saya kawal di parlemen akan selalu melekat erat dengan pembenahan sektor pendidikan. Kita harus sepakat dan melihat bahwa dari rahim dunia pendidikan inilah generasi masa depan yang tangguh dilahirkan," ujar politisi senior tersebut di hadapan ratusan peserta.

Muhidi menggarisbawahi bahwa di era disrupsi teknologi saat ini, pengurasan materi pelajaran seperti fisika harus diimbangi dengan penanaman nilai-nilai moral. Guru dituntut tidak hanya menjadi penyampai ilmu pengetahuan (agent of knowledge), tetapi juga menjadi pembentuk karakter siswa (agent of character).

Kombinasi antara kecerdasan intelektual dan kekuatan mental-spiritual inilah yang diyakini menjadi modal utama menuju cita-cita Indonesia Emas.

Lebih lanjut, ia mendorong para guru fisika untuk berinovasi dan merumuskan metode pembelajaran yang menyenangkan serta adaptif. Fisika tidak boleh lagi dipandang sebagai monok memakutkan penuh rumus rumit, melainkan sebuah ilmu terapan yang relevan dengan kehidupan sehari-hari siswa.

"Kita harus mampu mengubah pola pikir peserta didik, membangun karakter dan adab mereka, serta mengolah ilmu menjadi kompetensi nyata yang memberikan manfaat. Sekolah harus menjadi tempat yang menyenangkan dan mampu membangun kepercayaan diri siswa untuk berani mencoba hal baru," tegas Muhidi menambahkan.

Menurut Muhidi, untuk melakukan lompatan besar di sektor pendidikan, diperlukan keberanian dari seluruh elemen pendidik untuk bersinergi dan berkontribusi secara konkret. Kebijakan politik anggaran dan legislasi di tingkat daerah pun diarahkan agar berpihak sepenuhnya pada peningkatan mutu sekolah serta kesejahteraan para guru.

"Pengalaman hidup mengajarkan saya bahwa jika kita ingin benar-benar membawa perubahan yang lebih besar bagi masyarakat luas, kita harus berani masuk ke ruang pengambilan keputusan. Lewat kursi parlemen inilah, komitmen pendidikan ini kami perjuangkan secara regulasi," kata alumnus IKIP Padang tersebut.

Agenda strategis ini berhasil terlaksana berkat kolaborasi solid antara Bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan (PGTK) Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat bersama Departemen Fisika FMIPA UNP. Sinergi ini sengaja ditangani sebagai wadah resmi bagi para guru untuk saling berbagi teknik mengajar efektif di kelas serta memperkuat kompetensi pedagogik mereka.

Antusiasme peserta terlihat sangat tinggi. Tercatat sebanyak 200 guru fisika tingkat SMA dan SMK dari berbagai kabupaten dan kota di Sumatera Barat berpartisipasi aktif. Guna menjangkau wilayah yang luas, panitia mengombinasikan sistem pelaksanaan secara hibrida, yakni tatap muka langsung (luring) di aula dan sebagian lainnya terhubung melalui ruang virtual (daring).

Melalui momentum seminar ini, DPRD Sumbar bersama jajaran Dinas Pendidikan dan akademisi UNP berharap adanya akselerasi peningkatan mutu lulusan sekolah menengah. Penguatan kompetensi guru fisika ini diharapkan mampu memicu lahirnya inovasi-inovasi baru dalam pembelajaran sains yang bermakna di ruang-ruang kelas di seluruh penjuru Sumbar. (*)











KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
KORAN PADANG	KAMIS, 29 OKTOBER 2026	12

Komisi I DPRD Sumbar Dorong Potensi Perikanan Pandam Gadang Jadi Penggerak Ekonomi Masyarakat

POTENSI perikanan dan kekayaan alam yang melimpah di Nagari Pandam Gadang, Kecamatan Gunung Omeh, Kabupaten Limapuluh Kota, dinilai memiliki peluang besar untuk dikembangkan menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat setempat.

Hal itu menjadi perhatian utama dalam kunjungan kerja Komisi I DPRD Provinsi Sumatera Barat ke Kantor Wali Nagari Pandam Gadang. Kunjungan terse but digelar untuk memperkuat sinergi dengan peme rintah nagari sekaligus menyerap aspirasi masyarakat secara langsung.

Ketua Komisi I DPRD Sumbar, Sawal, menegaskan bahwa setiap nagari di Sumbar memiliki keunggulan komparatif yang perlu diidentifikasi dan dikelola secara optimal agar berdaya guna bagi kesejahteraan warga.

"Setiap nagari memiliki potensi yang bisa dikem bangkan. Potensi perikanan dan kekayaan alam Pandam Gadang ini perlu dioptimalkan agar tidak seka dar jadi keunggulan wilayah, tetapi memberikan dam pak nilai ekonomi yang nyata bagi masyarakat," ujar nya.

Ia menambahkan, pengembangan sektor unggu lan nagari membutuhkan perencanaan yang matang, tata kelola yang transparan, serta keterlibatan aktif warga. Selain perikanan, keindahan panorama alam Pandam Gadang juga berpotensi digarap menjadi destinasi wisata berwawasan lingkungan.

Wali Nagari Pandam Gadang beserta jajaran perangkat dan tokoh masyarakat menyambut hangat kedatangan rombongan Komisi I DPRD Sumbar. Per temuan tersebut diakhiri dengan diskusi ramah ta mah serta santap bersama kuliner khas setempat. *



KI IPING RFRITA



ROMBONGAN *Komisi I DPRD Sumbar foto bersama perangkat dan tokoh masyarakat di pelataran Kantor Wali Nagari Pandam Gadang usai penyerapan aspirasi.*



ANGGOTA *Komisi I DPRD Sumbar Indra Catri bersama Ketua Komisi I Sawal dan rombongan berdiskusi di ruang tamu Kantor Wali Nagari Pandam Gadang.*



KETUA *Komisi I DPRD Sumbar, Sawal.*



KETUA *Komisi I DPRD Sumbar Sawal saat tiba di lokasi kunjungan.*



ANGGOTA *Komisi I DPRD Sumbar Indra Catri.*



SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

KLIPING BERITA

KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
Padang Ekspres	KAMIS 29 OKTOBER 2026	8





SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

KLIPING BERITA

KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
Haluan	KAMIS, 29 OKTOBER 2026	

Komisi I Dorong Pengembangan Potensi Nagari Pandam Gadang

LIMAPULUH KOTA, HALUAN— Potensi perikanan dan kekayaan alam Nagari Pandam Gadang, Kecamatan Gunung Omeh, Kabupaten Lima Puluh Kota, dinilai memiliki peluang untuk dikembangkan sebagai penggerak ekonomi masyarakat.

Pengelolaan potensi tersebut diharapkan dapat membuka peluang usaha, meningkatkan pendapatan warga, dan mendorong kemajuan nagari.

Hal itu menjadi perhatian dalam kunjungan kerja Komisi I DPRD Provinsi Sumatera Barat ke Kantor Wali Nagari Pandam Gadang, baru-baru ini. Kunjungan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat komunikasi dengan pemerintah nagari sekaligus melihat langsung potensi dan kebutuhan masyarakat.

Ketua Komisi I DPRD Sumbar, Sawal, mengatakan setiap nagari memiliki potensi yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, potensi lokal perlu diidentifikasi dan dikelola secara optimal agar memberikan manfaat ekonomi bagi warga.

"Setiap nagari memiliki potensi yang bisa dikembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Potensi perikanan dan kekayaan alam yang dimiliki Nagari Pandam Gadang perlu dioptimalkan agar tidak hanya menjadi keunggulan wilayah, tetapi juga memberikan nilai ekonomi bagi masyarakat," uparnya.

Menurut Sawal, pengembangan potensi nagari membutuhkan perencanaan yang tepat, pengelolaan yang baik, serta keterlibatan masyarakat. Dengan langkah tersebut, sumber daya yang tersedia dapat dimanfaatkan untuk membuka peluang usaha dan menciptakan sumber pendapatan baru.

"Kita ingin potensi yang dimiliki nagari benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Karena itu, penting untuk melihat kebutuhan di lapangan dan mendorong pengembangan potensi lokal sesuai dengan kondisi serta kemampuan masing-masing nagari," katanya.

Selain sektor perikanan, kawasan alam Pandam Gadang juga berpeluang dikembangkan untuk mendukung kegiatan ekonomi masyarakat. Pengembangan potensi tersebut perlu disesuaikan dengan karakteristik nagari, kearifan masyarakat, serta upaya menjaga kelestarian lingkungan.

Pemerintah nagari memiliki peran penting dalam memetakan potensi unggulan dan menghimpun aspirasi warga. Hasil pemetaan ini dapat menjadi dasar untuk menyusun program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan dan peluang ekonomi setempat.

Melalui komunikasi antara pemerintah nagari dan DPRD Sumbar, potensi serta kebutuhan pembangunan diharapkan dapat menjadi bahan perhatian dalam mendorong pengembangan ekonomi dan kemajuan nagari.

Dalam kunjungan tersebut, anggota Komisi I DPRD Sumbar disambut Wali Nagari Pandam Gadang bersama perangkat nagari dan tokoh masyarakat. Kegiatan juga diisi dengan ramah tamah serta menikmati kuliner khas setempat. (*)



SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT



KUNJUNGAN Komisi I DPRD Sumbar ke Nagari Pandam Gadang, di Limapuluh Kota



BERDISKUSI saat kunjungan



KETUA Komisi I DPRD Sumbar, Sawal



BERFOTO bersama

EAKING
EWS!

0751 7057591

https://dprd.sumbarprov.go.id/

W2

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

KLIPING BERITA

KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
Haluan	KAMIS, 29 OKTOBER 2025	2

BSN Bakal Dinonaktifkan Statusnya dari Anggota Dewan

PADANG, HALUAN — Status keanggotaan BSN di DPRD Sumatera Barat (Sumbar) memasuki babak baru setelah dirinya berstatus terdakwa dalam kasus dugaan korupsi fasilitas kredit modal kerja (KMK) dan bank garansi di BNI Cabang Ahmad Yani Padang yang melibatkan PT Bersal Iksan Pemada. Kasus tersebut diduga menimbulkan kerugian sekitar Rp34 miliar.

Meski telah berstatus terdakwa, BSN masih tercatat sebagai anggota DPRD Sumbar dan tetap menerima gaji. Pemberhentian sementara terhadap dirinya masih menunggu surat keputusan (SK) dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Sumbar, Bakri Bakar, mengatakan pihaknya tidak menangani substansi perkara hukum yang menjerat BSN. Penanganan kasus tersebut sepenuhnya menjadi kewenangan aparat penegak hukum.

Menurut Bakri, mekanisme pemberhentian sementara dapat diproses setelah anggota dewan berstatus terdakwa. Usulan pemberhentian sementara BSN telah disampaikan kepada Mendagri melalui Gubernur Sumbar sekitar sebulan lalu.

"Kalau sudah terdakwa misalnya. Itu harus diberhentikan sementara. Itu sudah diusulkan oleh DPRD ke Kemendagri. Sekarang kita tunggu SK Mendagri," ungkapnya, Rabu (28/10).

Ia menjelaskan, setelah SK pemberhentian sementara diterbitkan, hak-hak BSN sebagai anggota dewan akan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, status dan hak keanggotaannya tidak lagi berjalan seperti sebelumnya.

Bakri menegaskan, BK DPRD Sumbar hanya menjalankan kewenangannya dalam aspek kode etik dan tidak akan mengintervensi proses hukum yang sedang berlangsung. "Kita hanya berada di kode etik. Kita tidak bisa melakukan intervensi," ujarnya.

Ia mengatakan, status pemberhentian sementara masih memungkinkan dipulihkan apabila BSN nantinya dinyatakan bebas murni. Sebaliknya, apabila terbukti bersalah, pemberhentian sementara tersebut dapat berlanjut menjadi pemberhentian tetap sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku.

"Beliau berjuang dulu dari dakwaan dan tuntutan. Mana tahu yang bersangkutan bisa bebas murni. Kalau bebas murni, surat yang nanti dikeluarkan Mendagri tentu dikembalikan lagi. Dia pulih seperti biasanya. Tapi kalau terbukti bersalah, yang sementara tadi bisa permanen," ujarnya.

Sementara itu, Partai Demokrat Sumbar disebut masih menunggu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atau inkrah sebelum mengambil keputusan terkait Pergantian Antarwaktu (PAW) terhadap BSN. Dengan demikian, proses administratif pemberhentian sementara di DPRD Sumbar dan keputusan partai terkait PAW masih mengikuti tahapan serta ketentuan masing-masing. **(h/rel)**



KETUA Badan Kehormatan DPRD Sumbar, Bakri Bakar, IST

KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
POSMETRO PADANG	KAMIS, 29 OKTOBER 2026	8

Komitmen Anggota DPRD Sumbar Layani Masyarakat

Gustami Hidayat Serahkan Bantuan Penanganan Rawan Pangan untuk Ibu Hamil dan Balita

PADANG, METRO

Komitmen nyata dalam melayani masyarakat dan menanggulangi kerawanan gizi terus ditunjukkan oleh Anggota DPRD Provinsi Sumatra Barat dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Gustami Hidayat. Bekerja sama dengan Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat, tokoh PKS yang senantiasa menempatkan kemaslahatan umat sebagai prioritas ini menyalurkan bantuan dalam program Penyerahan Bantuan Penanganan Daerah Rawan Pangan (PDRP) pada Selasa (27/10).

Penyaluran bantuan ini menyasar sejumlah titik pusat layanan kesehatan di Kota Padang, di antaranya Puskesmas Lubuk Begalung dan Puskesmas Nanggalo.Langkah konkret tersebut difokuskan pada penanggulangan kondisi kerawanan pangan dan gizi bagi kelompok rentan,yakni balita, ibu hamil, serta ibu menyusui di Kota Padang.

Bantuan pangan dan sembako padat gizi, seperti telur, beras, dan susu ini direalisasikan melalui program Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) anggota dewan. Hal ini menjadi bukti tegaknya nilai-nilai kepelayanan PKS yang menempatkan kesejahteraan umat dan perlindungan generasi penerus sebagai fondasi utama pembangunan daerah.

Dalam sambutannya di hadapan warga penerima manfaat, Gustami Hidayat menegaskan bahwa program ini memiliki makna kepedulian yang jauh lebih besar daripada sekadar distribusi bahan pokok.

"Kita bersinergi dengan Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat untuk memberikan paket-paket bantuan sembako untuk daerah yang rawan pangan. Ini bukan hanya sekadar memberikan bantuan sembako begitu saja, tetapi ini merupakan bentuk kepedulian kita di DPRD Provinsi Sumatera Barat," ujar Gustami Hidayat memberikan arahan.

Lebih lanjut, legislator PKS ini menekankan pentingnya mempersiapkan sumber daya manusia (SDM) Sumatera Barat yang unggul dengan memastikan asupan gizi yang memadai sejak dini. Ia meyakini bahwa kualitas kesehatan ibu dan anak tidak boleh diabaikan, karena mereka adalah penentu kemajuan daerah di masa yang akan datang.

"Bagaimana kesehatan ibu-ibu hamil dan anak-anak balita, yang merupakan aset investasi pembangunan Sumatera Barat ke depan itu, semakin baik," tegas Gustami.

Kehadiran program bantuan dari inisiatif kader PKS ini disambut dengan penuh antusias oleh ratusan warga, khususnya kaum ibu yang memadati lokasi puskesmas. Sinergi berkelanjutan antara wakil rakyat dari PKS dengan pemerintah daerah ini diharapkan dapat menjadi benteng kokoh dalam mengentaskan masalah gizi buruk, menekan angka stunting,sekaligus memastikan setiap anak di Ranah Minang dapat tumbuh sehat, cerdas, dan berakhlak mulia. (rgr)



SERAHKAN BANTUAN—Anggota DPRD Sumbar, Gustami Hidayat menyerahkan bantuan bantuan pangan dan sembako padat gizi, seperti telur, beras, dan susu bagi kelompok rentan, yaitu balita, ibu hamil, serta ibu menyusui di Kota Padang.



SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

KLIPING BERITA

KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
KORAN PADANG	SABTU, 31 OKTOBER 2026	2

Komisi V DPRD Sumbar Matangkan Ranperda Olahraga, Jaminan Atlet dan Pembinaan Generasi Muda Jadi Perhatian

KOMISI V DPRD Provinsi Sumatera Barat terus mematangkan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyelenggaraan Keolahragaan. Setelah ditetapkan sebagai Ranperda prakarsa DPRD Sumbar, regulasi ini dibahas secara intensif guna memberikan payung hukum yang kuat bagi pembinaan atlet, peningkatan prestasi, serta jaminan kesejahteraan para pelaku olahraga.

Sebagai bagian dari penyempurnaan draft regulasi, Komisi V telah melakukan studi banding ke Kemenpora RI yang dilanjutkan dengan rapat kerja bersama Dispora dan KONI Sumbar di Ruang Rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sumbar baru-baru ini.

Ketua Tim Pembahasan Ranperda Penyelenggaraan Keolahragaan, Salamat Simamora, menekankan bahwa salah satu poin krusial yang diakomodasi dalam Ranperda ini adalah kepastian jaminan sosial ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan) bagi para atlet dan pelatih.

"Pelatih dan atlet memiliki keluarga yang harus dinafkahi. Aktivitas olahraga sering berhadapan dengan kondisi berisiko tinggi dan cedera. Karena itu, perlindungan masa depan dan keselamatan mereka wajib dijamin oleh pemerintah," tegas Salamat Simamora.

Sementara itu, Ketua KONI Sumbar Hamdanus telah menyerahkan daftar rekomendasi strategis untuk memperkaya muatan Ranperda, mulai dari pembinaan berjenjang hingga penguatan sarana prasarana. Anggota Komisi V DPRD Sumbar, Sri Kumala Dewi, menambahkan bahwa regulasi olahraga ini merupakan instrumen penting untuk membentengi generasi muda yang mendominasi 60 persen populasi Sumbar dari ancaman narkoba, judi online, dan pengangguran."



KLIPING BERITA

SEKRETARIS *Komisi V DPRD Sumbar Mario Syahjohan bersama Wakil Ketua Komisi V Nurfirmanwansyah memimpin pembahasan intensif Ranperda Penyelenggaraan Keolahragaan.*

KETUA *KONI Sumbar Hamdanus menyerahkan berkas rekomendasi strategis keolahragaan secara simbolis kepada Ketua Tim Pembahasan Ranperda Salamat Simamora.*

KADISPORA *Sumbar Tasliatul Fuadi, Ketua Tim Pembahasan Ranperda Salamat Simamora, dan Anggota Komisi V DPRD Sumbar Neldaswenti berdiskusi membatangkan pasal-pasal perlindungan atlet.*

SUASANA *Rapat Kerja Komisi V DPRD Sumbar bersama Dispora dan KONI Sumbar di Ruang Rapat Badan Anggaran DPRD Sumbar.*

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

KLIPING BERITA

KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
Haluan	SABTU,31 OKTOBER 2026	9

PERKUAT KUALITAS PENDIDIKAN

Ketua DPRD Sumbar Ajak Guru Berinovasi dan Bangun Karakter Siswa

PADANG, HALUAN- Sektor pendidikan memegang peranan krusial dalam mencetak generasi unggul yang siap membawa bangsa menuju gerbang Indonesia Emas. Menyadari hal tersebut, Ketua DPRD Sumatera Barat (Sumbar), Muhidi menegaskan komitmen penuhnya untuk terus mengawal dan memajukan mutu pendidikan di ranah Minang.

Komitmen strategis ini disampaikan Muhidi, saat menjadi narasumber dalam agenda Seminar dan Berbagi Praktik Baik Guru Fisika SMA dan SMK se-Sumbar. Acara yang berlangsung di Aula Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Negeri Padang (UNP) baru-baru ini.

Dalam pemaparannya yang bertajuk "Bagaimana Menjadi Pendidik Unggul Menuju Indonesia Emas," Muhidi membedah tantangan besar yang dihadapi dunia pendidikan kontemporer. Sebagai tokoh yang memiliki latar belakang sebagai seorang pendidik, ia menekankan bahwa guru memiliki tanggung jawab moral yang jauh lebih besar daripada sekadar menuntaskan kurikulum di dalam kelas.

"Karena latar belakang saya adalah seorang pendidik, fokus dan program kerja yang saya kawal di parlemen akan selalu melekat erat dengan pembenahan sektor pendidikan. Kita harus sepakat dan melihat bahwa dari rahim dunia pendidikan inilah generasi masa depan yang tangguh dilahirkan," ujar politisi senior tersebut di hadapan ratusan peserta.

Muhidi menggarisbawahi bahwa di era disrupsi teknologi saat ini, penguasaan materi pelajaran seperti fisika harus diimbangi dengan penanaman nilai-nilai moral. Guru dituntut tidak hanya menjadi penyampai ilmu pengetahuan (agent of knowledge), tetapi juga menjadi pembentuk karakter siswa (agent of character).

Kombinasi antara kecerdasan intelektual dan kekuatan mental-spiritual inilah yang diyakini menjadi modal utama menuju cita-cita Indonesia Emas.

Lebih lanjut, ia mendorong para guru fisika untuk berinovasi dan merumuskan metode pembelajaran yang menyenangkan serta adaptif. Fisika tidak boleh lagi dipandang sebagai momok menakutkan penuh rumus rumit, melainkan sebuah ilmu terapan yang relevan dengan kehidupan sehari-hari siswa.

"Kita harus mampu mengubah pola pikir peserta didik, membangun karakter dan adab mereka, serta mengolah ilmu menjadi kompetensi nyata yang memberikan manfaat. Sekolah harus menjadi tempat yang menyenangkan dan mampu membangun kepercayaan diri siswa untuk berani mencoba hal baru," tegas Muhidi menambahkan.

Menurut Muhidi, untuk



melakukan lompatan besar di sektor pendidikan, diperlukan keberanian dari seluruh elemen pendidik untuk bersinergi dan berkontribusi secara konkret. Kebijakan politik anggaran dan legislasi di tingkat daerah pun diarahkan agar berpihak sepenuhnya pada peningkatan mutu sekolah serta kesejahteraan para guru.

"Pengalaman hidup mengajarkan saya bahwa jika kita ingin benar-benar membawa perubahan yang lebih besar bagi masyarakat luas, kita harus berani masuk ke ruang pengambilan keputusan. Lewat kursi parlemen inilah, komitmen pendidikan ini kami perjuangkan secara regulasi," kata alumnus IKIP Padang tersebut.

Agenda strategis ini berhasil terlaksana berkat kolaborasi solid antara Bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan (PGTK) Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat bersama Departemen Fisika FMIPA UNP. Sinergi ini sengaja dibangun sebagai wadah resmi bagi para guru untuk saling berbagi teknik mengajar efektif di kelas serta memperkuat kompetensi pedagogik mereka.



Peserta kegiatan berfoto bersama dengan Ketua DPRD Sumbar

Antusiasme peserta terlihat sangat tinggi. Tercatat sebanyak 200 guru fisika tingkat SMA dan SMK dari berbagai kabupaten dan kota di Sumatera Barat berpartisipasi aktif. Guna menjangkau wilayah yang luas, panitia mengombinasikan sistem pelaksanaan secara hibrida, yakni tatap muka langsung (luring) di aula dan sebagian lainnya terhubung melalui ruang virtual (daring).

Melalui momentum seminar ini, DPRD Sumbar bersama jajaran Dinas Pendidikan dan akademisi UNP berharap adanya akselerasi peningkatan mutu lulusan sekolah menengah. Penguatan kompetensi guru fisika ini diharapkan mampu memicu lahirnya inovasi-inovasi baru dalam pembelajaran sains yang bermakna di ruang-ruang kelas di seluruh penjuru Sumbar. (*)



Ketua DPRD Sumbar, Muhidi



Seminar dan Berbagi Praktik Baik Guru Fisika SMA dan SMK se-Sumbar yang digelar baru-baru ini



Ketua DPRD Sumbar, Muhidi saat menjadi narasumber dalam agenda Seminar dan Berbagi Praktik Baik Guru Fisika SMA dan SMK se-Sumbar

KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
Rakyat Sumbar	KAMIS, 29 OKTOBER 2026	1

Evaluasi Program MBG dan KDMP !!!

Ratusan Mahasiswa Gelar Orasi di DPRD Sumbar

ENDANG PRIBADI
Harian Rakyat Sumbar

Padang, Rakyat Sumbar—Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM-SI) menggelar aksi demonstrasi di Kantor DPRD Sumatra Barat (Sumbar), Rabu (28/10).

Aksi yang bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda itu, mereka menyuarakan kritik terhadap dua tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Pantauan Rakyat Sumbar, ratusan mahasiswa mengenakan pakaian berwarna hitam saat mendatangi gedung DPRD Sumbar. Mereka membawa sejumlah poster berisi kritik terhadap pemerintah, termasuk tuntutan penetapan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) sebagai bencana nasional.

Dalam orasinya, mas-



...si, dan mengecam kebijakan pemerintah dan menyatakan bertanggung jawaban yang menyebabkan anggap bertentangan dengan terhadap masyarakat. Terutama menggunakan Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP).

Koordinator Aksi, Agis Maulana Akbar, menganggap pemerintah perlu mengevaluasi mandat dan pelaksanaan kedua program tersebut. Menurutnya, program yang menggunakan anggaran negara harus memiliki tujuan yang jelas.

"Kita melihat banyaknya anak-anak sekolah yang keracunan, bahkan ada yang meninggal dari MBG ini," ujar Agis.

Ia meminta pemerintah menggunakan anggaran MBG agar pelaksanaannya tidak menimbulkan persoalan baru bagi siswa penerima manfaat.

"MBG ini tujuannya orientasinya ke mana ambisnya. Kalau tidak bagusnya diberhentikan saja," katanya.

Selain MBG, mahasiswa juga menyoroti program KDMP. Mereka menilai pemerintah memaksakan pelaksanaan koperasi tanpa sosialisasi dan persiapan yang matang.

Agis mengatakan, mahasiswa meminta DPRD Sumbar ikut mendesak pemerintah pusat mengevaluasi kedua program tersebut. Karena anggaran yang dikeluarkan untuk kedua program tersebut terlalu besar.

Selain itu, massa turut menyoroti persoalan karhutla. Mereka mendesak pemerintah menetapkan karhutla sebagai bencana nasional agar penanganannya dilakukan secara serius dan menyeluruh.

"Dalam kasus kabut asap yang telah mengancam kesehatan masyarakat, pemerintah malahan tidak menetapkannya sebagai bencana nasional," ujarnya.

Sejumlah personel kepolisian terlihat mengamankan jalannya demonstrasi di sekitar Kantor DPRD Sumbar. Pengamanan dilakukan untuk memberi situasi tetap kondusif selama mahasiswa menyampaikan aspirasi.

Ditengah aksi, Wakil Ketua DPRD Sumbar Nanda Satria turun untuk menemui sejumlah perwakilan massa aksi. Pertemuan itu turut didampingi Sekretaris DPRD (Sekwan) Sumbar, Mislinon.

"Kita memahami bahwa aksi tersebut muncul karena adanya keresahan masyarakat yang ditumpukan kepada mahasiswa. Tidak semua tuntutan akan bisa kami penuhi, namun kami akan menyampaikan aspirasi ini kepada pusat," jelas Nanda.

Nanda juga menegaskan DPRD Sumbar telah memberikan pernyataan dengan pelaksanaan pemerintah pusat yang dinilai tidak memperhatikan kebijakan yang berdampak langsung kepada masyarakat.

"Jadi, kami ingin menyatakan bahwa DPRD Provinsi Sumatera Barat tetap memperjuangkan hak-hak masyarakat dan pemerintah pusat harus lebih memperhatikan kebijakan yang berdampak langsung kepada masyarakat," tegasnya. (rdg)

KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
SINGGALANG	Sabtu, 31 Oktober 2026 (19 Jumadil Awal 1448 H)	6

Komisi I Dorong Optimalisasi Potensi Pandam Gadang

LIMAPULUH KOTA - SINGGALANG

Potensi perikanan dan kehutanan di Nagari Pandam Gadang, Kecamatan Gunung Omeh, Kabupaten Lima Puluh Kota, dinilai berpeluang besar untuk dikembangkan sebagai penggerak utama ekonomi masyarakat. Pengelolaan potensi daerah tersebut diharapkan mampu membuka lapangan usaha baru, meningkatkan pendapatan warga, sekaligus menjaga kelestarian lingkungan hidup.

Pemerintah nagari memandang, pengembangan sektor perikanan, pariwisata alam, dan kehutanan harus dilakukan dengan prinsip berkelanjutan.

Dalam kunjungan kerja tersebut, rombongan Komisi I DPRD Sumbar disambut langsung oleh Wali Nagari Pandam Gadang beserta jajaran perangkat nagari dan tokoh masyarakat. Kegiatan kunjungan ini diakhiri dengan sesi ramah tamah sembari menikmati hidangan kuliner khas daerah setempat. (*)

Hal ini menjadi fokus pertemuan dalam kunjungan kerja Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat ke Kantor Wali Nagari Pandam Gadang, baru-baru ini. Agenda tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat sinergi komunikasi dengan pemerintah nagari, sekaligus meninjau langsung potensi dan kebutuhan riil masyarakat di lapangan.

Ketua Komisi I DPRD Sumbar, Sawal, menegaskan bahwa setiap nagari pada dasarnya memiliki potensi khas yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan. Oleh karena itu, identifikasi dan tata kelola sumber daya lokal harus dilakukan secara optimal agar mampu memberikan dampak ekonomi yang konkret bagi warga setempat.

"Setiap nagari memiliki potensi yang bisa dikembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Potensi perikanan dan kekayaan alam yang dimiliki Nagari Pandam Gadang perlu dioptimalkan agar tidak hanya menjadi keunggulan wilayah, tetapi juga memberikan nilai ekonomi bagi masyarakat," ujarnya.

Menurut Sawal, akselerasi potensi nagari membutuhkan perencanaan yang matang, manajemen yang akuntabel, serta keterlibatan aktif dari masyarakat. Menurut langkah strategis tersebut, sumber daya alam yang tersedia dapat dimanfaatkan secara produktif untuk membuka peluang bisnis dan menciptakan sumber pendapatan baru.

"Kita ingin potensi yang dimiliki nagari benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Karena itu, penting untuk melibatkan kehutanan di lapangan dan mendorong pengembangan potensi lokal sesuai dengan kondisi serta kemampuan masing-masing nagari," katanya.

Selain sektor perikanan, pariwisata dan kehutanan alam Pandam Gadang juga berpotensi besar dikembangkan guna mendukung gerak ekonomi kerakyatan. Namun, pengembangan sektor pariwisata alam ini harus diselaraskan dengan karakteristik nagari, kesiapan masyarakat, serta komitmen kuat untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup.












REAKING
IEWS

KLIPING KORAN



Jl. Khatib Sulaiman No.87 Padang Telp. (0751) 7057391 - 705753
Fax. (0751) 7059328 Padang 25133, Sumatera Barat